



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Untuk Membangun Jiwa Nasionalisme Generasi Muda



Prof. Dr. Sarmini M.Hum
Dr. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si

Prof. Dr. Sarmini M.Hum.
Dr. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si.



**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
UNTUK MEMBANGUN
JIWA NASIONALISME GENERASI
MUDA**



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2020

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK MEMBANGUN JIWA
NASIONALISME GENERASI MUDA**

viii + 161 hlm.; 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-316-012-4

Penulis : Sarmini & Raden Roro Nanik Setyowati

Tata Letak : Nur Huda A.

Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan : Desember 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

PENDIDIKAN MULTIKULTUR UNTUK MEMBANGUN JIWA NASIONALISME GENERASI MUDA

Prof. Dr. Sarmini M.Hum
Dr. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Lunturnya semangat nasionalisme dan kepedulian generasi muda terhadap visi negara di masa yang akan datang menjadi tantangan di era globalisasi pada jaman yang semakin maju ini. Hal ini dapat ditinjau dengan gaya hidup westernisme yang menimbulkan sikap apatis, hedonisme, dan konsumtisme yang tinggi yang begitu melekat dalam kehidupan keseharian para generasi muda. Tantangan berikutnya adalah paham liberalis yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak terhadap kehidupan bangsa.

Upaya untuk menumbuhkan nasionalisme sebenarnya telah banyak dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya melalui, pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab, memelihara semangat, tekad, disiplin dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan sistem pendidikan multikultural pada generasi muda.

Pendidikan multikultural tepat untuk membangun nasionalisme Ke-Indonesia-an dalam menghadapi tantangan global, karena memiliki nilai inti (*core value*) dalam perspektif lokal maupun global yakni: 1) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2) tanggung jawab terhadap negara kesatuan; 3) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya; 4) menjunjung tinggi supremasi hukum; dan 5) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal.

Generasi muda merupakan sebuah istilah yang mengungkapkan harapan, semangat, dan mimpi. Generasi muda adalah penerus bangsa,

yakni mereka lah orang-orang yang akan menjadi penentu cita-cita dan nasib bangsa. Generasi ini merupakan generasi yang disiapkan untuk mencapai visi dan misi bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, generasi muda harus memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena sebagai wujud pengabdian dan kecintaan terhadap bangsa itu sendiri. Dengan demikian, generasi muda dapat menjaga keutuhan bangsa, persatuan bangsa, dan dapat meningkatkan martabat serta citra positif bangsa dihadapan negara-negara di dunia.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusunlah buku pendidikan multikultural sebagai sarana bagi pendidik generasi muda terutama jenjang SMP-SMA sederajat untuk belajar bagaimana menumbuhkan nasionalisme. Semoga kehadiran buku ini mampu memberikan solusi bagi menurunnya Nasionalisme generasi muda. Penulis berharap saran dan masukan terhdap isi buku ini mengingat konten yang disusun adalah berbasis pendidikan multikultural demi kesempurnaan di masa yang akan datang. AMIN...!

Surabaya, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Heterogenitas Masyarakat Indonesia.....	1
B. Antara Multikultur dan Nasionalisme	12
C. Urgensi Pendidikan Multikultur	23
D. Generasi Muda dan Tantangan Masa Depan	35
E. Pentingnya Membangun Nasionalisme Generasi Muda	39
BAB 2 Masyarakat Multikultural	45
A. Pengertian Masyarakat Multikultural.....	45
B. Latar Belakang Terbentuknya Masyarakat Multikulturalisme	48
C. Ciri-ciri Masyarakat Multikultural	53
D. Klasifikasi Bentuk Masyarakat multikultural	54
E. Tantangan Masyarakat Multikultural.....	56
BAB 3 Multikultural di Indonesia	63
A. Keragaman Etnis di Indonesia	63
B. Keragaman Agama Di Indonesia.....	84
C. Keragaman Ras Di Indonesia	87
D. Dampak Masyarakat Multikultural Di Indonesia.....	87
E. Pentingnya Memperkuat Toleransi di Indonesia	92
BAB 4 Pendidikan Multikultural	102
A. Kajian tentang Pendidikan Multikultural	102
B. Model Pembelajaran Berbasis Pendidikan Multikultural	106
C. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural di Indonesia	110

D. Paradigma Baru Pendidikan Multikultural	112
BAB 5 Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural.....	115
A. Dimensi Pendidikan Multikultural	115
B. Tujuan Pendidikan Multikultural.....	117
C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural.....	121
D. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikultural	124
E. Penanaman Nilai Multikultural.....	125
BAB 6 Pendidikan Multikultural di Sekolah	130
A. Sejarah Pendidikan Multikultural	130
B. Peranan Sekolah dalam Peranan Pendidikan Multikultural.....	136
C. Pendidikan Multikultural Untuk Pendidikan Dasar	138
D. Pendidikan Multikultural Untuk Pendidikan Menengah	141
BAB 7 Pendidikan Multikultural untuk Membangun Jiwa Nasionalisme	151
A. Nilai Inti Pendidikan Multikultural Membangun Nasionalisme	151
B. Strategi Membangun Nasionalisme melalui Pendidikan Multikultural	152
C. Menumbuhkan kembali Nasionalisme melalui Nilai- Nilai Budaya	156
DAFTAR PUSTAKA	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pakaian Adat Aceh.....	71
Gambar 3.2	Pakaian Adat Sumatera Utara	72
Gambar 3.3	Pakaian Adat Riau.....	73
Gambar 3.4	Pakaian Adat Sumatera Barat.....	74
Gambar 3.5	Pakaian Adat Kepulauan Riau	75
Gambar 3.6	Pakaian Adat Bangka Belitung.....	76
Gambar 3.7	Pakaian Adat Jambi.....	77
Gambar 3.8	Pakaian Adat Bengkulu.....	78
Gambar 3.9	Pakaian Adat Sumatera Selatan	79
Gambar 3.10	Pakaian Adat Lampung	80
Gambar 3.11	Pakaian Adat Banten	81
Gambar 3.12	Pakaian Adat Jawa Tengah.....	82
Gambar 3.13	Pakaian Adat Jawa Timur	83
Gambar 4.1	Dimensi-Dimensi Pendidikan Multikultural	108

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Heterogenitas Masyarakat Indonesia

1. Masyarakat Indonesia

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu *society* yang berarti *masyarakat*, lalu kata *society* berasal dari bahasa Latin yaitu *societas* yang berarti *kawan*. Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *masyarak*. Pengertian masyarakat terbagi atas dua, yaitu masyarakat dalam arti luas dan masyarakat dalam arti sempit. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya.

Kajian tentang masyarakat juga dikemukakan oleh para ahli. Masyarakat menurut Soerjono merupakan bentuk hasil dari proses terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Menurut Gillin & Gillin bahwa pengertian masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh bersamaan.

Masyarakat menurut definisi Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang di luar itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Masyarakat menurut definisi Harton haunt adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan. Masyarakat menurut Selo Sumardjan adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Lalu, masyarakat menurut definisi Paul B. Harton adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Di sisi lain, menurut Koentjaraningrat yang dikutip oleh Sudikan (2001:6) juga menjelaskan bahwa masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat keberlanjutan dan yang telah terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Selain itu, Talcott Parsons (dalam Garna 1996:57) memandang bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial harus memenuhi empat syarat agar dapat berfungsi, yakni 1) penyesuaian masyarakat dengan lingkungan, 2) anggota masyarakat harus sepakat akan ketentuan untuk memilih, mengetahui, dan memahami tujuan kolektif dengan menyusun struktur tertentu, 3) penentuan anggota masyarakat agar dapat memainkan peranan dan mematuhi nilai-nilai, serta menyelesaikan konflik dalam proses berinteraksi, 4). terjadi integrasi dari keadaan masyarakat, individu dan institusi dikontrol oleh unsur atau bagian tertentu agar sistem sosial dapat terpelihara.

Masyarakat memiliki karakteristik yang membuat kita lebih mudah mengetahui arti dari masyarakat. Beberapa karakteristik dari masyarakat, yakni memiliki wilayah tertentu, dengan secara kolektif menghadapi atau menghindari musuh, mempunyai cara dalam berkomunikasi, timbulnya diskriminasi warga

masyarakat dan bukan warga masyarakat tersebut, serta setiap dari anggota masyarakat dapat bereproduksi dan beraktivitas. Selanjutnya, ditinjau dari unsur-unsur masyarakat maka harus ada perkumpulan manusia, telah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu, adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan bersama.

Bila dipandang cara terbentuknya masyarakat, maka suatu masyarakat dapat diklasifikasikan dalam beberapa segi, yakni;

- a. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti: gerombolan (*harde*), suku (*stam*), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.
- b. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan kedunian atau kepercayaan.

Masyarakat dipandang dari sudut Antropologi terdapat dua tipe masyarakat:

- a. Masyarakat kecil, yakni masyarakat yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan tehknologinya sederhana.
- b. Masyarakat sudah kompleks, yakni masyarakat yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang barmasyarakat, kerena pengetahuan modern sudah maju, teknologi pun sudah berkembang dan sudah mengenal tulisan.

Menurut Raymond Firth ada empat faktor penting yang dapat menunjukkan eksistensi dan fungsi sosial dari suatu masyarakat, yaitu:

a. *Sosial Alignment*

Sosial Aligment merupakan sistem pengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, kekerabatan, bentuk-bentuk perkumpulan berdasarkan pekerjaan yang sama, perkumpulan rekreasi, kedudukan, atau status peranan.

b. *Sosial Controls*

Sosial Controls merupakan sistem dan proses yang mengatur kegiatan dan tingkah laku para anggota masyarakat. Sistem inilah yang biasanya disebut dengan sistem pengendalian sosial yang berfungsi untuk mengendalikan anggota-anggota masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya.

c. *Sosial Media*

Sosial Media adalah peralatan dan perlengkapan, baik yang berupa benda, maupun bahasa yang dijadikan media oleh oleh anggota masyarakat didalam melangsungkan komunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya.

d. *Sosial Standards*

Sosial Standards merupakan ukuran-ukuran sosial yang digunakan untuk menentukan dan menilai seluruh kegiatan atau untuk menilai efektif tidaknya suatu kegiatan.

Muthahhari (1998:17) menelusuri bahwa suatu individu bersifat kemasyarakatan atau tidak dapat ditinjau melalui tiga pandangan, yakni 1) manusia bersifat kemasyarakatan, 2) manusia terpaksa bermasyarakat, 3) manusia bermasyarakat berdasarkan pilihannya sendiri. Dari ketiga sifat tersebut dapat disimpulkan berdasarkan pandangan pertama, bahwa faktor utama pembentuk kehidupan masyarakat adalah fitrah manusia itu sendiri. Pandangan kedua, faktor utama pembentuk kehidupan bermasyarakat adalah dari luar. Pandangan ketiga, faktor utama pembentuk kehidupan bermasyarakat adalah kemampuan akal dan kemampuan memperhitungkan yang dimiliki manusia. Di sisi lain, Veeger (1993:86-87) justru menyebutkan hanya ada dua pandangan, yaitu pandangan organisme dan mekanisme.

Pandangan organisme melihat bahwa masyarakat sebagai kesatuan hidup yang menempati kedudukan bawahan dan fungsional bagaikan organ-organ badan, sedangkan pandangan

mekanisme melihat bahwa masyarakat sebagai himpunan individu-individu yang berdiri sendiri dan hanya atas cara lahiriah berinteraksi satu dengan yang lainnya. Di samping itu, Kusumahamidjojo (2000:30) juga mengemukakan pendapatnya bahwa setidaknya ada empat komponen yang dapat dimasukkan dalam kajian pengertian masyarakat Indonesia. Pertama, kelompok masyarakat yang berproses dalam yuridiksi negara Republik Indonesia. Kedua, tidak semua suku menghuni kepulauan di Indonesia. Ketiga, mereka yang menjadi penghuni di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu yang lama dan menjalankan kehidupannya berdasarkan organisatoris di Indonesia, baik sebagai WNI maupun WNA. Keempat, warga negara Indonesia yang menghuni negara lain dalam jangka waktu yang pendek.

2. Struktur Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang bersifat majemuk. Hal itu dengan mudah dapat diketahui dalam semboyan negara Republik Indonesia, yakni *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu secara umum mengandung makna bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa tetapi tetap merupakan satu kesatuan Republik Indonesia. Di balik semboyan itu sebenarnya terdapat suatu pesan bahwa masyarakat Indonesia menghadapi masalah persatuan dan kesatuan di dalamnya. Di dalamnya terdapat beraneka ragam perbedaan suku bangsa, agama, ras, golongan, dan etnis. Perbedaan itu seringkali berpengaruh pada sistem kepercayaan, sistem nilai pandangan hidup, dan perilaku sosial seseorang sehingga cenderung menimbulkan konflik atau perpecahan sosial di dalamnya.

Dilihat dari kompleksnya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, Nasikun (1993:28) berpendapat bahwa

struktur masyarakat Indonesia ditandai adanya dua ciri, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal dapat dimaknai, bahwa suatu perbedaan tidak diukur berdasarkan kualitas dari unsur keberagaman tersebut, misalnya perbedaan bahasa daerah dari salah satu suku di Indonesia tidak diartikan sebagai bahasa yang paling baik daripada bahasa daerah dari suku lainnya. Sedangkan dari segi vertikal, perbedaan dapat diukur berdasarkan kualitasnya, misalnya dalam aspek ekonomi yang nantinya akan melahirkan sebuah tingkatan sosial masyarakat dengan ekonomi yang tinggi, menengah, ataupun rendah.

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, dan juga tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok suku, agama, dan ras yang beraneka ragam merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti itu disebut masyarakat majemuk. Konsep masyarakat majemuk ini sangat penting untuk memahami karakter dan dinamika masyarakat Indonesia.

Istilah masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh J.S Furnivall (1967) untuk menggambarkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam ras dan etnik sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Di dalam masyarakat majemuk terdapat perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, kasta, agama, kedaerahan tradisi budaya, dan adat istiadat. Perbedaan-perbedaan itu mempengaruhi kestabilan masyarakat sebagai suatu negara berbangsa. J.S Furnivall pada saat itu berpendapat kemajemukan masyarakat Indonesia itu dengan adanya komunitas orang kulit putih Belanda, kulit putih keturunan India, dan pribumi. Jadi, yang berbeda-beda bukan hanya soal

warna kulit, tetapi juga suku bangsa, agama, dan budayanya sehingga sulit terintegrasi dalam satu kesatuan sosial.

Masyarakat dikatakan majemuk apabila memiliki sub-kebudayaan yang berbeda. Berghe (dalam Garna, 1996:165) membedakan masyarakat majemuk sosial dengan masyarakat budaya. Kemajemukan sosial terwujud dalam kelompok kerja atas dasar lainnya. Kemajemukan budaya, yaitu masyarakat majemuk yang timbul atas terwujudnya kelompok etnik. Berghe juga memaparkan ciri-ciri dari masyarakat majemuk, yaitu 1) ketiadaan konsensus nilai-nilai, 2) beranekaragam kebudayaan, 3) terjadi konflik di antara kelompok yang berlainan, 4) otonomi atau kebebasan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial, 5). diperlukan paksaan dan saling ketergantungan dalam ekonomi sebagai dasar integrasi sosial, 6) terjadi dominasi politik oleh golongan-golongan tertentu, 7) relasi antar kelompok lebih merupakan *secondary segmental* dan *utilitarian*, sedangkan relasi dalam kelompoknya lebih merupakan *primary*.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural karena terbagi menurut kebudayaan, suku bangsa, etnik, ras, agama, dan lain-lain. Namun demikian, Furnivall menggolongkan masyarakat Indonesia ke dalam tiga kategori, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Para akademisi memberikan kritik terhadap konsep-konsep masyarakat majemuk. Pertama, masyarakat mengabaikan persatuan dasar yang berbentuk dalam masyarakat. Kedua, masyarakat majemuk melakukan analisis sistem sosial berdasarkan kebudayaan yang dianggap membuat kekeliruan. Ketiga, mengabaikan kenyataan sosial karena teori masyarakat majemuk tidak mempedulikan ikatan yang terbentuk di dalam masyarakat dengan kelompok lainnya. Keempat, apabila memberi perhatian di setiap kelompok, maka perhatian tersebut tidak dilihat sebagai perpecahan. Kelima, masyarakat majemuk sebenarnya bukan masyarakat yang unik

karena tidak berbeda dengan masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial kompleks.

3. Kemajemukan Etnik di Indonesia

Keanekaragaman kultural dan kelompok sosial di dalam masyarakat majemuk pada umumnya bersumber dari adanya perbedaan dalam dua hal, yaitu ras dan etnisitas. Perbedaan ras dan etnisitas merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk pluralitas sosial budaya masyarakat majemuk. Karena itu, masyarakat majemuk sering pula disebut masyarakat multiras atau multietnik. Dengan demikian, elemen-elemen penting yang paling besar pengaruhnya pada dinamika masyarakat majemuk adalah perbedaan ras dan etnisitas.

a. Perbedaan Ras

Menurut Robertson (1977) ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri warna kulit dan fisik tubuh tertentu yang diturunkan secara turun-temurun. Mereka itu berbeda-beda secara fisik karena merupakan hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan hidup khusus mereka. Namun, di dalam pengertian ras ini yang penting bukan bagaimana sifat fisik tubuh tertentu yang diperoleh secara turun-temurun, tetapi bagaimana orang mengartikan dan memberi pandangan terhadap karakteristik kelompok ras tertentu. Selama ini diakui maka paling tidak terdapat tiga macam ras besar di dunia ini, yaitu ras Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid.

Ras Kaukasoid ditandai oleh kulit putih dengan rambut yang lurus atau bergelombang. Lalu, ras Mongoloid ditandai oleh kulit kuning dan coklat dengan mata yang sipit. Selanjutnya ras Negroid ditandai oleh kulit hitam dengan rambut yang keriting. Selain itu, terdapat berbagai macam ras yang memiliki ciri-ciri sangat beragam. Mereka yang termasuk jenis ras Kaukasoid, misalnya ras Anglo Saxon. Ras Anglo Saxon merupakan ras kulit

putih Eropa, terutama yang tinggal di Inggris, Irlandia, dan Amerika Serikat. Mereka secara tegas membedakan dirinya dengan ras Negroid yang berkulit hitam keturunan Afrika. Di benua Asia kita temukan banyak ras Mongoloid, termasuk pula ras orang kulit cokelat di Indonesia. Di sisi lain, ras Negroid banyak kita temukan di benua Afrika.

Pembedaan masyarakat menurut ras ini penting sebagai pengetahuan untuk memahami karakter masyarakat majemuk berkaitan dengan masalah prasangka dan diskriminasi rasial. Prasangka rasial adalah sikap berprasangka pada kelompok lain yang didasarkan pada pandangan khusus yang diberikan masyarakat kepada sekelompok warna kulit tertentu, tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya. Sebelum memiliki prasangka kelompok pada umumnya terlebih dulu orang memiliki apa yang disebut stereotip terhadap kelompok tersebut. Stereotipe adalah pikiran berprasangka yang didasarkan pada kesan umum yang dipercaya tentang sifat-sifat dan karakter suatu kelompok ras tertentu.

b. Perbedaan Etnisitas (Etnis)

Jika ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik tubuh, maka etnisitas lebih menunjuk pada karakteristik budaya suatu kelompok tertentu. Karakteristik budaya ini dibentuk dan dihasilkan oleh perbedaan bahasa, agama, suku bangsa, kedaerahan, dan tempat lahir. Menurut Robertson (1977) kelompok etnik adalah sejumlah besar orang yang memandang diri dan dipandang oleh kelompok lain, memiliki kesatuan budaya yang berbeda. Hal itu terjadi akibat dari sifat-sifat budaya bersama dan interaksi timbal balik yang terus menerus. Dalam pengertian etnisitas ini yang penting adalah anggota kelompok etnis tersebut memiliki perasaan dan identitas yang sama berdasar asal usul, bahasa, agama, tradisi, dan pengalaman hidup. Mereka membedakan dirinya dengan

kelompok lain berdasarkan ciri-ciri budaya khas yang mereka miliki.

Banyak kelompok suku di Indonesia dipandang berbeda satu sama lain secara ras dan etnis, misalnya antara orang Jawa dengan orang Papua dan orang Maluku. Mereka dibedakan secara ganda, atas dasar ras dan etnis. Akan tetapi ada juga kelompok yang dibedakan hanya atas dasar etnis saja, misalnya antara orang Batak dengan orang Bali, serta orang Jawa. Mereka dibedakan atas dasar bahasa, sub-kebudayaan, dan agama yang mereka anut. Pada umumnya, orang secara sepintas memandang mereka memiliki tradisi, pandangan hidup, dan sub-budaya yang berbeda satu sama lain.

Pemahaman konsep etnisitas penting untuk menjelaskan dinamika masyarakat majemuk melalui sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme adalah sikap orang yang menggunakan pandangan dan cara hidup dari sudut pandang sebagai tolok ukur untuk menilai kelompok lain. Suatu kelompok orang cenderung memandang nilai dan cara hidup kelompoknya adalah yang paling baik. Mereka cenderung memandang kelompok lain kurang baik dan tidak bernilai. Gejala tersebut merupakan gejala sosiologis yang umum. Secara sosiologis, sikap etnosentrisme dapat mempererat solidaritas kelompok etnik tertentu. Namun demikian, di lain pihak sikap ini dapat menimbulkan keresahan sosial di pihak kelompok lain. Sikap etnosentrisme ini seringkali menimbulkan perilaku tidak adil dalam memperlakukan kelompok lain, terutama kelompok minoritas. Biasanya sikap etnosentrisme cenderung menimbulkan keresahan dan konflik di dalam masyarakat. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah perilaku pembunuhan dan peperangan antar etnis di Yugoslavia, yaitu antara suku bangsa Bosnia dan Serbia. Mereka berperang untuk mempertahankan etnis dan identitas masing-masing.

Perbedaan anggota masyarakat atas dasar ras dan etnisitas dapat pengaruhnya terhadap dinamika masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan, unsur ras dan etnis merupakan persoalan yang sangat penting untuk mempelajari sistem sosial masyarakat Indonesia. Prasangka dan diskriminasi rasial yang cenderung berkembang di masyarakat majemuk dapat mengancam integrasi nasional dalam masyarakat majemuk. Demikian pula kecenderungan berkembangnya sikap etnosentrisme seringkali mengganggu kestabilan masyarakat majemuk. Konsep masyarakat majemuk ini merupakan pengetahuan penting untuk mempelajari masyarakat Indonesia, karena hal itu cocok dengan kenyataan sosial masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya keanekaragaman budaya yang bersumber dari perbedaan suku bangsa, ras, dan agama yang sangat beragam. Dari sekitar 5000 jumlah etnik yang ada di dunia, maka seperlimanya ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beranekaragam etnik. Para ahli ilmu sosial menjelaskan bahwa etnik adalah sebagai kelompok penduduk yang memiliki kesamaan sifat-sifat kebudayaan, seperti adat-istiadat, bahasa, perilaku, dan budaya. Sering pula disamakan konsep etnik dengan konsep suku bangsa karena dalam penggunaannya keduanya memiliki konsep yang pada dasarnya sama.

Permasalahan yang akan muncul terkait dengan interaksi antara suku bangsa dengan bangsa atau negara menyangkut dominasi kekuasaan negara terhadap suku bangsa. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah munculnya perlawanan akibat dikuasainya suku-suku bangsa oleh negara kemudian adanya perlawanan dari suku-suku bangsa yang dikuasai secara politik maupun militer. Loyalitas etnik terhadap negara bukan sesuatu yang mudah. Pada umumnya, anggota etnik atau suku bangsa akan lebih loyal terhadap etnik atau suku bangsanya sendiri

ketimbang terhadap kelompok politik besar, yaitu negara. Munculnya konflik yang terjadi dalam hubungan antaretnik sudah disadari oleh para pemimpin negara-negara multietnik. Integrasi di dalam masyarakat multietnik dapat terwujud dengan memperkuat pengembangan kebudayaan nasional yang bersumber pada budaya lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

B. Antara Multikultur dan Nasionalisme

1. Hakikat dan Dimensi Identitas Nasional

Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Kekhasan yang melekat pada sebuah bangsa banyak dikaitkan dengan sebutan *Identitas Nasional*. Proses pembentukan identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Sifat identitas nasional yang relatif dan kontekstual mengharuskan setiap bangsa untuk selalu kritis terhadap identitas nasionalnya serta selalu menyegarkan pemahaman dan pemaknaan terhadap jati dirinya.

Identitas Nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, atau negara. Kata identitas sendiri berasal dari "*identity*" yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata "*nasional*" merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Koenta Wibisono juga menuturkan

pengertian identitas nasional sebagai manifestasi akan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khusus sehingga bangsa tersebut berbeda dengan bangsa lainnya.

Dari pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan, seperti Indonesia. Di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut para ahli secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, di antaranya:

- a. Pola perilaku, yakni gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya, dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan sebagainya.
- b. Lambang-lambang, yakni sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi Negara.
- c. Alat-alat perlengkapan, yakni sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi.
- d. Tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap.

2. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional merupakan konsep abstrak. Untuk memahami secara lebih kongrit, maka kita perlu menurunkan ke dalam pengertian yang menjelaskan unsur-unsurnya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia adalah sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa.

a. Sejarah

Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. Semangat juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah telah menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kemudian menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasionalnya.

b. Kebudayaan

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama.

c. Suku Bangsa

Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur lain pembentuk identitasnya yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaan ribuan suku, bahasa, dan budaya.

d. Agama

Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Mensyukuri nikmat kemajemukan dapat dilakukan dengan sikap dan tindakan untuk tidak memaksakan keyakinan dan tradisi satu golongan atas kelompok lainnya.

e. Bahasa

Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai bahasa penghubung (*lingua franca*). Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 telah menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Unsur-unsur identitas tersebut melandasi lahirnya faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Perlu diketahui bahwa identitas nasional tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk. Pembentukannya tidak terjadi natural namun merupakan produk kesepakatan. Beberapa faktor pembentuk identitas nasional yang bisa disebutkan antara lain:

- a. Primordialisme, yaitu sikap kecintaan pada identitas berdasarkan golongan, kesamaan etnis, atau suku. Biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya.
- b. Praktik keagamaan, yaitu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan secara kolektif. Unsur keimanan berkontribusi penting pada motivasi untuk berpartisipasi pada ritual yang dijalani secara kolektif berdasar sistem keyakinan yang sama.
- c. Pemimpin bangsa, yaitu figur atau tokoh kharismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayan masyarakatnya. Rakyat merasa dilindungi dan bangga pada pemimpinnya yang dianggap bagian dari dirinya.
- d. Sejarah bangsa, yaitu narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Kesamaan asal-usul atau nenek moyang juga bagian dari sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif.
- e. Solidaritas organik, yaitu integrasi sosial yang terbentuk atas kondisi saling ketergantungan akibat pembagian kerja. Solidaritas organik muncul seiring munculnya spesialisasi yang merupakan produk industrialisasi. Identitas yang dibentuk oleh solidaritas organik adalah identitas modern, profesional, dan urban.

Sejauh hal tersebut maka dapat dijelaskan indikator negara yang punya identitas nasional. Berikut ini adalah ciri-ciri atau indikator negara yang punya identitas nasional, yakni:

- a. Adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Adanya lambang-lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi didirikannya negara.
- c. Adanya alat kelengkapan yang dimiliki negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya, seperti tempat ibadah, infrastruktur, teknologi komunikasi, dan sebagainya.
- d. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu bangsa yang tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya.

Melihat keempat indikator tersebut, kita bisa meyakini bahwa bangsa Indonesia jelas telah memiliki identitas nasional. Bahkan boleh dibilang, identitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara-bangsa tak terhitung jumlahnya. Contoh sederhana identitas nasional bangsa Indonesia, yakni: 1) Bung Karno, yakni merupakan tokoh, figur, sang proklamator, serta tokoh sentral berdirinya negara Indonesia, 2) Batik, yakni produk budaya berupa corak lilin pada sehelai kain yang mengandung filosofi, bernilai seni dan ekonomi, 3) Borobudur, yakni salah satu tempat ibadah umat Budha, candi Budha terbesar di dunia, 4) Rendang, yakni salah satu makanan khas Minang yang telah mendunia, 5) Pancasila, yakni ideologi resmi negara yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, Keadilan.

3. Globalisasi dan Ketahanan Identitas Nasional

Secara umum globalisasi adalah sebuah gambaran tentang semakin ketergantungan diantara sesama masyarakat dunia baik budaya maupun ekonomi. Globalisasi adalah fenomena dunia yang

berwajah banyak. Globalisasi sering diidentikkan dengan bermacam istilah asing, diantaranya:

- a. Internasionalisasi, yaitu hubungan antar negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal
- b. Liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa batas dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar-masuk mata uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara
- c. Universalisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, kendaraan, diseluruh pelosok penjuru dunia
- d. Westernisasi, yaitu ragam hidup model budaya barat
- e. De-teritorialisasi, yaitu perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat, dan jarak menjadi berubah.

Dalam perspektif definisi, maka beberapa pengertian terkait dengan globalisasi juga dapat dikaji sebagai berikut:

- a. Globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial temporal kehidupan. Hidup yang kita alami mengandaikan ruang dan waktu. Namun, fakta ini juga berarti jika terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang-waktu, terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup.
- b. Globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Dengan kata lain globalisasi menyangkut transformasi cara memandang, berpikir, merasa, dan mendekati persoalan.
- c. Globalisasi sebagai transformasi modus tindakan dan praktik. Pada bagian ini, globalisasi menunjuk pada proses kaitan yang makin erat semua aspek kehidupan pada skala mondial.

Globalisasi mempunyai beberapa ciri, diantaranya:

a. Perubahan dalam konsep jarak ruang dan waktu

Dengan dukungan teknologi berupa televisi, *smartphone* dan internet maka komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi-informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau hari saja.

b. Adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga dominasi organisasi semacam WTO atau *World Trade Organization* yang menaungi perdagangan dunia dan lain sebagainya.

c. Adanya peningkatan interaksi kultural

Melalui televisi dan media lainnya manusia dapat mendapat pengetahuan baru dan lebih mengenal keanekaragaman yang ada di dunia luar

d. Meningkatnya masalah bersama

Di era globalisasi, masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama atau dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan perang yang terjadi di suatu negara.

Globalisasi memiliki pengaruh tersendiri dalam berbagai sektor di dalam masyarakat. Pengaruh globalisasi tersebut dapat berupa positif dan juga negatif.

a. Dampak Positif Globalisasi

- Kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
- Kehidupan sosial ekonomi yang meningkat

- Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi dan informasi yang memudahkan manusia.

b. Dampak Negatif Globalisasi

- Mudahnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal.
- Lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong-royong dan lain sebagainya.
- Rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara
- Maraknya penyelundupan barang-barang ilegal maupun terlarang

Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi, antara lain pertumbuhan perkapitalisme, maraknya inovasi teknologi komunikasi dan informasi, serta diciptakannya regulasi yang meningkatkan persaingan dalam skala besar dan luas seperti hak cipta, standarisasi teknis dan prosedural dalam produk dan sistem produksi serta penghapusan hambatan perdagangan. Berkembangnya arus globalisasi dunia tentunya akan memberikan pengaruh positif dan negatif bagi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung.

Peluang dan tantangan bangsa Indonesia dalam era globalisasi dapat dijumpai dalam beberapa hal yang meliputi bidang politik, bidang ekonomi, dan sosial-budaya.

a. Bidang politik

- Demokrasi menjadi sistem politik di Indonesia yang berintikan kebebasan mengemukakan pendapat.
- Politik luar negeri yang bebas aktif.

- Melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip partisipasi, transparansi, *rule of law*, *responsive*, efektif, dan efisien.
- b. Bidang ekonomi
- Menjadi kestabilan ekonomi makro dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bunga.
 - Menyediakan lembaga-lembaga ekonomi yang modern (perbankan dan pasar modal).
 - Mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional.
- c. Bidang sosial-budaya
- Meningkatkan sumber daya manusia, yaitu kompetensi dan komitmen melalui demokratisasi pendidikan.
 - Penguasaan ilmu dan teknologi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat.
 - Menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa.

4. Nasionalisme dan Multikulturalisme

Nasionalisme dapat diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu (Nur dalam Yatim, 1994:684). Namun, istilah ini sekarang biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kultur, bahasa, dan keturunan di luar konteks politik. Di Indonesia sendiri nasionalisme itu melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik, dalam artian yang tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan segala keanekaragaman itu tetap diakui.

Negara yang memiliki keunikan multikultural dan multietnis seperti Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri, di satu

sisi tentu hal ini akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai multikultural *nation-state*, tetapi di sisi lain hal ini juga merupakan suatu ancaman. Dengan demikian, bukan hal yang berlebihan jika ada ungkapan bahwa kondisi multikultural diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut sewaktu-waktu. Kondisi ini, merupakan suatu kewajiban yang harus disikapi dengan toleransi. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dan harus di sikapi yang penuh toleransi. Terlebih di era globalisasi dewasa ini, maka dibutuhkan suatu solusi praktis.

Seperti diketahui bahwa satu diantara isu penting yang bersifat global adalah munculnya ide dan praktik multikulturalisme, yaitu suatu gagasan kesediaan untuk hidup berdampingan dengan orang atau kelompok lain yang berbeda secara damai. Menurut Gurpreet Mahajan, konsep multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Sekitar 1950-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu, maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat

multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Di sisi lain, terdapat lima hal penting dalam melihat hubungan antara Pancasila dan pandangan multikulturalisme di Indonesia.

- a. Multikulturalisme adalah pandangan kebudayaan yang berorientasi praktis, yakni yang menekankan perwujudan ide menjadi tindakan. Dengan kata lain, multikulturalisme dapat juga disebut sebagai penerjemahan Pancasila ke dalam konteks yang lebih konkret dan praktis.
- b. Multikulturalisme harus menjadi strategi budaya masa depan Indonesia, yang dicanangkan dalam program pendidikan sebagai langkah awalnya.
- c. Menjadikan multikulturalisme sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dengan menjadikan unsur kebudayaan tidak sebatas

- sebagai hal yang bersifat praktikular. Kebudayaan dipandang sebagai suatu faktor penting bahwa utama dalam membangun karakter bangsa, karena proses integrasi bangsa bertumpu pada masalah-masalah kebudayaan.
- d. Kalau multikulturalisme didefinisikan sebagai sejumlah kebudayaan yang hidup berdampingan, dan seyogianya mengembangkan cara pandang yang mengakui dan menghargai keberadaan kebudayaan satu sama lain, maka secara empiris dapat dipertanyakan apakah kriteria saling menghargai itu ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
 - e. Perubahan dari cara berpikir pluralisme ke multikulturalisme dalam emandang Pancasila adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Diperlukan dua persyaratan: 1) Kita harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai model multikulturalisme yang sesuai kondisi Indonesia; 2) Kebijakan itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung.

C. Urgensi Pendidikan Multikultur

1. Keragaman Budaya dan Permasalahannya.

Secara umum masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya yang berbeda. Agar tercipta sikap kesetaraan, maka perlu pengakuan adanya suatu pluralisme. Hal ini penting agar tercipta perdamaian dan keadilan sosial dalam masyarakat di berbagai belahan dunia. Sebagaimana dilihat dari berbagai media bahwa konflik dan perpecahan antar golongan merupakan masalah klasik yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Bumi yang didiami kini telah terbagi menjadi 192 negara dimana lebih dari 6 milyar manusia hidup didalamnya, ternyata penuh dengan konflik. Konflik antar manusia, antar golongan, antar etnis dan antar negara.

Steven D. Strauss dalam bukunya yang berjudul *World Conflicts* (Penguin Books, 2006) menyatakan bahwa dalam setengah abad terakhir, tidak ada dari 192 negara di dunia ini yang tidak pernah terlibat konflik. Setiap negara pernah mengalami konflik baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan ada juga negara yang sampai sekarang masih berlangsung konflik. Pada saat ini, paling tidak telah terjadi 35 pertikaian besar antar etnis di dunia. Lebih dari 38 juta jiwa terusir dari tempat yang mereka diami, paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam konflik etnis berdarah. Dunia menyaksikan konflik yang terjadi di Yugoslavia, Cekoslakia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, Srilangka, India hingga Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia yang memiliki ratusan suku bangsa. Sebagian di antaranya menjadi penduduk terbesar yang mendiami wilayah lebih dari satu provinsi, seperti etnik Jawa, namun ada juga etnik yang hanya mendiami beberapa desa atau kecamatan saja. Mereka memiliki simbol-simbol dan menganut agama atau kepercayaan yang berbeda-beda pula. Dalam undang-undang PNPS No. 1 Tahun 1965 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1969, agama-agama yang dianut di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Pasal 1, Penjelasan). Keberagaman tersebut berpotensi akan terjadinya konflik yang sering dikenal dengan SARA (Darmaningtyas, 2004). Dari banyak studi, terjadinya konflik yang benuansa SARA pada beberapa daerah di Indonesia, antara lain disebabkan oleh lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Konflik akan muncul apabila tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat. Terjadinya konflik etnis tersebut juga sesungguhnya merupakan salah satu dampak dari minimnya pemahaman komunitas imajiner kelompok masing-masing etnis terhadap kultur subjektif masyarakat adat yang berbeda-beda. Sehingga, etnis yang hidup dalam wilayah teritorial

yang sama tersebut menjadi terisolasi dan merasa berbeda yang ingin terus menjaga perbedaan dari yang lain.

Berpijak dari hal tersebut maka perlu upaya penyadaran kepada masyarakat, terutama anak-anak di daerah konflik ini bahwa mereka hidup di antara berbagai macam budaya yang berbeda dalam satu wadah Negara Republik Indonesia. Bisa dikatakan modus kebersamaan inilah yang tidak akan mereka dapatkan dari orang tua mereka karena orang tua mereka selalu dalam situasi konflik. Menurut Ainul Yaqin (2007) faktor penting keterpurukan jalinan yang harmonis dalam bingkai keberagaman adalah tidak diterapkan pendidikan berbasis multikulturalisme sejak awal. Bangsa ini sudah lama mengalami berbagai konflik sosial akibat keberagamannya, namun upaya menggalakkan pendidikan berbasis multikulturalisme masih jauh dari harapan.

Padahal bisa dikatakan pendidikan multikultural adalah salah satu agenda penting yang harus diperhatikan lebih serius. Ketika pemahaman masyarakat akan kultur yang berbeda-beda sangat minim, maka sudah sepantasnya pendidikan multikultur yang mampu mengenalkan setiap kultur yang ada dalam masyarakat diterapkan sehingga dapat mencegah timbulnya konflik dan perpecahan khususnya yang disebabkan oleh SARA. Pendeknya pendidikan multikultural adalah satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat secara kreatif dan produktif, seperti keragaman etnis, budaya bahasa, agama, status sosial, dan gender.

2. Multikulturalisme sebagai Ideologi Kesetaraan Budaya

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering

digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata; *multi* (banyak/beragam) dan *cultural* (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Konsep tentang multikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan tidak bebas nilai, tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Muncul konsep multikulturalisme yang dikaitkan dengan agama, yakni multikulturalisme religius yang menekankan tidak terpisahnya agama dari negara, tidak mentolerir adanya paham, budaya, dan orang-orang yang atheis. Dalam konteks ini, multikulturalisme dipandang sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional. Lebih jauh, Pasurdi Suparlan memberikan penekanan, bahwa multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kebudayaan. Yang menarik disini adalah penggunaan kata ideologi sebagai penggambaran bahwa betapa mendesaknya kehidupan yang menghormati perbedaan, dan memandang setiap keberagaman sebagai suatu kewajaran serta sederajat.

Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya manusia. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya

multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Selanjutnya Banks (1993) menyebutkan bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip "*Bhinneka Tunggal Ika*" seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh

bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-bangsa sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif. Istilah monokultural juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru.

Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris (*English-speaking countries*), yang dimulai di Kanada pada tahun 1971. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Belanda dan Denmark, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan monokulturalisme. Perubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dan Jerman, dan beberapa negara lainnya. Samuel P. Huntington dalam Kuper (2000) meramalkan bahwa sebenarnya konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Konflik tersebut menjadi gejala terkuat yang menandai runtuhnya polarisasi ideologi dunia kedalam komunisme dan kapitalisme.

Bersamaan dengan runtuhnya struktur politik negara-negara Eropa Timur. Ramalan ini sebenarnya telah didukung oleh

peristiwa sejarah yang terjadi pada era 1980-an, yaitu terjadinya perang etnik di kawasan Balkan, Yugoslavia pasca pemerintahan Josep Broz Tito. Unsur keragaman yang disatu sisi merupakan kekayaan dan kekuatan, berbalik menjadi sumber perpecahan ketika leadership yang mengikatnya lengser. Ramalan Huntuington tersebut diperkuat dengan alasannya mengapa di masa mendatang akan terjadi benturan antar peradaban, antara lain adalah: *Pertama*, perbedaan antara peradaban tidak hanya riil, tetapi juga mendasar; *Kedua*, dunia sekarang semakin menyempiti interaksi antara orang yang berbeda peradaban. *Ketiga*, proses modernisasi ekonomi dan sosial dunia membuat orang atau masyarakat tercerabut dari identitas lokal mereka yang sudah berakar, di samping memperlemah negara-negara sebagai sumber identitas mereka. *Keempat*, timbulnya kesadaran peradaban dimungkinkan karena peran ganda Barat. Disatu sisi barat berada di puncak kekuatan, di sisi lain mulai terjadi kembalinya fenomena asal sedang berlangsung diantara peradaban-peradaban Non-Barat. *Kelima*, karakteristik dan perbedaan budaya kurang bisa menyatu dan karena itu kurang bisa berkompromi dibanding karakteristik dan perbedaan politik dan ekonomi. *Keenam* regionalisme ekonomi semakin meningkat. Akan tetapi asumsi tersebut tidak mutlak menjadi sebab utama terjadinya sebuah perpecahan. Misalnya, setelah berakhirnya Perang Dingin, kecenderungan yang terjadi bukanlah pengelompokan masyarakat ke dalam entitas tertinggi, yaitu pengelompokan peradaban, tetapi perpecahan menuju entitas yang lebih kecil lagi, yaitu berdasarkan suku dan etnisitas. Hal ini jelas sekali terlihat pada disintegrasi Uni Soviet yang secara ironis justru disatukan oleh dasar budaya dan peradaban yang sama. Terlebih lagi, persoalan perpecahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur yang kembali bersatu karena persamaan suku dan kebudayaan, dan multikulturalisme justru menjadi sebuah pemersatu yang kokoh.

3. Urgensi Pendidikan Berbasis Multikulturalisme

Paradigma pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, dan budaya. Kita perlu memberi dorongan dan spirit bagi peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian.

Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, pendidikan multikultural perlu disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu titik fokus dari Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Bagaimana membangun pemahaman keberagaman siswa yang inklusif di sekolah? Dalam hal ini guru mempunyai posisi penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman inklusif di sekolah. Adapun peran guru di sini, meliputi; *Pertama*, seorang guru/dosen harus mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif. *Kedua*, guru/dosen seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Misalnya, ketika terjadi bom Bali (2003), maka seorang guru yang berwawasan

multikultural harus mampu menjelaskan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut. *Ketiga*, guru/dosen seharusnya menjelaskan bahwa inti dari ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, maka pemboman, invasi militer, dan segala bentuk kekerasan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. *Keempat*, guru/dosen mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama.

Pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran muncul karena adanya interes politik, sosial, ekonomi dan intelektual. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multikultural.

Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya

meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri diri pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara. Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hampasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut. Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini: *Pertama*, Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif budaya yang ada; *Kedua*, Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran budaya/sejarah; *Ketiga*, Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda; *Keempat*, Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama. Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Menurut Gibson (1997) menyatakan bahwa masa depan bangsa memiliki kriteria khusus yang ditandai oleh hiper kompetisi, suksesi revolusi teknologi serta dislokasi dan konflik sosial, menghasilkan keadaan yang non-linier dan sangat tidak dapat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan masa kini. Masa depan hanya dapat dihadapi dengan kreativitas, meskipun posisi keadaan sekarang memiliki peranan penting untuk memicu kreativitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan keadaan yang non-linier ini tidak akan dapat diantisipasi dengan cara berpikir linier. Pemikiran linier dan rasional yang sekarang kita kembangkan tidak lagi fungsional untuk mengakomodasi perubahan keadaan yang akan terjadi. Keadaan ini mestinya dapat mendorong kita untuk memiliki desain pendidikan masa depan yang memungkinkan peserta didik dan pelaku praksis pendidikan dapat mengaktualisasikan dirinya. Sebagai bangsa dengan beragam kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Akar munculnya konflik dalam masyarakat multikultur disebabkan oleh:

1) adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi, 2) perluasan batas-batas sosial budaya, 3) dan benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama.

Dari paparan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk di implementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Melalui pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya, dan rupanya diakui atau tidak pendidikan multikultural sangat relevan di praktikkan di alam demokrasi seperti saat ini.

Di era globalisasi ini pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu selain menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya tersebut, juga harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya, sebab pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa jadi dapat menjadi ancaman serius bagi anak didik kita. Dalam kaitan ini siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global. Pendidikan multikultural tepat untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya karena pendidikan multikultural dalam kerangka transformatif, menurut Nieto dalam Moeis (2006:5) hal tersebut memiliki ciri-ciri:

- a. Pengetahuan bukan sesuatu yang netral atau apolitis. Segala sesuatu yang terjadi dalam level kelembagaan memberi bekas lepada proses pembentukan penegetahuan siswa. Terhadap ini guru perlu menyadarinya secara utuh.
- b. Siswa dididik melihat fenomena kehidupan dalam kekomplekan serta berbagai perspektif yang tercakup di dalamnya.

- c. Pendidikan multikultural memberi nilai nilai tinggi keragaman, berfikir kritis, reflektif, dan kecakapan tindakan sosial.
- d. Pendidikan multikultural adalah proses pemberdayaan siswa dan juga guru untuk mengambil tindakan-tindakan transformatif berdasarkan pemahaman yang benar tentang hak dan tanggung jawabnya.
- e. Pendidikan multikultural bukan sekedar mengganti satu perspektif tentang kebenaran dengan perspektif lain, tetapi merefleksikan kebenaran itu atas dasar berbagai perspektif yang bahkan saling bertentangan, sehingga dapat memahami realitas secara utuh.
- f. Pendidikan multikultural memungkinkan siswa mengidealkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, tetapi juga mendidik siswa untuk menerima realita nilai tersebut secara kritis.
- g. Pendidikan multikultural dikembangkan berdasarkan sudut pandang dan pengalaman siswa, bukan dari budaya yang sudah mapan.

Pendidikan multikultural menurut Kellner dalam Joebagio (2005:356) dirancang untuk mendukung perkembangan keragaman murni dengan memodifikasi kurikulum bidang studi, baik melalui proses penyusunan, pengembangan, maupun pengayaan, yang kesemuanya itu untuk membantu peserta didik dalam memahami sejarah dan kebudayaan bangsa. Dengan demikian diharapkan melalui pendidikan multikultural peserta didik dapat mengenal kebudayaan di negaranya, terlebih-lebih seperti di Indonesia yang memiliki keragaman budaya.

D. Generasi Muda dan Tantangan Masa Depan

Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi

pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika, para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa karena mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktifitas pendidikan yang terbilang tingkatannya yang paling tinggi. Jika moral mahasiswa buruk maka nama bangsa juga akan ikut tercemar, jika cara berfikir mahasiswa kearah yang positif maka Indonesia akan lebih mudah untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang akan mengucilkan nama Indonesia dibelahan dunia maka mahasiswa harus bisa membawa NKRI kedalam perubahan yang lebih baik.

Perkataan Bung karno "*Beri aku sepuluh pemuda maka akan ku guncangkan dunia*", yang menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai *agent of change, moral force* and *sosial control* sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mempunyai peran yang sangat strategis di setiap peristiwa penting yang terjadi. Ketika memperebutkan kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang kala itu. Pemuda menjadi tulang punggung bagi setiap pergerakan perubahan ketika masa tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Pemuda akan selalu menjadi *people make history* (orang yang membuat sejarah) di setiap waktunya. Pemuda memang mempunyai posisi strategis dan istimewa.

Secara kualitatif, pemuda lebih kreatif, inovatif, memiliki idealisme yang murni dan energi besar dalam perubahan sosial dan secara

kuantitatif. Pemuda akan lebih bersifat kreatif untuk melakukan pergerakan ketika kondisi atau suasana di sekitarnya mengalami kerumitan, terdapat banyak masalah yang di hadapi yang tidak kunjung terselesaikan. Di satu sisi, ketika suasana di sekitarnya terlihat aman dan tentram tidak ada masalah serius yang dihadapi, pemuda akan cenderung diam/pasif, tidak banyak berbuat, lebih apatis dan mempertahankan kenyamanan yang dirasakan. Padahal baik dalam kondisi banyak permasalahan ataupun kondisi tanpa masalah serius, pemuda dituntut lebih banyak bergerak dalam membuat perubahan yang lebih baik, lebih produktif dan lebih kreatif dalam memikirkan ide-ide perubahan untuk bangsa yang lebih baik.

Kondisi pemuda Indonesia saat ini, mengalami degradasi moral, terlena dengan kesenangan dan lupa akan tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Tataran moral, sosial dan akademik, pemuda tidak lagi memberi contoh dan keteladanan baik kepada masyarakat sebagai kaum terpelajar, lebih banyak yang berorientasi pada hedonisme (berhura-hura), tidak banyak pemuda yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini, dalam urusan akademik juga banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka adalah insan akademis yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perubahan menuju kemajuan bangsa.

Peranan sosok pemuda adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila, yang notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di NKRI. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun NKRI yang mandiri dapat mencontoh seperti karakter para pahlawan bangsa Indonesia. Dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia, serta

menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras atau suku bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar bangsa Indonesia.

Kecintaan bangsa pemuda adalah harapan bagi masa depan bangsa. Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia mengharapkan peranan pemuda dapat menjadi karakteristik yang baik bagi Indonesia. Untuk mencapai kondisi yang baik generasi muda Indonesia harus mempunyai jati diri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Masa depan kebangsaan Indonesia sangatlah ditentukan oleh generasi muda terdidik dan terlatih, apalagi mereka adalah generasi yang banyak mendapatkan berbagai pengetahuan teoritik maupun praktis di Perguruan Tinggi tentang tema-tema pembangunan bangsa.

Karena pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sementara itu, catatan sejarah mengingatkkn peran pemuda senantiasa menjadi pilar dan motor untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Dalam situasi yang senantiasa tumbuh dan berkembang di era globalisasi ini, menuntut peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Selain itu, dalam Pembangunan Nasional pemuda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menjaga Pancasila, keutuhan NKRI, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian kesadaran pemuda akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya semakin meningkat. Dimana mahasiswa merupakan generasi kelas menengah yang selalu hadir dalam garda terdepan setiap perubahan penting dan mendasar di NKRI.

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat

Indonesia karena negara ini tidak hanya terdiri atas satu golongan suku, ras, dan agama, tetapi banyak sekali golongan yang ada di tanah air kita tercinta. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi muda kalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Posisi kalian sebagai generasi penerus menuntut perilaku yang mampu mendukung persatuan dan kesatuan. Kalian harus mampu menunjukkan peran yang positif sebagai pemuda yang memiliki tanggung jawab moral untuk kejayaan bangsa pada masa depan.

E. Pentingnya Membangun Nasionalisme Generasi Muda

Di era modern saat ini wawasan kebangsaan sudah mulai luntur karena adanya ancaman, global, regional dan nasional, tiga ancaman tersebut dapat dicegah dengan selalu mengidentifikasi dan mengenali masalah, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, melakukan gerakan-gerakan yang berbasis kebangsaan dan mengadakan komunitas serta merintis program pembangunan karakter berbangsa dan bernegara. Aset terbesar dari suatu negara bukanlah sumber daya alamnya, melainkan sumber daya manusia dari negara tersebut. Sebab itu, untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Maka dari itu, pembenahan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama yang harus dilakukan untuk perbaikan kualitas SDM di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kepedulian dari berbagai pihak. Generasi muda bisa ikut berperan aktif dalam memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah memerdekakan generasi perbaikan bangsa dari keterbatasan dalam pendidikan maupun kesehatan, dan generasi muda bisa ikut terlibat dalam hal tersebut. Ketika anak-anak dan generasi muda Indonesia hanya dicekoki dengan pendidikan yang berbasis keterampilan dan

pengetahuan tanpa menanamkan rasa nasionalisme dan progresifitas, maka mereka akan hanya menjadi pekerja ketika telah lulus dari institusi pendidikan.

Generasi muda Indonesia sebagai anak bangsa Indonesia harus pandai mencintai tanah air Indonesia serta harus bangga menjadi anak Indonesia dimana NKRI adalah negara yang kaya raya. Kalau generasi muda mencintai tanah air maka harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia yang mempunyai lebih dari 746 bahasa daerah dan 17.508 pulau dapat hidup berdampingan, melalui bahasa kita bisa membuat peta budaya, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat dunia. Pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia juga dapat dijadikan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan. Budaya memang menjadi bagian penting dan tidak bisa dilepaskan dari nama suatu bangsa. Bahkan budaya bisa dikatakan sebagai hal yang dapat menjadi representasi dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Potensi disintegrasi sangat besar, kita ambil contoh sekarang ini banyak bahasa daerah sudah hampir punah dan banyak anak bangsa yang tidak dapat berbahasa daerahnya dan lebih senang menggunakan bahasa asing. Bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan tetapi tetap harus menjaga budaya lama.

Menghangatnya wacana tentang pemuda dan kebangsaan belakangan ini setidaknya mengandung makna bahwa ada upaya menumbuhkan semangat nasionalisme pemuda demi masa depan bangsa yang lebih baik khususnya NKRI. Masa depan NKRI saat ini ada di tangan pemuda. NKRI akan tetap ada selama semangat nasionalisme itu tetap ada. Sebab, jika kita masih menginginkan keberadaan NKRI, maka nasionalisme pemuda harus dibangun dan lestarian dengan menggandeng budaya lokal (adat istiadat). Era saat ini kita harus waspada terhadap perubahan lingkungan strategis dengan lingkup Global, regional dan nasional, bentuk ancaman global salah satunya liberalisme, bentuk ancaman regional diantaranya klaim wilayah, keamanan, salah persepsi keamanan regional dan ancaman nasional

terkait dengan geografi, demografi, sumber daya alam, serta pertahanan keamanan, semua bentuk ancaman tersebut harus generasi muda waspadai.

Peran yang sangat penting dan strategis bagi pemuda Indonesia sebagai generasi penerus dan salah satu kekuatan utama bangsa harus sadar dan paham ancaman yang sedang berkembang melalui cara- cara baru, namun efek penghancurannya lebih dahsyat. Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada ancaman yang berat sangat jauh dengan masa lalu, yang dikenal dengan istilah *proxy war* dimana pelaku tidak di kenal secara jelas, namun bila dicermati dampaknya telah menimbulkan berbagai persoalan dan berbagai konflik di masyarakat dengan pemerintah. *Proxy War* bukan perang konvensional, tidak jelas siap kawan dan siapa lawan (perang menggunakan pihak lain sebagai boneka) yang dapat memecah belah dan mengancam bangsa Indonesia.

Hal tersebut dapat dicegah dengan menanamkan jiwa nasionalisme dan patriot yang tinggi kepada generasi penerus. Untuk itu, segenap pemuda Indonesia harus bijak dan teliti memikirkan berbagai langkah menyikapi berbagai ancaman NKRI yang semakin nyata dan perluantisipasi sedini mungkin. Yang kita perlukan saat ini adalah bisa menjawab dan menghadapi tantangan jaman dengan berbagai bentuk ancaman, bersama-sama kita jaga kepentingan strategis nasional untuk menjamin kedaulatan keutuhan dan keselamatan NKRI.

Menanamkan jiwa nasionalisme kebangsaan kepada anak bangsa untuk dapat memberikan kontribusi positif sesuai tugas dan bidangnya masing-masing, guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan menangkal segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan wilayah NKRI. Nasionalisme merupakan suatu keharusan bagi generasi muda untuk memahami dan menjalankan makna dari nasionalisme, karena wawasan kebangsaan itu lahir dari pemuda sehingga pemuda harus mampu memelopori semangat nasionalismenya. Cara paling strategis dalam membangun semangat nasionalisme pemuda adalah lewat pendidikan. Pendidikan yang kritis, kreatif, dan mengabdikan untuk

kepentingan bangsa dengan menjadi garda terdepan dalam menciptakan perdamaian. Selain itu, nasionalisme harus dibangun dari dalam dan oleh pemuda itu sendiri untuk kepentingan bangsa.

Pancasila adalah pondasi tegak berdirinya NKRI dan jika pondasinya rusak maka tamatlah NKRI, untuk itu marilah bersama-sama dengan para generasi muda untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI dengan cara mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dikembangkan dalam semangat demokrasi yang secara konsensual akan dapat mengembangkan nilai praktisnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba pluralistik. Mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah krusial kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ganefri menjelaskan terdapat empat strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.

1. Memperkuat kembali nasionalisme di level pendidikan formal. Muatan nilai-nilai pancasila wajib diberikan dan diamalkan di semua level pendidikan formal pandangan yang tepat.
2. Pengetahuan sejarah tentang pahlawan kemerdekaan Indonesia wajib diajarkan kembali pada peserta didik disemua jenjang pendidikan formal. Hal ini diharapkan generasi muda dapat mengetahui dan memahami begitu besar jasa para pahlawan kemerdekaan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara berdaulat.
3. Menerapkan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan karakter tersebut menitik beratkan pada sains, kebudayaan, dan religi dalam upaya memperluas budi pekerti serta kemanusiaan.

4. Pendekatan budaya populer, seperti menyelipkan unsur nasionalisme dalam kegiatan olahraga, musik, kompetisi pendidikan, dan masih banyak kegiatan lainnya.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme, yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sarat utama dalam mewujudkan nasionalisme nasional. Dengan demikian, tidak pada tempatnya untuk mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, budaya dan golongan. Kehendak untuk bersatu sebagai suatu bangsa memiliki konsekuensi siap mengorbankan kepentingan pribadi demi menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya pengorbanan, mustahil persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Malah sebaliknya akan dapat menimbulkan perpecahan. Inilah yang telah dibuktikan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Di samping itu, perlu dikembangkan semangat nasionalisme dalam tiap individu rakyat Indonesia. Nasionalisme yang harus dikembangkan adalah kebanggaan yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa, sehingga kehendak untuk bersatu masih tetap berakar di dalam hati sanubari. Semangat nasionalisme yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan keanekaragaman termasuk rasa cinta tanah air harus dijunjung tinggi dan ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa, termasuk kepada seluruh individu warga negara Indonesia, baik generasi sekarang maupun kepada generasi penerus bangsa Indonesia agar disadari hakikat bangsa Indonesia yang besar ini.

Di sisi lain, semangat kebangsaan dalam suatu bangsa yang terbangun sejak jaman kemerdekaan lalu masih tetap relevan dengan dunia masa kini. Bagi Indonesia, rumusan paham kebangsaan telah tercantum dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

yaitu membangun sebuah negara kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, membina persahabatan dalam pergaulan antar bangsa, menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan keadilan, serta menolak penjajahan dan segala bentuk eksploitasi, yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Upaya mengembangkan paham kebangsaan itu, dengan sendirinya akan menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan zaman. Namun, esensinya sama sekali tidak berubah. Nasionalisme harus memperkuat posisi ke dalam, dengan memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Esensinya adalah berjuang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, menegakkan hukum, dan membangun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Esensi ini tidak akan berubah untuk selama-lamanya.

Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita harus membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang cenderung meredup ditengah peliknya masalah ekonomi dan politik bangsa ini, semangat akan nilai-nilai nasionalisme harus tetap dijalankan. Hal ini kita lakukan untuk mewariskan jiwa patriot dan rasa cinta tanah air kepada generasi anak cucu pada masa mendatang. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan kerja keras para pahlawannya. Nasionalisme yang harus dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan di atas, bagaimana bisa bersikap jujur, adil, disiplin, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, dan lain-lain. Bila tidak bisa, artinya kita tidak bisa lagi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran total. Karakteristik nasionalisme Indonesia adalah kesatuan nasional, solidaritas, *non-kooperatif*, dan swadaya. Empat karakteristik inilah yang menjadi dasar keberhasilan membangun Indonesia sebagai negara.

BAB 2

Masyarakat Multikultural

A. Pengertian Masyarakat Multikultural

Masyarakat terdiri dari kelompok yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik tersebut berkaitan dengan tingkat diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Masyarakat yang memiliki keragaman inilah yang disebut dengan masyarakat multikultural. Multikultural merupakan pandangan mengesampingkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang mementingkan tujuan hidup bersama dalam menciptakan kedamaian, ketentraman, dan membentuk persatuan serta kesatuan. Pandangan multikultural ini mendsikripsikan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus diterima oleh semua golongan demi menghindari dampak dinamika kelompok sosial dalam masyarakat.

Kata Masyarakat Multikultural terdiri dari tiga kata yaitu Masyarakat, Multi, serta Kultural. Masyarakat didefinisikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang di dalamnya terdapat interaksi sesuai dengan sistem adat istiadat, bersifat terus menerus dan memiliki keterikatan serta rasa toleransi bersama. Kata Multi memiliki arti keberagaman, sedangkan kultural memiliki arti definisi budaya. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai struktur kebudayaan. Kondisi ini dikarenakan ada banyaknya suku bangsa dengan struktur budaya sendiri yang tentunya berbeda dari budaya suku bangsa lainnya.

Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini tentu ada kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta berikut: tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau, terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan

200 subsuku bangsa, memeluk beragam agama dan kepercayaan yang menurut statistik: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1% dan riwayat kultural percampuran berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern.

Pengertian masyarakat multikultural sendiri juga bisa berarti banyak hal, berikut ini beberapa pengertian masyarakat multikultural menurut para ahli.

1. J.S Furnival

Masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang didalamnya terdiri dari atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri dengan tidak adanya pembaruan diantara satu sama lainnya di dalamnya suatu kesatuan politik.

2. Clifford Getz

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang berdiri sendiri serta masing-masing sub di dalamnya memiliki keterkaitan oleh ikatan-ikatan primordial.

3. Nasikun

Pengertian masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang mana terdiri dari dua hingga lebih dari tatanan yang ada di dalam masyarakat atau kelompok. yang secara ekonomi, poliitk, dan kultural diisolasikan serta memiliki stuktur kelembagaan yang berbeda satu sama lainnya.

4. Parekh

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri dari beragam jenis komunitas budaya dengan segala manfaat dan sedikit perbedaaan yang ada di dalam konsepsi dunia, nilai, sistem makna, bentuk organisasi, adat istiadat, sejarah, serta kebiasaan yang ada.

5. Lawrence Blum

Pengertian multikultural menurut Blum ialah suatu keyakinan dalam bentuk idiologi untuk bisa menerima perbedaanagama,

politik, etnis, dan perbedaan lainnya. Baik dilakukan secara individual atau dilakukan dalam kelompok sosial tertentu.

6. Rifa'I Harahap

Masyarakat multikultural adalah kesatuan masyarakat yang bersatunya didasari dengan bentuk perbedaan untuk hidup bersama. Kehidupan bersama yang direncanakan ini diharapkan dapat menangani dampak gejala sosial, terutama masalah konflik yang sering terjadi.

7. Azyumardi Azra

Menurutnya, pengertian multikulturalis ialah suatu paradigma mengenai hidup bermasyarakat yang di dasari atas persatuan dan mengesampingkan perbedaan, baik perbedaan dalam ranah agama, pilihan politik, budaya, etnis, dan perbedaan lainnya.

Dari pengertian masyarakat multikultural menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang bersatu atas landasan perbedaan. Bersatuannya masyarakat bisa di dasari dengan sejarah yang sama, ideologi, atau keyakinan yang pernah dialaminya. Definisi ini tentunya mengindikasikan bahwa masyarakat multikultural lebih mengarahkan untuk bisa mencapai tujuan secara bersama. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun

mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut (Harahap, 2007). Konsekuensi dari multikulturalisme adalah sikap menentang dan anti terhadap, atau setidaknya bermasalah dengan, monokulturalisme dan asimilasi yang merupakan norma-norma wajar dari sebuah negara bangsa sejak abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang dituju oleh monokulturalisme adalah homogenitas, sekalipun homogenitas itu masih pada tahap harapan atau wacana dan belum terwujud. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan untuk mewujudkan menjadi satu kebudayaan baru. Pertentangan antara multikulturalisme dan monokulturalisme tampak nyata sekali dari asumsi dasar yang saling berseberangan, yang satu melegitimasi perbedaan sementara yang lain meminimalisir perbedaan.

B. Latar Belakang Terbentuknya Masyarakat Multikulturalisme

Istilah multikulturalisme marak digunakan pada tahun 1950 di Kanada. Istilah ini diderivasi dari kata multikultural yang dipopulerkan surat kabar-surat kabar di Kanada yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual. Pengertian tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama: *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan, *kedua*, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya. Parsudi Suparlan menuliskan, bahwa multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Ulasan mengenai multikulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum,

kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas (Suparlan, 2002). Multikulturalisme lahir dari benih-benih konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik. Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, berbedabeda tetapi tetap satu. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapuskannya atau mengingkarinya. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai realitas kehidupan. Hal ini adalah asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme.

Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Kita melihat kuatnya prinsip kesetaraan dan prinsip pengakuan pada berbagai definisi multikulturalisme. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007).

Terbentuknya masyarakat yang multikultural, hakekatnya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah masyarakat multikultural, antara lain:

1. Faktor Sejarah

Negara Indonesia dikenal akan masyarakatnya yang multikultural. Indonesia sendiri merupakan negara dengan sumber daya alam yang begitu melimpah terutama dalam sektor rempah-rempah. Hal ini lah yang dulunya membuat negara-negara lainnya seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang ingin menjajah Indonesia. Karena penjajahan inilah membuat beberapa negara dapat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di Indonesia, bahkan beberapa diantaranya sampai menikah dengan bangsa Indonesia. Hal ini lah yang menyebabkan terjadi penambahan kekayaan budaya serta ras di Indonesia sehingga memunculkan masyarakat multikultural.

2. Faktor Pengaruh Kebudayaan Asing

Globalisasi merupakan sebuah proses penting yang memiliki pengaruh dalam penyebaran budaya di seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia yang memiliki sistem demokrasi sehingga menjadikan sebagai salah satu negara yang terbuka. Dengan keterbukaan tersebut, tentu saja membuat masyarakat dapat dengan mudah menerima budaya yang masuk meskipun dari luar negeri sekalipun sehingga menyebabkan terjadinya benturan antara budaya lokal dan budaya asing. Dengan masuknya budaya asing di dalam masyarakat tentu saja menjadi faktor yang dapat memperkaya budaya sehingga membuat masyarakat negara tersebut menjadi masyarakat multikultural.

3. Faktor Geografis

Indonesia merupakan salah satu negara dengan letak geografis yang cukup strategis diantara 2 benua serta 2 samudera. Hal ini lah yang menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Karena menjadi jalur perdagangan inilah membuat banyak negara-

negara asing yang kemungkinan dapat singgah di Indonesia untuk berdagang misalnya saja, seperti China, Arab, India, dan negara-negara di kawasan Eropa. Karena alasan ini lah yang menyebabkan banyaknya budaya yang masuk ke wilayah Indonesia sehingga menciptakan masyarakat multikultural. Akibatnya terjadi akulturasi, asimilasi, atau amalgamasi sehingga budaya di Indonesia semakin beragam.

4. Faktor Perbedaan Iklim

Setiap daerah memiliki iklim berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi daerah tersebut. Iklim berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Perbedaan iklim menyebabkan perbedaan pola kehidupan antarmasyarakat di setiap daerah. Kondisi geografis, kondisi iklim serta cuaca juga menjadi faktor penyebab dari terbentuknya masyarakat majemuk. Perbedaan iklim yang terjadi di sebuah daerah tentunya akan mempengaruhi dari pola perilaku individu yang tinggal dan menyesuaikan diri dengan iklim yang ada. Misalnya saja, masyarakat yang tinggal di kawasan yang lebih dingin tentunya akan memakai pakaian yang tebal, sedangkan bagi orang-orang yang tinggal di kawasan panas tentu saja akan menggunakan pakaian yang tipis.

5. Faktor Fisik Kenampakan Alam dan Geologi

Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau yang menjadi tempat tinggal masyarakat Indonesia dihubungkan oleh selat dan laut. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia. Adapun kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan bagian bumi atau alam. Kenampakan alam misalnya daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Struktur geologi Indonesia terletak diantara 3 lempeng yang berbeda yaitu Pasifik, Asia, dan Australia. Kondisi ini yang kemudian membuat Indonesia menjadi negara kepulauan dengan

memiliki beberapa tipe geologi. Mulai dari tipe Australia, tipe Asiatis, dan tipe Peralihan. Dengan kondisi berpulau-pulau tersebut maka tentu saja membuat kehidupan masyarakat yang tinggal di setiap pulau berbeda satu sama lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing pulau. Jika masyarakat tersebut tinggal di pulau yang kecil, tentu saja akan mengalami kondisi kesulitan sumber daya. Hal ini yang membuat kebudayaan dari setiap pulau berbeda.

6. Keanekaragaman Agama

Agama merupakan sebuah kepercayaan serta pandangan dunia yang dapat menghubungkan antara manusia dengan manusia lainnya melalui tatanan di dalam kehidupannya. Agama tentu memiliki simbol serta sejarah yang suci dengan tujuan untuk menjelaskan makna dari kehidupan di dunia. Agama juga memiliki ikatan yang cukup kuat dengan manusia karena setiap agama yang ada tentu memiliki aturan, kitab suci, serta tempat suci tersendiri yang sangat berpengaruh pada kehidupan. Ada beberapa agama yang dianut di dunia ini. Penganut dari setiap agama tentunya berbeda di dalam sebuah wilayah. Hal inilah yang menyebabkan terciptanya masyarakat multikultural.

7. Keanekaragaman Ras

Ras merupakan sistem klasifikasi yang mana ditujukan untuk mengelompokkan manusia ke dalam kelompok-kelompok besar yang berdasarkan asal usul geografis, ciri fisik, karakteristik, serta kesukuannya. Paradigma ras ini seringkali digunakan di berbagai ilmu yang menekankan pada sifat biologis individu. Jika antropolog dan ilmuwan evolusi menggunakan istilah ras sebagai hal untuk membahas mengenai perbedaan biologis. Sedangkan pada sejarawan dan ilmuwan sosial, biasanya menggunakan ras untuk kategori kebudayaan ataupun konstruksi sosial. Perbedaan ras inilah yang bisa menjadi faktor pemicu dari masyarakat multikultural.

C. Ciri-ciri Masyarakat Multikultural

Pembentukan masyarakat multikultural didahului dengan terbentuknya masyarakat majemuk. Ciri-ciri masyarakat multikultural cenderung berupa ciri positif dari masyarakat majemuk seperti memiliki rasa toleransi dan menghargai perbedaan yang tinggi, bersifat inklusi. tingginya kesadaran dalam berintegrasi.

Berikut ini ciri-ciri masyarakat multikultural :

1. Terdiri dari berbagai struktur kebudayaan.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang didalamnya banyak sekali keberagaman. Sehingga membuat struktur budayanya lebih dari satu.
2. Terdapat Segmentasi
Masyarakat terbentuk dari bermacam-macam ras, suku, budaya, dan lainnya namun tetap masih memiliki hal yang memisahkannya. Biasanya yang menjadi pemisah tersebut adalah sebuah konsep yang dikenal dengan primordial. Misalnya saja jika di kota Jakarta terdapat berbagai macam suku dan ras, dari dalam negeri hingga luar negeri namun tetap saja dalam kenyataannya mereka memiliki sebuah ikatan primordial daerahnya.
3. Memiliki Struktur Non Komplementer
Masyarakat majemuk memiliki kelembagaan yang memiliki kesulitan dalam mengatur dan menjalankan masyarakatnya karena kurang lengkapnya persatuan didalamnya akibat terpisah oleh segmen-segmen tertentu tersebut.
4. Konsensusnya Rendah
Sebuah kelembagaan tentunya diperlukan sebuah kebijakan serta keputusan. Keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama inilah yang disebut dengan konsensus, yang mana di dalam sebuah masyarakat majemuk sangat sulit sekali mengambil sebuah keputusan.

5. Relatif Potensi Adanya Konflik

Sebuah masyarakat majemuk tentunya terdiri dari beragam suku, budaya, adat, serta kebiasaan yang masing-masingnya berbeda. Di dalam teori yang ada semakin banyaknya sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat maka tentu saja semakin memungkinkan jika terjadi konflik di dalamnya. Hal ini pula lah yang menyebabkan proses pengintegrasian menjadi hal yang sulit dilakukan.

6. Integrasi Bisa Tumbuh Dengan Adanya Paksaan

Masyarakat majemuk seringkali sulit untuk melakukan pengintegrasian. Sehingga mau tidak mau jalan alternatif yang dilakukannya adalah melalui pemaksa. Namun tentu saja cara seperti ini akan membuat integrasi tidak akan bertahan lama.

7. Terdapat dominasi politik kepada kelompok lainnya

Hal ini karena di dalam masyarakat majemuk terdapat segmen-segmen yang mana dapat berakibat pada *ingroup filling* yang tinggi sehingga bila suatu ras, suku, atau budaya memiliki sebuah kekuasaan atas masyarakat maka hal tersebut menyebabkannya akan selalu mengedepankan kepentingan dari suku atau ras nya. Karena keberagaman yang terjadi membuat timbulnya kelompok minoritas dan mayoritas.

D. Klasifikasi Bentuk Masyarakat multikultural

Berdasarkan dari kekuatannya, masyarakat multikultural terbagi menjadi beberapa, antara lain adalah:

1. Masyarakat yang memiliki kompetisi seimbang.
2. Minoritas Dominan, kelompok skala kecil yang mendominasi.
3. Masyarakat Dominan, kelompok mayoritas atau berskala besar yang mendominasi.
4. Fragmentasi, masyarakat yang di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok kecil sehingga tidak ada yang mendominasi.

Bentuk-bentuk Masyarakat Multikulturalisme menurut Parekh (1997) antara lain :

1. Multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain.
2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
3. Multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan meng-inginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.
4. Multikulturalisme kritis/interaktif, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (concerned) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka.
5. Multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi

terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Azra, 2007).

E. Tantangan Masyarakat Multikultural

Keadaan Indonesia yang multikultur akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat Indonesia membawanya. Keadaan ini bisa dibawa pada jalur yang menjadikannya suatu kekayaan dan kekuatan bangsa, namun bisa pula dibawa pada jalur yang akan menjadi pemecah belah dan penyulut konflik di masyarakat. Banyak para pakar yang tertarik untuk mengamati kemajemukan bangsa Indonesia, sehingga muncul berbagai pandangan yang beragam dalam menyikapi identitas Indonesia dan keadaannya yang multikultur. Berkaitan dengan hal tersebut, Amirsyah (2012:51) memandang bahwa kemajemukan masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin disangkal. Tidak ada cara lain bagi bangsa ini kecuali dengan berkomitmen kuat merawat keragaman menjadi sebuah kemungkin dan tidak mentolelir segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat majemuk.

Kemungkinan munculnya benih-benih perkecokan pada masyarakat multikultur sangat rawan terjadi jika masyarakat multikultur menyikapi perbedaan sebagai suatu pemisah dan menimbulkan sifat ke-kita-an (yang lain bukan bagian dari kita). Masyarakat yang hidup ribuan tahun dalam keadaan yang multikultur tidak berarti telah kebal terhadap kemungkinan-kemungkinan gesekan konflik etnis, budaya, agama, sosial, politik dan ekonomi. Pengalaman lama hidup dalam perbedaan ternyata tidak cukup untuk menanamkan rasa bangga akan perbedaan dan memandangnya sebagai suatu kekayaan bangsa.

Menyikapi hal tersebut, Azyumardi Azra (2008:31) memandang bahwa pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Harus diupayakan

secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Keragaman sebagai rahmat dari Tuhan tidak lepas dari tantangan yang sering kali muncul di tengah kehidupan masyarakat. Menyikapi perbedaan dengan intoleransi, memperdebatkan segala perbedaan, mempertentangkan orang lain yang tidak sama dengan dia, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang memicu konflik masal. Hal ini sangat rentan terjadi pada masyarakat Indonesia yang dihadapkan pada perubahan dan kebebasan era globalisasi. Will Kymlicka (2002:289) memandang bahwa suatu masyarakat yang dilandasi keragaman yang sangat luas sulit untuk tetap bersatu kecuali apabila anggota masyarakat itu menghargai keragaman itu sendiri, dan ingin hidup di sebuah negeri dengan beragam bentuk keanggotan budaya dan politik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Wingarta (2012:28) memaparkan bahwa munculnya konflik horisontal yang diwarnai SARA sebagaimana terjadi di Ambon, Poso, dan Sampit merupakan cermin dari bopeng-bopengnya pemaknaan dari Bhineka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) saat itu sadar betul, bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun di atas beragamnya suku bangsa, agama, adat-istiadat, sosial budaya, bahasa serta kebiasaan yang sangat multikultur. Konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Kebanyakan kasus yang terjadi dipicu oleh tindakan seorang atau kelompok tertentu yang intoleran yang kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya. Haris (2012:52) mengatakan bahwa akibat lebih jauh terjadinya konflik horisontal yang dipicu oleh kecemburuan sosial, ego daerah, ego suku, ego agama, dan lainnya. Kesadaran untuk hidup bersama secara damai sesuai makna Bhineka Tunggal Ika mulai luntur. Akibat ego seorang atau segelintir orang kemudian dibawa

menjadi ego kelompok dan golongan tertentu muncul konflik besar yang membawa bencana bagi semua pihak termasuk pihak yang tidak terlibat. Namun demikian, tantangan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki optimisme tersendiri untuk menjadi sebuah potensi bukan bibit konflik.

Sejalan dengan hal tersebut, Sujanto (2009: 4) memandang bahwa tentang keragaman dan keberbedaan (kemajemukan) ini. Tuhan pun telah menggambarkan pada diri manusia dengan lima jari tangan yang saling berbeda, yang kalau boleh saya sebut 'sebagai falsafah lima jari'. Fitrah keragaman jari itupun diciptakan dengan masing-masing ciri, fungsi dan peran dari tiap-tiap jari. Apabila kelima jari itu disatukan (bersatu) akan terbangun suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan seberat apapun yang ada.

Falsafah lima jari merupakan contoh sederhana optimisme perbedaan yang bisa menjadi potensi besar untuk melakukan pekerjaan seberat apapun. Bahkan diharapkan bisa merubah suatu tantangan menjadi sebuah peluang. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat harus memiliki pandangan yang kuat tentang persatuan dan kesatuan. Kaelan (dalam Bestari, 2012:71) mengemukakan bahwa pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika harus merupakan asas bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

Sejalan dengan hal tersebut, Winataputra (2012: 6) mengemukakan bahwa pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI (Kemko Kesra: 2010) perlu ditransformasikan secara fungsional dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mentransformasikan Empat pilar kebangsaan tersebut, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya Bhineka Tunggal Ika. Aeni (2012: 87) memaparkan bahwa kebijakan yang ditempuh adalah membangun kesejahteraan berbangsa dan bernegara di atas ke-

Bhinneka Tunggal Ika-an dalam rangka mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, rukun, aman, damai, saling menghormati, demokrasi dalam menghadapi globalisasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan tangguh.

Peran kebijakan harus didukung dengan kesadaran sehingga kesejahteraan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Jika hal ini sudah disadari bersama, maka gesekan-gesekan konflik yang bernuansa SARA di masyarakat akan bias diatasi dan bahkan mengubah kemungkinan konflik tersebut menjadi suatu peluang untuk hidup saling melindungi dalam kerukunan. Persinggungan unsur-unsur SARA secara positif diharapkan juga dapat meningkatkan mutu kehidupan masing-masing unsur, bermanfaat bagi masing-masing pihak baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, masing-masing pihak memiliki keunggulan dalam hal tertentu dari pihak yang lain, sehingga dengan berinteraksi akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan.

Secara awam, kita menyadari kebutuhan untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa Indonesia. Namun secara filosofis, ternyata multikulturalisme mengandung persoalan yang cukup mendasar tentang konsep kesetaraan budaya itu sendiri. Beberapa kritikus multikulturalisme telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme. Kritik terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak.

Pertama, kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan dan perbedaan. David Miller (1995) menulis bahwa multikulturalisme radikal menekankan perbedaan-perbedaan antarkelompok budaya dengan mengorbankan berbagai persamaan yang mereka miliki dan dengan demikian multikulturalisme akan melemahkan ikatan-ikatan solidaritas yang berfungsi mendorong para warga negara untuk mendukung kebijakan-kebijakan redistributif dari negara kesejahteraan. Hal ini, komentar Anne Phillips (2007:13) akan menghancurkan kohesi

sosial, melemahkan identitas nasional, mengosongkan sebagian besar dari isi konsep —kewarganegaraan. Jika telah sampai pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal akan membangkitkan semangat untuk memisahkan diri atau separatisme dalam psike kelompok-kelompok kultural.

Kedua, kenyataan bahwa dapat terjadi benturan prinsip kesetaraan antara elemen minoritas dalam kelompok sosial. Peneliti feminis Susan Moller Okin (lihat Okin, 1998, 1999, dan 2002), misalnya, menilai bahwa agenda multikulturalisme tidak dapat berbuat banyak, atau justru makin melemahkan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat lokalnya. Praktik-praktik seperti poligami, penyunatan alat kelamin perempuan, pernikahan paksa terhadap anak-anak perempuan termasuk anak-anak perempuan berusia dini, dan lain sebagainya praktik yang bias gender, justru dilegitimasi oleh multikulturalisme yang memberikan hak otonom bagi setiap kelompok kultural untuk melanggengkan tatanan sosial masing-masing. Jika tatanan sosial dari kelompok kultural tersebut didasarkan atas sistem patriarki, kata Okin, posisi perempuan dalam masyarakat itu sangat lemah.

Anne Phillips menganalisis situasi ini sebagai benturan antarprinsip kesetaraan. Terjadi konflik antara dua klaim kesetaraan. Multikulturalisme ingin menghapuskan ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok-kelompok kultural minoritas, sementara feminisme ingin menghapuskan ketidaksetaraan yang dialami oleh kaum perempuan. Kedua proyek ini, multikulturalisme dan feminisme, sebetulnya berangkat dari komitmen yang sama terhadap prinsip kesetaraan dan keduanya berhadap-hadapan sebagai dua aspek yang harus diseimbangkan. Karena keduanya sama-sama mengurus isu ketidaksetaraan yang nyata, sangat tidak tepat untuk memutuskan yang satu lebih fundamental daripada yang lain (Phillips, 2007:3).

Ada risiko konseptual dalam multikulturalisme bahwa perbedaan budaya akan terlalu disakralkan sehingga kebenaran universal tentang praktik sosial-politik yang ideal tidak lagi dicari dan kritik normatif atas

praktik budaya tertentu ditabukan. Para feminis sudah lama mengkritik multikulturalisme sebagai ideologi yang merugikan perempuan karena melegitimasi sistem sosial patriarkis dalam budaya-budaya lokal. Sekalipun prinsip kesetaraan bersifat mendasar bagi demokrasi dan kehidupan kebangsaan modern, namun kesetaraan bukanlah satu-satunya prinsip yang berlaku. Demokrasi juga mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia dan memberikan ruang luas bagi individu dalam kelompok untuk mengekspresikan diri secara unik. Isu ketegangan antara penghargaan terhadap keberbedaan dan hak untuk menjadi berbeda dengan konsep universal tentang martabat individu sesungguhnya inilah perlu diteliti lebih lanjut agar ditemukan solusi yang tepat. Sampai di titik ini, kita bisa memandang proyek multikulturalisme dengan lebih menyeluruh, bukan semata-mata sebagai jargon politik untuk mencitrakan ideologi atau organisasi yang pro kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah konsep filosofis dengan asumsi-asumsi yang ternyata problematis.

Salah satu ironi dari proyek multikultural, lanjut Anne Phillips (2007:25), adalah bahwa atas nama kesetaraan dan respek mutual antarelemen masyarakat, ia juga mendorong kita untuk memandang kelompok-kelompok dan tatanan-tatanan budaya secara sistematis lebih berbeda daripada kenyataan sesungguhnya dan dalam proses tersebut, multikulturalisme berkontribusi menciptakan stereotipisasi wujud-wujud kultural yang ada. Saat ini multikulturalisme sedang laris dalam arti positif di kalangan birokrat, akademisi, maupun masyarakat umum. Visi indah tentang kelompok-kelompok budaya berbeda yang berinteraksi dalam kedamaian dan ko-eksistensi konstruktif ada di benak kita semua. Pidato-pidato dan esai-esai yang mendorong dijunjung tingginya multikulturalisme ada di mana-mana, meminta dan menuntut adanya sikap menghargai setiap wujud kebudayaan, daerah atau sub-kelompok, yang ada di Indonesia. Namun, konflik inheren dalam konsep multikulturalisme belum dicarikan solusi fundamental,

sehingga kita melihat dalam praktiknya terjadi benturan-benturan antara konsep yang satu dan yang banyak.

Aksi terorisme, misalnya telah menunjukkan adanya identitas kelompok kultural yang kuat namun memberontak terhadap identitas bersama dan kepentingan rakyat banyak sebagai sesama warga Indonesia. Para teroris mengorbankan kepentingan dan keselamatan sesama warga negara Indonesia untuk memperjuangkan tujuan kelompok kulturalnya sendiri. Kita bisa menilai hal yang sama terjadi pada gerakan-gerakan separatisme di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Memperkuat identitas kelompok kultural ternyata bisa menabrak kepentingan agenda nasional yang lebih besar, sila ketiga dari Pancasila, yakni persatuan Indonesia.

Masalah benturan antar klaim kesetaraan juga perlu diselesaikan. Jika esensi dari multikulturalisme adalah pengakuan bahwa kaum minoritas perlu diperlakukan setara seperti kelompok mayoritas, kita akan berhadapan dengan persoalan, bagaimana dengan kaum minoritas di tengah kaum minoritas itu. Bahkan kaum minoritas pun dapat berlaku menindas terhadap kaum minoritasnya sendiri, itu kita temui dalam realitas masyarakat. Perlakuan terhadap kaum perempuan di tengah sub-kelompok kultural yang patriarkis adalah satu contoh. Di Indonesia juga kita temukan kasus-kasus seperti kelompok keagamaan minoritas yang tidak memperoleh pengakuan kesetaraan dari kelompok keagamaan mayoritas tempat mereka berafiliasi, juga sub-sub kultur lain yang masih bergerak di bawah tanah, eksis tapi tidak berani menampilkan diri karena takut pada konsekuensi sosial dari kelompok kultural mayoritas, misalnya kelompok ateis dan seterusnya.

BAB 3

Multikultural di Indonesia

A. Keragaman Etnis di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan nya, Bhineka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik.

Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut :

A. Keadaan geografis

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mata pencaharian penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang ada juga menyebabkan beranekaragamnya peralatan yang diciptakannya, misalnya bentuk rumah dan bentuk pakaian. Akhirnya sampai pada

bentuk kesenian yang ada di masing-masing daerah berbeda. Keadaan geografis juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri.

B. Pagaruh kebudayaan asing

Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama.

C. Kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda

Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan, dan lainnya.

1. Keragaman Suku Bangsa

Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat.

Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa, persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini.

- Tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain.
- Bahasa yang dipergunakan, misalnya Bahasa Batak, Bahasa Jawa, Bahasa Madura, dan lain-lain.
- Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian.
- Kesenian daerah, misalnya Tari Janger, Tari Serimpi, Tari Cakalele, dan Tari Saudati.
- Keekerabatan, misalnya patrilineal (sistem keturunan menurut garis ayah) dan matrilineal (sistem keturunan menurut garis ibu).
- Batasan fisik lingkungan, misalnya Badui dalam dan Badui luar.

Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lain. Jumlah suku bangsa di Indonesia ratusan jumlahnya. Berikut ini contoh persebaran suku bangsa di Indonesia:

- Nanggroe Aceh Darussalam : suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Kluet, suku Simelu, suku Singkil, suku Tamiang, suku Ulu .
- Sumatera Utara : suku Karo, suku Nias, suku Simalungun, suku Mandailing, suku Dairi, suku Toba, suku Melayu, suku PakPak, suku maya-maya
- Sumatera Barat : suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu, suku guci, suku jambak
- Riau : Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Kuantum Akit, Talang Manuk, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Hutan, Laut .
- Kepulauan Riau : Melayu, laut

- Bangka Belitung : Melayu
- Jambi : Batin, Kerinci, Penghulu, Pewdah, Melayu, Kubu, Bajau .
- Sumatera Selatan : Palembang, Melayu, Ogan, Pasemah, Komering, Ranau Kisam, Kubu, Rawas, Rejang, Lematang, Koto, Agam
- Bengkulu : Melayu, Rejang, Lebong, Enggano, Sekah, Serawai, Pekal, Kaur, Lembak
- Lampung : Lampung, Melayu, Semendo, Pasemah, Rawas, Pubian, Sungkai, Sepucih
- DKI Jakarta : Betawi
- Banten : Jawa, Sunda, Badui
- Jawa Barat : Sunda,
- Jawa Tengah : Jawa, Karimun, Samin, Kangean
- D.I.Yogyakarta : Jawa
- Jawa Timur : Jawa, Madura, Tengger, Osing
- Bali : Bali, Jawa, Madura
- NTB : Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, Mbojo, Dompu, Tarlawi, Lombok
- NTT : Alor, Solor, Rote, Sawu, Sumba, Flores, Belu, Bima
- Kalimantan Barat : Melayu, Dayak (Iban Embaluh, Punan, Kayan, Kantuk, Embaloh, Bugar, Bukat), Manyuke
- Kalimantan Tengah : Melayu, Dayak (Medang, Basap, Tunjung, Bahau, Kenyah, Penihing, Benuaq), Banjar, Kutai, Ngaju, Lawangan, Maayan, Murut, Kapuas
- Kalimantan Timur : Melayu, Dayak (Bukupai, Lawangan, Dusun, Ngaju, Maayan)
- Kalimantan Selatan : Melayu, Banjar, Dayak, Aba
- Sulawesi Selatan : Bugis, Makasar, Toraja, Mandar
- Sulawesi Tenggara : Muna, Buton, Totaja, Tolaki, Kabaena, Moronehe, Kulisusu, Wolio
- Sulawesi Tengah : Kaili, Tomini, Toli-Toli, Buol, Kulawi, Balantak, Banggai, Lore

- Sulawesi Utara : Bolaang-Mongondow, Minahasa, Sangir, Talaud, Siau, Bantik
- Gorontalo : Gorontalo
- Maluku : Ambon, Kei, Tanimbar, Seram, Saparua, Aru, Kisar
- Maluku Utara : Ternate, Morotai, Sula, taliabu, Bacan, Galela
- Papua Barat : Waigeo, Misool, Salawati, Bintuni, Bacanca
- Papua Tengah : Yapen, Biak, Mamika, Numfoor
- Papua Timur : Sentani, Asmat, Dani, Senggi

2. Keanekaragaman Budaya Bangsa

Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja, mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan dalam goa. Di daerah Bali, mayat dibakar(ngaben).

Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Jawa dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah. Sementara rumah-rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut rumah panggung. Alasan orang membuat rumah panggung antara lain untuk menghindari banjir dan menghindari binatang buas. Kolong rumah biasanya dimanfaatkan untuk memelihara ternak dan menyimpan barang. Keanekaragaman budaya dapat dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat. Berikut ini beberapa contoh rumah adat.

- Rumah Bolon (Sumatera Utara).
- Rumah Gadang (Minangkabau, Sumatera Barat).
- Rumah Joglo (Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur).
- Rumah Lamin (Kalimantan Timur).

- Rumah Bentang (Kalimantan Tengah).
- Rumah Tongkonan (Sulawesi Selatan).
- Rumah Honai (Rumah suku Dani di Papua).

Setiap suku bangsa mempunyai upacara adat dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan. Misalnya upacara-upacara kelahiran, penerimaan menjadi anggota suku, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Nama dan bentuk upacara menandai peristiwa kehidupan itu berbeda-beda dalam masing-masing suku.

Beberapa contoh upacara adat yang dilakukan suku-suku di Indonesia antara lain sebagai berikut.

- Mitoni, tedhak siti, ruwatan, kenduri, grebegan (Suku Jawa).
- Seren taun (Sunda).
- Kasodo (Tengger).
- Nelubulanin, ngaben (Bali).

Contoh lagu-lagu daerah sebagai berikut.

- Nangroe Aceh Darussalam Piso Surit
- Sumatera Utara Lisoi, Sinanggar Tullo, Sing Sing So, Butet
- Sumatera Barat Kambanglah Bungo, Ayam Den Lapeh, Kampuang Nan Jauh di Mato
- Riau Soleram
- Sumatera Selatan Dek Sangke, Tari Tanggai, Gendis Sriwijaya
- Jakarta Jali-jali, Kicir-kicir, Surilang
- Jawa Barat Bubuy Bulan, Cing Cangkeling, Manuk Dadali, Sapu
- Nyere Pegat Simpai
- Jawa Tengah Gundul-gundul Pacul, Gambang Suling, Suwe Ora
- Jamu, Pitik Tukung, Ilir-ilir,
- Jawa Timur Rek Ayo Rek, Turi-turi Putih
- Madura Karaban Sape, Tanduk Majeng
- Kalimantan Barat Cik Cik Periok
- Kalimantan Tengah Naluya, Kalayar, Tumpi Wayu

- Kalimantan Selatan Ampar Ampar Pisang, Paris Barantai
- Sulawesi Utara Si Patokaan, O Ina Ni Keke, Esa Mokan
- Sulawesi Selatan Anging Mamiri, Ma Rencong, Pakarena
- Sulawesi Tengah Tondok Kadadingku
- Bali Dewa Ayu, Meyong-meyong, Macepetcepatan, Janger, Cening
- Putri Ayu.
- NTT Desaku, Moree, Pai Mura Rame, Tutu Koda, Heleleu Ala De
- Teang,
- Maluku Kole-Kole, Ole Sioh, Sarinande, Waktu Hujan Sore-sore,
- Ayo Mama, Huhatee
- Papua Apuse, Yamko Rambe Yamko

Contoh Tari-tarian Tradisional Indonesia

- Nangroe Aceh Darussalam Tari Seudati, Saman, Bukat
- Sumatera Utara Tari Serampang, Baluse, Manduda
- Sumatera Barat Tari Piring, Payung, Tabuik
- Riau Tari Joget Lambak, Tandak
- Sumatera Selatan Tari Kipas, Tanggai, Tajak
- Lampung Tari Melinting, Bedana
- Bengkulu Tari Adum, Bidadari
- Jambi Tari Rangkung, Sekapur Sirih
- Jakarta Tari Yapong, Serondeng, Topeng
- Jawa Barat Tari Jaipong, Merak, Patilaras
- Jawa Tengah-Yogyakarta Tari Bambang Cakil, Enggot-enggot,
- Bedaya, Beksan,
- Jawa Timur Tari Reog Ponorogo, Remong
- Bali Tari Legong, Arje, Kecak
- Nusa Tenggara Barat Tari Batunganga, Sampari
- Nusa Tenggara Timur Tari Meminang, Perang

Contoh Seni Pertunjukan yang Ada di Indonesia

- Banten: Debus
- DKI Jakarta: Ondel-ondel, Lenong
- Jawa Barat: Wayang Golek, Rudat, Banjet, Tarling, Degung
- Jawa Tengah: Wayang Kulit, Kuda Lumping, Wayang Orang,
- Ketoprak, Opak Alang, Sintren
- Jawa Timur: Ludruk, Reog, Wayang Kulit
- Bali: Wayang Kulit, Janger
- Riau: Makyong

Selain hasil kesenian yang sudah disebutkan di atas, suku-suku bangsa di Indonesia juga mempunyai hasil karya seni dalam bentuk benda. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, antara lain seni lukis, seni pahat, seni ukir, patung, batik, anyaman, dan lain-lain. Benda-benda karya seni yang terkenal, antara lain ukiran Bali dan Jepara, Patung Asmat dan patung-patung Bali, anyaman dari suku-suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Hasil kerajinan seni ini menjadi barang-barang cinderamata yang sangat digemari turis mancanegara.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Identitas seringkali dikuatkan kesatuan bahasa. Oleh karena itu, kesatuan kebudayaan bukan suatu hal yang ditentukan oleh orang luar, melainkan oleh warga yang bersangkutan itu sendiri. Suku-suku yang ada di Indonesia antara lain Gayo di Aceh, Dayak di Kalimantan, dan Asmat di Papua.

Contoh keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Pakaian adat Aceh

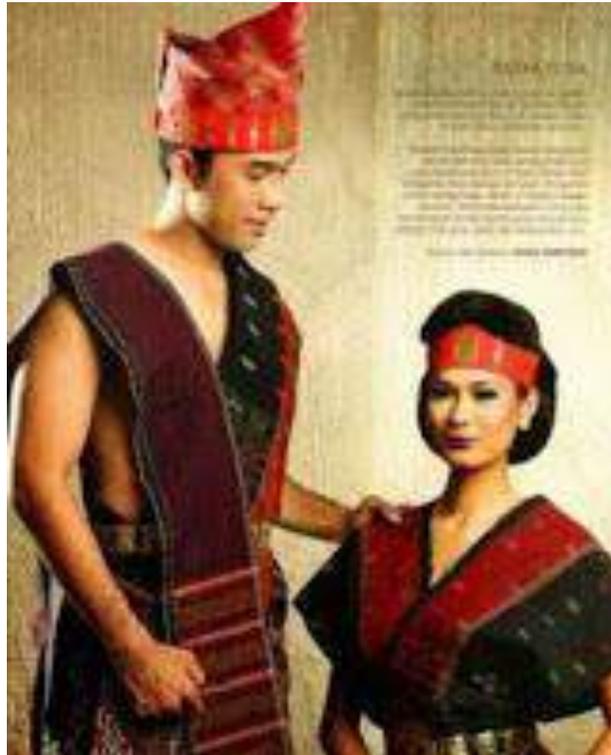
Pakaian adat Aceh bernama pakaian Ulee Balang. Pakaian ini untuk pria disebut baju Linto Baro, sedangkan pakaian untuk wanita disebut baju Daro Baro. Dahulunya, pakaian ini hanya digunakan oleh para sultan dan pembesar kerajaan, namun sekarang keduanya lebih sering dipakai oleh para pengantin. Kedua pakaian tersebut punya keunikan tersendiri sebagai ciri khas di setiap bagiannya.



Gambar 3.1: Pakaian Adat Aceh
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

2. Pakaian Adat Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki penduduk yang heterogen. Beragam suku bangsa seperti suku Nias, suku Melayu, dan suku Bataktinggal di provinsi ini. Kendati begitu, suku paling mendominasi dan menjadi mayoritas adalah suku Batak.



Gambar 3.2: Pakaian Adat Sumatera Utara

Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

Suku Batak sendiri memiliki pakaian adat yang bernama kain ulos. Secara umum, kain ulos inilah yang menjadi identitas dan ciri utama pakaian adat Sumatera Utara di kancah nasional. Berikut adalah gambar dari sepasang muda mudi yang tengah memakai kain ulos.

3. Pakaian Adat Riau

Ada 4 jenis pakaian adat dalam kebudayaan masyarakat Melayu Riau. Masing-masing pakaian digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Namun, secara umum pakaian adat yang menjadi identitas provinsi ini di kancah Nasional adalah sebuah busana yang bernama pakaian adat Melayu Riau.



Gambar 3.3: Pakaian Adat Riau
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>

4. Pakaian Adat Sumatera Barat

Kisah Malin Kundang yang berasal dari cerita turun temurun nenek moyang suku Minangkabau sedikit banyak telah mempengaruhi berbagai aspek budaya di Sumatera Barat. Salah satu yang paling kentara adalah dijunjung tinggi peran ibu dalam adat istiadat. Hal tersebut bisa dilihat pula dalam ragam pakaian adat Sumatera Barat yang bernama Bundo Kandung. Semua segi dan aksesoris pakaian ini memiliki nilai filosofis.



Gambar 3.4: Pakaian Adat Sumatera Barat
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

5. Pakaian Adat Kepulauan Riau

Letak provinsi Kepulauan Riau yang begitu strategis dalam jalur pelayaran masa silam telah membuat budaya masyarakat provinsi ini menjadi sangat khas. Proses akulturasi budaya melayu sebagai penduduk lokal dengan budaya para pendatang seperti budaya China, Arab, dan Eropa menghasilkan bentuk budaya unik yang salah satu bentuknya bisa kita temukan pada pakaian adat Kepulauan Riau saat ini, yaitu pakaian adat kebaya labuh dan teluk belanga.



Gambar 3.5: Pakaian Adat Kepulauan Riau

Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

6. Pakaian Adat Bangka Belitung

Pakaian adat dari Bangka Belitung namanya adalah baju seting dan kain cual. Pakaian ini diduga adalah pakaian yang dipengaruhi akulturasi budaya masyarakat Arab, China, dan Melayu pada masa silam. Seperti diketahui, wilayah sekitar Bangka Belitung dulunya memang adalah wilayah yang sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia saat melakukan perjalanan laut (pelayaran) dan perdagangan. Gambar di samping adalah sepasang pengantin Bangka yang tengah mengenakan pakaian adat leluhurnya.



Gambar 3.6: Pakaian Adat Bangka Belitung
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

7. Pakaian Adat Jambi

Pakaian adat Jambi sangat beragam jenisnya. Namun, yang resmi menjadi identitas provinsi ini di kancah nasional adalah sepasang pakaian pengantin adat yang bernama pakaian adat Melayu Jambi. Gambar di bawah merupakan gambar pengantin adat Jambi yang tengah mengenakan pakaian adat tersebut.



Gambar 3.7: Pakaian Adat Jambi

Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

8. Pakaian Adat Jambi

Suku asli masyarakat Bengkulu seperti suku Serawai, Rejang, Lembak, dan Pekal sebenarnya merupakan bagian dari sub suku Melayu. Oleh sebab itu, adat dan budaya dari suku-suku tersebut juga memiliki sumber yang sama, yaitu budaya Melayu. Kendati begitu, budaya Melayu Bengkulu memiliki perbedaan dengan budaya Melayu pada umumnya. Perbedaan ini tercipta karena adanya kekhasan alam sekitar yang menyebabkan akulturasi budaya.



Gambar 3.8: Pakaian Adat Bengkulu
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

9. Pakaian Adat Sumatera Selatan

Ada dua jenis gaya busana pakaian adat Palembang yang cukup dikenal di kancah nasional. Keduanya yaitu Aesan Geda dan Aesan Pasangko. Aesan gedde adalah pakaian yang menunjukkan keagungan, sementara aesan paksangko adalah pakaian yang menunjukkan keanggunan. Di masa silam, kedua pakaian tersebut hanya digunakan oleh raja dan para pembesar kerajaan. Namun sekarang lebih umum digunakan oleh sepasang pengantin Palembang dalam upacara pernikahannya.



Gambar 3.9: Pakaian Adat Sumatera Selatan

Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

10. Pakaian Adat Lampung

Sebetulnya, tidak ada nama khusus untuk pakaian adat Lampung. Akan tetapi, berbagai pernik kain yang digunakan pada pakaian tersebut umumnya dibuat dari bahan kain tapis. Kais tapis adalah kain tenun tradisional khas Lampung yang menonjolkan warna emas sebagai warna utamanya disertai dengan motif-motif geometris.



Gambar 3.10: Pakaian Adat Lampung
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

11. Pakaian Adat Banten

Tak bisa dipungkiri bahwa budaya Banten memang sangat mirip dengan budaya Sunda di Jawa Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan ragam jenis pakaian adat yang dikenakan oleh masyarakatnya. Dalam adat Banten dikenal pakaian adat yang bernama baju Panganten. Pakaian ini sesuai namanya hanya digunakan oleh para pengantin saat upacara pernikahannya. Dari bentuk, motif dan desainnya pakaian ini nyaris serupa dengan pakaian adat Sunda. Para pria mengenakan baju koko berkerah, kain batik sebagai bawahan, penutup kepala, dan selendang untuk ikat pinggangnya. Sementara para pria mengenakan kebaya, kain batik, dan hiasan kepala berupa kembang goyang.



Gambar 3.11: Pakaian Adat Banten
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

12. Pakaian Adat Jawa Tengah

Ada banyak jenis pakaian tradisional yang dikenal dalam adat suku Jawa di Jawa Tengah. Akan tetapi, jenis pakaian adat yang menjadi ikon Jawa Tengah di kancah nasional adalah jenis pakaian resmi yang bernama Jawi Jangkep dan Kebaya. Gambar di bawah adalah gambar sepasang wanita dan pria Jawa yang mengenakan pakaian adat tersebut.



Gambar 3.12: Pakaian Adat Jawa Tengah
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

13. Pakaian Adat Jawa Timur

Pakaian adat Jawa Timur bernama baju pesaan dan baju mantenan. Baju pesaan sebetulnya adalah pakaian adat khusus masyarakat Madura. Pakaian ini sarat akan nilai filosofis yang menggambarkan keberanian dan kekuatan suku Madura dalam entitas budaya Jawa Timur. Sementara baju mantenan adalah baju adat yang dikhususkan untuk dikenakan para pengantin (manten). Baik masyarakat Madura maupun masyarakat Jawa Timur umumnya akan mengenakan pakaian ini saat upacara pernikahannya. Gambar di bawah adalah sepasang pengantin yang mengenakan baju mantenan.



Gambar 3.13: Pakaian Adat Jawa Timur
Sumber: <https://ainamulyana.blogspot.com>.

B. Keragaman Agama Di Indonesia

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Kata “*agama*” berasal dari bahasa Sanskerta, *āgama* yang berarti “*tradisi*”. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu: agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Keppres No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Ada juga penganut agama Yahudi, Sainologi, Raelianisme dan lain-lainnya, meskipun jumlahnya termasuk sedikit. Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut.

Sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. Tetapi SK (Surat Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru juga dikenal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditujukan kepada sebagian orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan pemeluk salah satu dari agama mayoritas.

Berikut penjelasan Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia

1. Agama Islam

Nama Kitab Suci : Al Qur'an
Nama Pembawa : Nabi Muhammad SAW
Permulaan : Sekitar 1400 tahun yang lalu
Tempat Ibadah : Masjid
Hari Besar Keagamaan : Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijrah, Isra' Mi'raj.

2. Agama Kristen Protestan

Nama Kitab Suci : Alkitab
Nama Pembawa : Yesus Kristus
Permulaan : Sekitar 2000 tahun yang lalu
Tempat Ibadah : Gereja
Hari Besar Keagamaan : Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih

3. Agama Katolik

Nama Kitab Suci	:	Alkitab
Nama Pembawa	:	Yesus Kristus
Permulaan	:	Sekitar 2000 tahun yang lalu
Tempat Ibadah	:	Gereja
Hari Besar Keagamaan	:	Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih

4. Agama Hindu

Nama Kitab Suci	:	Weda
Nama Pembawa	:	-
Permulaan	:	Sekitar 3000 tahun yang lalu
Tempat Ibadah	:	Pura
Hari Besar Keagamaan	:	Hari Nyepi, Hari Saraswati, Hari Pagerwesi

5. Agama Buddha

Nama Kitab Suci	:	Tri Pitaka
Nama Pembawa	:	Siddharta Gautama
Permulaan	:	Sekitar 2500 tahun yang lalu
Tempat Ibadah	:	Vihara
Hari Besar Keagamaan	:	Hari Waisak, Hari Asadha, Hari Kathina

6. Agama Kong Hu Cu

Nama Kitab Suci	:	Si Shu Wu Ching
Nama Pembawa	:	Kong Hu Cu
Permulaan	:	Sekitar 2500 tahun yang lalu
Tempat Ibadah	:	Li Tang / Klenteng
Hari Besar Keagamaan	:	Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh

C. Keragaman Ras Di Indonesia

Beberapa ahli mempunyai pendapat berbeda mengenai pengertian ras, namun secara umum ras dapat diartikan sebagai sekelompok besar manusia yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Manusia yang satu memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisil yang lain.

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras disebabkan oleh kehadiran bangsa asing ke wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia seperti ras malayan-mongoloid yang tersebar di wilayah sumatra, kalimantan, sulawesi, jawa, bali,. Yang kedua adalah ras malanesoid yang tersebar di daerah Papua, NTT dan Maluku. Ketiga ras Kaukasoid yaitu orang India, timur Tengah, Australia, Eropa dan Amerika. Terakhir yaitu ras Asiatic mongoloid seperti orang Tionghoa, korea dan jepang. Ras ini tinggal dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, namun terkadang mendiami wilayah tertentu. Tuhan menciptakan manusia beraneka ragam bentuk fisik, warna kulit, bahasa, dan budayanya.

Jika perbedaan itu disikapi dengan positif maka akan bermanfaat sekali karena tiap kelompok masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang memiliki keramahan, ketegasan, jiwa dagang dan lain-lain yang jika dikolaborasikan akan bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan semua kelompok masyarakat.

D. Dampak Masyarakat Multikultural Di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan berlandaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Udaya Begitu juga bendera

kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku dan beranekaragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Perbedaan suku, bangsa, ras dan kepercayaan yang tersebar di seluruh tanah air juga menjadi kekayaan yang sangat berharga bagi kita selaku warga negara Indonesia. Adanya keberagaman budaya dalam negara kita dapat membawa dampak positif dapat juga memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan kita dalam bernegara.

Berikut penjelasan dampak positif dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

1. Menjadi Kekayaan Negara

Berbagai macam budaya yang datang dari daerah mana saja entah itu pesisir pantai, pegunungan, desa, kota, suku, semuanya berhak diklaim sebagai kepunyaan dari negara Indonesia. Kekayaan budaya ini patut menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakatnya, bukan hanya dari daerah asal budaya tertentu saja. Hal ini juga memunculkan rasa kepemilikan kebudayaan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ketika ada satu saja budaya yang diklaim atau dilecehkan oleh negara lain, seluruh warga negaranya bersatu untuk merebut kembali dan mengembalikan kebudayaan tersebut sebagai identitas negara.

2. Membentuk Masyarakat yang Toleran

Keberagaman budaya dalam setiap daerah tentu memiliki berbagai macam perbedaan. Karena berada di satu atap yang sama yaitu NKRI, mau tidak mau masyarakatnya berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Hal ini menjadi lumrah bagi warga Indonesia karena sudah terbiasa dengan

kehadiran suku bangsa lain yang tinggal menetap di daerah yang bukan asalnya. Interaksi masyarakat yang toleran tentu merupakan bentuk hubungan sosial yang dapat dengan mudah terbentuk dengan sendirinya.

3. Menjadi Daya Tarik Bagi Turis Asing

Bukan rahasia lagi, selain kekayaan budaya yang melimpah Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Setiap daerah punya daya tariknya sendiri. Kekayaan alam yang telah dimiliki ini ketika digabungkan dengan kekayaan budaya yang kental tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi turis asing. Contoh nyata dari pernyataan ini adalah Pulau Bali yang sukses menggabungkan kekayaan alam dan kekayaan budayanya menjadi daya tarik yang tidak hanya dipuja orang lokal, tapi juga masyarakat internasional.

4. Meningkatkan Pendapatan Negara

Dengan pengelolaan sistem dampak positif keberagaman budaya yang tepat, pemerintah sudah punya modal untuk mendapatkan pendapatan negara yang lebih lewat kekayaan budaya Indonesia yang sudah tersedia. Dengan dibangunnya situs-situs sejarah, sanggar budaya dan pengadaan festival budaya rutin yang merupakan peran pemerintah dalam mengelola keberagaman sosial budaya, tentu akan menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri yang bisa meningkatkan pendapatan negara.

Dampak Negatif Keberagaman Budaya di Indonesia

1. Masyarakat Cenderung Apatitis

Saking banyaknya keberagaman budaya di Indonesia, masyarakat tidak lagi terpesona dengan kekayaan budaya yang dimilikinya. Ada kalanya masyarakat terkesan cuek dengan budaya sendiri dan malah lebih bangga saat mengambil bagian dalam kebudayaan

negara lain. Tentunya proses interaksi sosial antara yang senang berbudaya dan yang cuek-cuek saja akan terganggu.

2. Pengelolaan yang Tidak Mudah

Pengelolaan kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam tentu bukan hal mudah. Pemerintah tidak bisa menghandle semuanya tanpa bantuan dari masyarakat. Jika masyarakat mengharapkan pemerintah saja yang ambil bagian penuh dalam pengelolaan keberagaman budayanya, pastilah pengelolaan dan pengembangannya tidak akan maksimal.

3. Adanya Kelompok-kelompok Radikal

Suku dan budaya yang tidak sedikit memungkinkan adanya kelompok-kelompok radikal yang tidak mau menerima adanya budaya lain untuk masuk di daerah mereka. Kelompok radikal memenuhi kriteria ciri-ciri kelompok sosial yang tidak sehat karena memaksakan kehendak mereka yang harus selalu benar. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan membuat kondisi NKRI yang tadinya penuh dengan rasa persatuan menjadi saling bertentangan.

4. Menjadi Alasan Terjadinya Perpecahan

Bukan tidak mungkin dalam kondisi budaya yang sangat beragam ini terjadi menimbulkan konflik di antara masyarakat. Masalah yang tadinya hanya melibatkan dua orang dari suku dan budaya yang berbeda bisa jadi rumit ketika identitas budayanya dibawa-bawa dalam topik perdebatan. Hal ini adalah salah satu dampak negatif, dan dampak positif keberagaman budaya yang sudah dijelaskan masih kita perangi sampai detik ini. Masih ada saja oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang senang memprovokasi dua pihak yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda sehingga timbul perpecahan, bukan hanya dari kedua pihak tersebut tapi juga perpecahan antar daerah asal kedua pihak. Pandangan negatif akan tetap ada, tinggal bagaimana kita menghadapinya dengan biasa saja dan tidak melebih-lebihkan

sehingga tidak memicu perpecahan di bumi Indonesia. Dampak positif ini dapat kita maksimalkan dengan meminimalisir adanya pembahasan lebih jauh dan penyebaran ajaran yang tidak berpihak pada persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat menghindari penyebab terjadinya konflik.

5. Munculnya sikap etnosentrisme

Yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya di sertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain.

6. Munculnya sikap fanatisme dan ekstrim

Fanatisme atau fanatic adalah suatu keyakinan yang kuat terhadap agama, kebudayaan, kelompok, dll. Ekstrim adalah sangat kuat, keras yang solidaritas terhadap persamaan atau kelompoknya sendiri.

7. Munculnya sifat egois

Merasa kebuayaannya paling benar, kuat dan hebat sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Munculnya sifat fanatik terhadap kelompok tertentu.

8. Sikap primordialisme

Memegang teguh pendirian sebuah hal yang sudah di yakini sejak dari lahir, seperti budaya, kepercayaan, dan tradisi. Dengan melihat baik dampak positif dan negatif dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, baiknya kita tetap fokus pada hal-hal positifnya saja. Pandangan negatif akan tetap ada, tinggal bagaimana kita menghadapinya dengan biasa saja dan tidak melebih-lebihkan sehingga tidak memicu perpecahan di bumi Indonesia. Dampak positif ini dapat kita maksimalkan dengan meminimalisir adanya pembahasan lebih jauh dan penyebaran ajaran yang tidak berpihak pada persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat menghindari penyebab terjadinya konflik.

E. Pentingnya Memperkuat Toleransi di Indonesia

1. Arti Penting Memahami Keberagaman

Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila, kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga.
- b. Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah.
- d. Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sikap dan keadaan seperti tersebut di atas harus dijunjung tinggi serta dilestarikan. Untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, kita dapat melaksanakan pertukaran kesenian

daerah dari seluruh pelosok tanah air. Dengan adanya kegiatan pertukaran kesenian daerah tersebut dan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain:

- a. Dapat saling pengertian antarsuku bangsa
- b. Dapat lebih mudah mencapai persatuan dan kesatuan
- c. Dapat mengurangi prasangka antar suku
- d. Dapat menimbulkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa

Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa kita. Kebudayaan- kebudayaan daerah merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat-syarat, seperti:

- a. Menunjukkan ciri atau identitas bangsa
- b. Berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dan pantas diangkat sebagai budaya nasional.

Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil cita, rasa, dan karya manusia dalam suatu masyarakat dan diteruskan dari generasi ke generasi melalui belajar. Jika kita telusuri, kebudayaan itu meliputi adat kebiasaan, upacara ritual, bahasa, kesenian, alat-alat, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam arti sempit kebudayaan diartikan sebagai kesenian atau adat istiadat saja. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Pada umumnya, kebudayaan daerah merupakan budaya asli dan telah lama ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kebudayaan kita sekarang ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan masa lampau.

Kebudayaan nasional harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa kita, sehingga menjadi milik bangsa. Kebudayaan nasional dilaksanakan pada saat kegiatan tingkat nasional, seperti perayaan peringatan kemerdekaan 17 Agustus, peringatan hari-hari nasional, dan kegiatan kantor pemerintah atau swasta. Sebagai warga negara Indonesia kita seharusnya bangga dengan adanya keanekaragaman kebudayaan. Berbagai-bentuk kebudayaan itu merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kita harus menghormati keanekaragaman budaya. Kita juga harus melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan budaya yang ada sekarang ini

Bagaimana cara menghormati keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Sikap menghormati keanekaragaman budaya dapat kita tunjukkan dengan sikap-sikap berikut ini.

- a. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya.
- b. Tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain.
- c. Mau menonton seni pertunjukan tradisional.
- d. Mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan.
- e. Bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri

Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita yang terkenal tinggi nilainya itu tetap lestari, tidak terkena arus yang datang dari luar. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah perlu juga kita kembangkan, karena kebudayaan daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Pembinaan kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Pertukaran kesenian daerah
- b. Pembentukan organisasi kesenian daerah
- c. Penyebarluasan seni budaya, antara lain melalui radio, TV, surat kabar serta majalah
- d. Penyelenggaraan seminar mengenai seni budaya daerah
- e. Membentuk sanggar tari daerah
- f. Mengadakan pentas kebudayaan

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan-Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tinggal menyebar di seluruh Indonesia, namun terkadang mendiami daerah tertentu. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika.

Sering kali kita menjumpai seseorang memperlakukan orang lain secara berbeda karena perbedaan jenis kelamin. Misalkan saat tugas piket kelas, maka anak laki-laki mengangkat meja dan perempuan menyapu. Kemudian yang menjadi sekretaris dan bendahara kelas adalah anak perempuan. Keadaan inilah yang dinamakan gender, yang dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap yang disebabkan perbedaan jenis kelamin. Perilaku dan sikap ini bukan karena jenis kelamin seseorang sehingga dia menjadi ketua kelas. Namun disebabkan oleh pandangan atau pendapat dalam masyarakat yang memberikan tugas-tugas tertentu berdasarkan jenis kelamin. Oleh

karena hanya pandangan atau pendapat masyarakat, maka mengakibatkan perbedaan gender antar masyarakat.

Seperti dalam masyarakat tertentu, nama marga mengikuti marga ayah, karena mengikuti garis keturunan laki-laki (patrilineal). Sedangkan masyarakat yang lain lebih mengutamakan anak perempuan dari pada laki-laki dalam kedudukan di keluarga. Dalam hal ini, kita bisa mengembangkan sikap berikut ini.

- a. Menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita jangan membedakan antara ras yang satu dengan yang lainnya
- b. Tidak menjelek-jelekkkan, menghina, dan merendahkan ras orang lain. Kita, manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama.

Sama halnya dengan sikap kita dalam menghormati keragaman ras. Berikut beberapa sikap yang dikembangkan dalam menghormati kelompok atau golongan yang lain.

- a. Menerima golongan atau orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita jangan membedakan antara golongan yang satu dengan golongan dengan yang lainnya
- b. Tidak menjelek-jelekkkan, menghina, dan merendahkan golongan atau kelompok yang lain. Kita, manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama.

Realitas suatu bangsa yang menunjukkan adanya kondisi keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan mengarahkan pada pilihan untuk menganut asas multikulturalisme. Dalam asas multikulturalisme ada kesadaran bahwa bangsa itu tidak tunggal, tetapi terdiri atas sekian banyak komponen yang berbeda. Multikulturalisme menekankan prinsip nilai-nilai kebersamaan di antara keragaman suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan tersebut. Semua suku bangsa, budaya, agama ras dan

golongan pada prinsipnya sama-sama ada dan karena itu harus diperlakukan dalam konteks duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Asas itu pulalah yang diambil oleh Indonesia, yang kemudian dirumuskan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Realitas historis menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berdiri tegak di antara keragaman suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan yang ada. Salah satu contoh nyata yaitu dengan dipilihnya bahasa Melayu sebagai akar bahasa persatuan yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Dengan kesadaran yang tinggi semua komponen bangsa menyepakati sebuah konsensus bersama untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang dapat mengatasi sekaligus menjembatani jalinan antarkomponen bangsa.

Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Untuk dapat bersatu kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila, kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Dalam pandangan Koentjaraningrat (1993:5) Indonesia dapat disebut sebagai negara plural terlengkap di dunia di samping negara Amerika. Di Amerika dikenal semboyan et pluribus unum, yang mirip dengan bhineka tunggal ika, yang berarti banyak namun hakikatnya satu.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika memang menjadi sangat penting ditengah beragamnya adat dan budaya Indonesia. Menjadi barang percuma, apabila semboyan penuh makna tersebut hanya menjadi pelengkap burung garuda penghias dinding. Bhineka Tunggal Ika bermakna berbeda beda tetapi tetap satu jua, sebuah semboyan jitu yang terbukti berhasil menyatukan bangsa dengan sejuta suku, bangsa yang kaya akan ideologi, menjadi sebuah bangsa yang utuh dan merdeka. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa.

Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain yakni:

- a. Dasar Negara Pancasila
- b. Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan
- c. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan
- d. Lambang Negara Burung Garuda
- e. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- f. Lagu-lagu perjuangan

Masih banyak alat-alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Persatuan dalam keragaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat terwujud kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, pergaulan antarsesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, dan pembangunan berjalan lancar.

2. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman

Penduduk Indonesia termasuk bersifat heterogen dan memiliki suku, ras dan budaya yang beraneka ragam. Keberagaman suku, budaya, agama, rasa dan golongan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada. Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 200 juta orang lebih, penduduk Indonesia tersebar di masing-masing pulau dan mempunyai ciri khas budayanya sendiri. Warisan agama dan budaya yang berkembang di Indonesia, berasal dari berbagai macam etnis, suku, dan bahasa di daerah-daerah yang menyebar di tanah nusantara.

Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini antara lain dipengaruhi oleh letak geografis di jalur perdagangan internasional. Dukungan kekayaan alam yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain, maka para pedagang asing datang ke Indonesia. Selain melakukan kegiatan berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Agama Hindu dan Budha masuk dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia, kemudian menyusul para pedagang Gurajat menyebarkan ajaran Islam. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Kong Hu Chu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena sebelumnya masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan

dinamisme, juga sifat keterbukaan masyarakat Indonesia menerima budaya lain

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu melestarikan persatuan dan kesatuan dalam negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, dengan mendalami keanekaragaman suku bangsa, rasa, agama dan golongan yang ada Indonesia, wawasan kita akan bertambah sehingga kita tidak akan menjadi bangsa yang kerdil. Kita dapat menjadi bangsa yang mau dan mampu menghargai kekayaan yang kita miliki, yang berupa keanekaragaman kebudayaan tersebut.

Untuk menciptakan suatu integrasi dalam masyarakat yang memiliki tingkat keanekaragaman kelompok sosial yang tinggi diperlukan dengan sikap pengorbanan sikap toleransi yang besar dan upaya yang kuat untuk melawan prasangka dan diskriminasi. Sikap toleransi berarti sikap yang rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Adapun sikap toleransi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman antara lain:

- a. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain
- b. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik
- c. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya.
- d. Lebih mengutamakan negara dari pada kepentingan daerah atau suku masing-masing.

Dengan adanya multikulturalisme, diharapkan mempertebal sikap toleransi dan rasa tolong menolong serta nasionalisme kita. Kita mesti bangga, memiliki suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan yang beragam. Keragaman suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Sebagai contoh bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Bahkan kita pun sempat kecolongan, budaya asli daerah kita diklaim atau diakui sebagai budaya asli bangsa lain. Karya-karya putra daerah pun juga banyak yang diklaim oleh bangsa lain.

BAB 4

Pendidikan Multikultural

A. Kajian tentang Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural dalam *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (Kuper, 2000) dimulai sebagai gerakan reformasi pendidikan di Amerika selama perjuangan hak-hak kaum sipil keturunan Afrika pada tahun 1960-1970. Perubahan kemasyarakatan yang mendasar seperti integrasi sekolah-sekolah negeri dan peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar atas lembaga-lembaga pendidikan. Pada saat para pendidik berjuang untuk menjelaskan tingkat kegagalan dan putus sekolah murid-murid dari etnis marginal, beberapa orang berpendapat bahwa murid-murid tersebut tidak memiliki pengetahuan budaya yang memadai untuk mencapai keberhasilan akademik.

Banks (1993) telah mendiskripsikan evolusi pendidikan multibudaya dalam empat fase. *Pertama*, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. *Kedua*, hal ini diikuti oleh pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. *Ketiga*, kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. *Keempat* perkembangan teori, riset dan praktek, perhatian pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multibudaya. Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Sebagai sebuah gerakan pembaharuan, istilah pendidikan multikultural masih dipandang asing bagi masyarakat umum, bahkan penafsiran terhadap definisi maupun pengertian pendidikan multikultural juga masih diperdebatkan di kalangan pakar pendidikan. Pendidikan yang mengusung tema multikultural belum sepenuhnya dikenal oleh khalayak luas masyarakat Indonesia. Ainnurofiq Dawam (2003:100) menjelaskan pendidikan multikultural secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan multikultural.

Pendidikan adalah proses pengembangan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan dan dengan cara mendidik. Secara makna pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi manusia agar dapat menghargai pluralitas dan heterogenitas. Sulalah (2012:48) mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu konsep untuk memberikan peluang pendidikan yang setara bagi semua peserta didik yang berbeda ras, etnik, kelas sosial, agama dan kelompok budaya. Banks & Banks (2005: 3) mendefinisikan bahwa:

“Multikultural education is at least three things: an idea or concept, an educational reform movement, and a process. Multikultural education incorporates the idea that all students regardless of their gender and sosial class and their ethnic, racial, or cultural characteristics should have an equal opportunity to learn in school.”

Berdasarkan pendapat Banks & Banks, maka pendidikan multikultural mencakup tiga hal yaitu gagasan atau konsep, gerakan reformasi pendidikan dan proses. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah tanpa memandang jenis kelamin dan kelas sosial serta karakteristik etnis, ras, atau budaya. Saat

pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapat perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakangnya.

Konsep pendidikan multikultural ditujukan untuk membekali peserta didik agar dapat bertoleransi dan menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural merupakan jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh keragaman. Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2010:191) menambahkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan sikap saling menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang terdapat dalam masyarakat. Agus Salim (2006:25) menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu proses yang memberikan penyadaran dalam keragaman hidup bersama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial dalam masyarakat multikultural.

Berdasarkan definisi pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan sikap toleransi, menghargai, dan menghormati keragaman ras, etnis, budaya, agama, bahasa, sosial, ekonomi, jenis kelamin sehingga dapat menerima dan hidup bersama dalam keragaman tersebut tanpa menimbulkan permasalahan. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik yang berasal dari ras, etnis, budaya, agama, bahasa, kelas sosial ekonomi dan jenis kelamin yang berbeda mendapat kesempatan yang setara dan adil untuk mengenyam pendidikan di sekolah dan dalam pembelajaran.

Seperti pendapat Andersen dan Cusher (1994), bahwa pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Sedangkan Hernandez (1989) mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas,

agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Sleeter dan Grant (2007) dan Smith (1998) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan (Zamroni, 2011: 144).

Sebagai suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa, pendidikan multikultural memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada.
2. Pendidikan multikultural mengandung dua dimensi: pembelajaran (kelas) dan kelembagaan (sekolah) dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif
3. Pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privileges untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan.
4. Berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
5. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya.

Konsep multikulturakisme menekankan pentingnya memandang dunia dari bingkai referensi budaya yang berbeda, dan mengenali serta menghargai kekayaan ragam budaya di dalam negara dan di dalam komunitas global. Multikulturakisme menegaskan perlunya menciptakan sekolah di mana berbagai perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi seksual, keterbatasan, dan kelas sosial diakui dan seluruh siswa dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang rumit dan kompleks, karena tidak semua faktor yang terlibat bisa dikendalikan oleh guru. Dalam analisisnya, Adams and Barbara (2006). Menyebutkan bahwa ada empat faktor yang terdapat dalam proses pembelajaran, yaitu: 1) faktor bawaan siswa, 2) faktor bawaan guru, 3) faktor pedagogi, dan 4) faktor isi kurikulum.

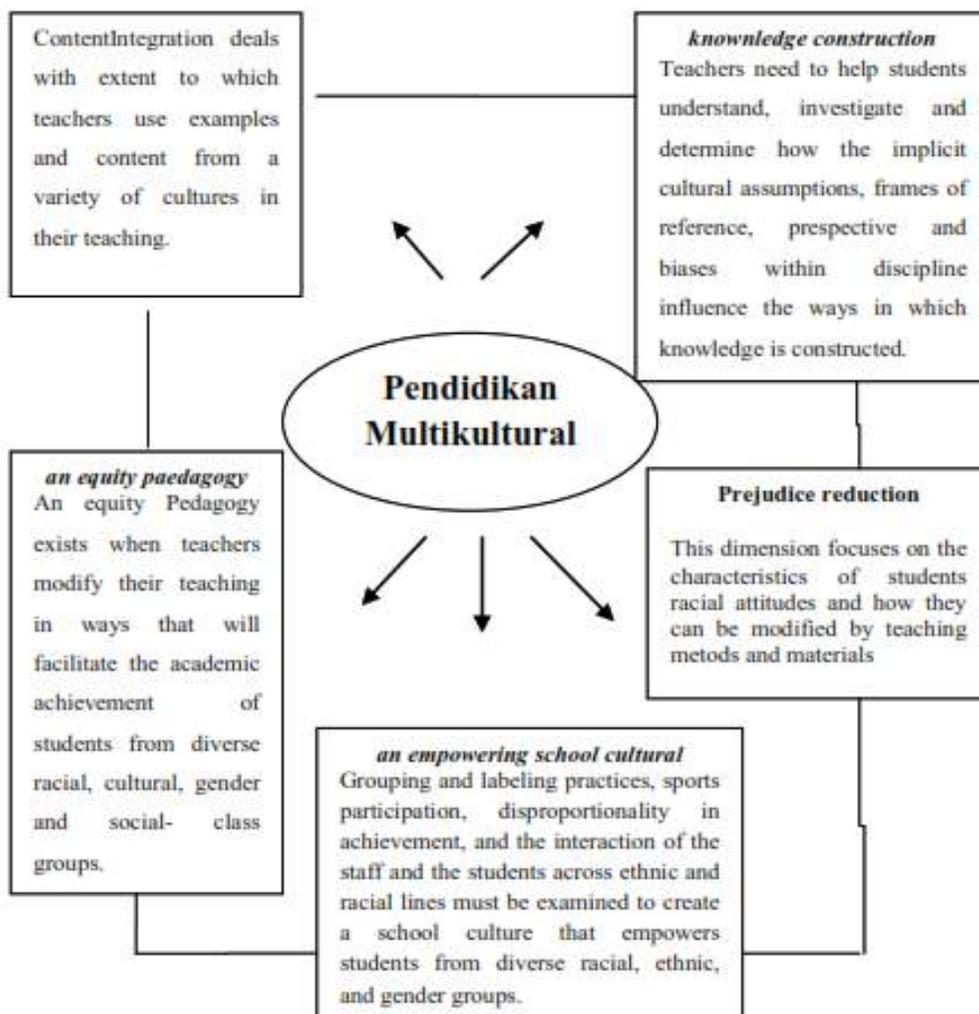
B. Model Pembelajaran Berbasis Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural memiliki model pembelajaran. Model pembelajaran berorientasi pendidikan multikultural adalah bertumpu pada keragaman yang ada pada peserta didik. Gay (2002) dalam Zamroni (2011: 150) mengemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural tidak diterapkan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah namun pendidikan multikultural diusung sebagai suatu cara untuk memajukan peserta didik secara keseluruhan.

Tilaar (2003:181) berpendapat pendidikan multikultural tidak dalam bentuk mata pelajaran terpisah tetapi diintegrasikan dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan seperti mata pelajaran ilmu sosial. Ainul Yaqin (2005:25) menambahkan pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran dengan memanfaatkan perbedaan dan keragaman yang terdapat pada peserta didik serta dapat melatih peserta didik agar memiliki sikap yang demokratis, humanis, dan pluralis. Ainnurofiq Dawam (2003:95) menjelaskan model pendidikan multikultural adalah

dapat memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan dan agama. Dengan kata lain model pendidikan multikultural dibentuk agar peserta didik dapat memahami, menghormati dan menghargai antar masyarakat dalam perbedaan di segala bidang. Choirul Mahfud (2009:187) menjelaskan pembelajaran berbasis pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk membentuk dan menciptakan masyarakat berbudaya, maksudnya adalah membentuk masyarakat yang dapat memahami dan menerima budaya dan keragaman yang ada; materi dalam pembelajaran berbasis multikultural terdapat nilai kemanusiaan, nilai bangsa dan nilai kultural; metode yang digunakan adalah demokratis agar dapat menghargai perbedaan dan keragaman; evaluasi pembelajaran berbasis multikultural dilihat dari persepsi, apresiasi dan tindakan peserta didik terhadap budaya lainnya.

Pendidikan multikultural hadir sebagai suatu gagasan baru guna mengelola masyarakat yang heterogen. Pendidikan multikultural memiliki dimensi-dimensi dalam melaksanakannya. Dimensi-dimensi pendidikan multikultural yang dirumuskan oleh Banks & Banks (2005: 23) yaitu:



Gambar 4.1
Dimensi-Dimensi Pendidikan Multikultural

Pertama, *content integrations*, dalam hal ini guru memasukan contoh-contoh dan materi dari berbagai macam budaya dalam pembelajaran. Kedua, *knowledge constructions*, guru membantu peserta didik dalam memahami dan menelaah implikasi dan prespektif budaya ke dalam pembelajaran. Ketiga, *an equity pedagogy*, guru mengubah cara mengajar untuk memberikan pelayanan akademik bagi peserta didik dari

berbagai ras, budaya, gender dan kelompok sosial kelas. Guru dapat menganalisis gaya belajar peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran yang dipakai. Keempat, *prejudice reduction* guru membantu peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap keragaman ras, etnik, budaya. Perangkat pembelajaran seperti materi dan metode berisi tentang keragaman dan perbedaan yang dapat membantu peserta didik mengembangkan sikap positif. Kelima, *an empowering school culture*, sekolah menciptakan iklim sekolah yang terdapat kesetaraan dari kelompok ras, etnis, dan jenis kelamin yang beragam. Seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam semua aktivitas di sekolah. Iklim sekolah dapat mempromosikan gender, ras dan kelas sosial.

Sulalah (2012:51) menjelaskan keberhasilan pendidikan multikultural tidak hanya dilihat dari sudut pembelajaran saja, namun peran struktur sosial dalam lembaga terlebih lagi sekolah yayasan juga berpengaruh. Sulalah (2012:111) menambahkan pencapaian hasil pendidikan multikultural bukan hanya dari kesiapan pembelajaran saja namun juga dari human sebagai actor sosial. Artinya perilaku peserta didik juga dapat dijadikan titik keberhasilan penerapan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural melibatkan beberapa faktor seperti objek yang menjadi kajian, budaya dimana materi tersebut diterapkan, pemahaman nilai materi dan metode yang digunakan. Berdasarkan faktor tersebut maka dapat dilihat perilaku sosial dari masing-masing pelaku yang menandakan tingkat keberhasilan pendidikan multikultural.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan multikultural tidak dalam bentuk pembelajaran yang terpisah, namun dimasukan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran dengan memanfaatkan keragaman yang ada pada peserta didik. Pelaksanaan model pembelajaran berbasis multikultural ditujukan agar peserta didik dapat memahami, menghormati, menghargai dan bertoleransi terhadap keragaman. Sehubungan dengan

hal tersebut, guru membantu peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap keragaman.

Tujuan pembelajaran berbasis multikultural yaitu membentuk masyarakat yang berwawasan budaya dan keragaman sehingga dapat menghargai, bertoleransi, dan menghormati keragaman. Materi yang diajarkan mengandung nilai kultural. Oleh sebab itu guru dapat memasukan contoh budaya, etnis dan keragaman lainnya ke dalam pembelajaran dan membantu peserta didik untuk memahaminya. Metode yang digunakan adalah demokratis yang menghargai perbedaan dan keragaman. Guru dapat menggunakan metode yang variasi untuk memfasilitasi peserta didik dari berbagai ras, budaya, gender dan kelompok sosial kelas. Guru dapat menganalisis gaya belajar peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran yang dipakai.

Evaluasi pembelajaran berbasis multikultural dilihat dari sikap peserta didik terhadap budaya lainnya yang meliputi persepsi, apresiasi dan tindakan peserta didik terhadap keragaman lainnya. Sekolah dapat menciptakan iklim sekolah yang terdapat kesetaraan dari kelompok ras, etnis, dan jenis kelamin yang beragam dan mempromosikan keragaman. Seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam semua aktivitas di sekolah. Keberhasilan pendidikan multikultural dipengaruhi oleh peran struktur sosial dalam lembaga terlebih lagi sekolah yayasan.

C. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

Pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat dilaksanakan tidak hanya melalui pendidikan formal namun juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga (pendidikan nonformal dan informal). Dalam pendidikan formal pendidikan multikultural ini tidak harus menjadi mata pelajaran sendiri namun dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lain yang mempunyai tujuan pendidikan yang sama. Pada tingkat sekolah Usia Dini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan misalnya dalam permainan, dan pada tingkat SD, SLTP maupun Sekolah Menengah, pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam bahan ajar seperti PPKn, Agama, Sosiologi dan Antropologi. Di Perguruan Tinggi misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif multikultural, misalnya melalui mata kuliah umum seperti Kewarganegaraan, ISD, IBD, Agama dan Bahasa.

Pada pendidikan non formal wacana ini dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan dengan model pembelajaran yang mengedepankan multikultural berupa penghormatan terhadap perbedaan baik ras suku, maupun agama antar anggota masyarakat. Tak kalah penting wacana pendidikan multikultural ini dapat diimplementasikan dalam lingkup keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil dalam masyarakat, merupakan media pembelajaran yang paling efektif dalam proses internalisasi dan transformasi nilai, serta sosialisasi terhadap anggota keluarga. Peran orangtua dalam menanamkan nilai-nilai yang lebih berbasis multikultural dengan mengedepankan penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan yang ada di sekitar lingkungannya (agama, ras, golongan) terhadap anak atau anggota keluarga yang lain merupakan cara yang paling efektif dan elegan untuk mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan.

D. Paradigma Baru Pendidikan Multikultural

Sebagaimana paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan Zamroni (2011) adalah sebagai berikut: 1) pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat, 2) pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran, 3) pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran ke arah kemana transformasi praktik pendidikan harus dituju, dan 4) pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Demikian pula dikemukakan Ali Maksum dan Ruhendi (2004) bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budayanya. Sementara, dalam perspektif vertikal kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya.

Ali maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajuan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu : horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budaya. Vertikal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Pakar pendidikan, Syarif Sairin (1992) memetakan akar-akar konflik dalam masyarakat majemuk;

1. Perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi.
2. Perluasan batas-batas sosial budaya.
3. Benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama.

Paradigma pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama, budaya, dan kebutuhan. Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian serta aspek lainnya. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi peserta didik untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai.

Agar proses ini berjalan sesuai dengan harapan, seyogianya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan serta ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Paradigma pendidikan multikultural secara implisit juga menjadi salah satu concern dari Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu institusi pendidikan. Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, dapat dipandang dari berbagai persepsi dan sudut pandang melintasi garis waktu. Pada tingkat mikro, pencapaian kualitas pembelajaran merupakan tanggungjawab profesional seorang guru, misalnya melalui penciptaan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan fasilitas yang didapat siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Pada tingkat makro, melalui sistem pembelajaran yang berkualitas, lembaga pendidikan bertanggungjawab terhadap pembentukan tenaga pengajar yang berkualitas, yaitu yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan intelektual, sikap, dan moral dari setiap individu peserta didik sebagai anggota masyarakat.

Sebagai wacana baru, pendidikan multikultural ini tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada tentu saja melalui bahan ajar atau model pembelajaran yang paling memungkinkan diterapkannya pendidikan multikultural ini. Beberapa pakar pendidikan sejarah maupun sejarawan memberikan pendapat tentang fenomena pembelajaran sejarah yang terjadi di Indonesia diantaranya masalah model pembelajaran sejarah, kurikulum sejarah, masalah materi dan buku ajar atau buku teks, profesionalisme guru sejarah dan lain sebagainya.

BAB 5

Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural

A. Dimensi Pendidikan Multikultural

James A. Banks mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan siswa, yaitu:

1. Dimensi integrasi isi/materi

Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan 'poin kunci' pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

2. Dimensi konstruksi pengetahuan

Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar

terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri;

3. Dimensi pengurangan prasangka

Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus.

Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.

4. Dimensi pendidikan yang sama/adil

Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperatve learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan

yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

5. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial
Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staff dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

B. Tujuan Pendidikan Multikultural

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidak-toleranan seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global (Kuper, 2000). Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Selain itu juga harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar

umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Tujuan pendidikan multikultural menurut Moeis (2006:IM9) meliputi: 1) memperkuat kesadaran multikultural, tanpa kelilangan jatidiri; 2) meningkatkan kecakapan dalam interaksi lintas budaya; 3) menghilangkan stereotipe, stigma, rasa superioritas diri/kelompok, dan anggapan negatif lain dalam hubungan antar kelompok; 4) memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks dinamika global; 5) menjunjung tinggi supremasi hukum; 6) meningkatkan kecakapan transformasi diri dan sosial, melalui tahap-tahap:

1. Mengenal diri lingkungan dan sistem yang terkait dengan pola berpikir tentang hubungan antar budaya
2. Mengenal bentuk-bentuk power dan control yang mempengaruhi pola berpikir tentang hubungan antarbudaya
3. Menilai pengaruh-pengaruh power dan control yang muncul dalam pikiran, sikap dan tindakan tentang hubungan antar etnik, menilai mana pengaruh tersebut yang berguna dalam interaksi antar etnik, mana yang harus ditinggalkan
4. Mengambil tindakan transformatif (diri dan sosial) berdasarkan penilaian yang tepat tentang pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dalam interaksi sosial antar budaya.

Dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Dengan demikian sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai demokrasi. Kurikulum menampilkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek; dimana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, dari pada membicarakan persaingan dan

prasangka di antara sejumlah pelajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya dan kelompok status sosialnya (Banks, 1994).

Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Pendidikan multikultural juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai Bering menjadi adi penyebab konflik antar kelompok masyarakat (Zubaidi, 2005).

Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis (Banks, 1994). Tujuan pendidikan berbasis multikultural dapat diidentifikasi: 1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; 2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; 3) memberikan ketahanan siswa dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; 4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok (Banks, 1993).

Di samping itu, pembelajaran berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep pendidikan untuk kebebasan (Banks, 1994); yang bertujuan untuk: 1) membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat; 2) memajukan kebebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain.

Pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan formal namun juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam pendidikan formal pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui kurikulum mulai Pendidikan Usia Dini, SD, SLTP, SMU maupun Perguruan Tinggi. Sebagai wacana baru, Pendidikan Multikultural ini tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada tentu saja melalui bahan ajar atau model pembelajaran yang paling memungkinkan diterapkannya pendidikan multikultural ini.

Di Perguruan Tinggi misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif multikultural, misalnya melalui mata kuliah umum seperti Kewarganegaraan, ISBD, Agama dan Bahasa. Demikian juga pada tingkat sekolah Usia Dini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan misalnya dalam Out Bond Program, dan pada tingkat SD, SLTP maupun Sekolah menengah pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam bahan ajar seperti PPKn, Agama, Sosiologi dan Antropologi, dan dapat melalui model pembelajaran yang lain seperti melalui kelompok diskusi, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.

Dalam pendidikan non formal wacana ini dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan dengan model pembelajaran yang responsive multikultural dengan mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan baik ras suku, maupun agama antar anggota masyarakat. Tak kalah penting wacana pendidikan multikultural ini dapat diimplementasikan dalam lingkup keluarga. Di mana keluarga sebagai institusi sosial terkecil dalam masyarakat, merupakan media pembelajaran yang paling efektif dalam proses internalisasi dan transformasi nilai, serta sosialisasi terhadap anggota keluarga. Peran orangtua dalam menanamkan nilai-nilai yang lebih responsive multikultural dengan mengedepankan penghormatan dan pengakuan

terhadap perbedaan yang ada di sekitar lingkungannya (agama, ras, golongan) terhadap anak atau anggota keluarga yang lain merupakan cara yang paling efektif dan elegan untuk mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan.

C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural

Filsafat post-modernisme yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemikiran filsafat modernisme, melahirkan beberapa bentuk pemikiran yang sangat mendasar, seperti realisme, relativisme, dan humanisme. Salah satu dampak positif yang menonjol dari pemikiran post-modernisme adalah lahirnya pengakuan akan pluralitas kehidupan. Bagi post-modernisme, kenyataan adanya masyarakat plural itu menjadi suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Hal ini harus diperkuat dengan membangun prinsip kesadaran pluralisme dan multikulturalisme, yakni paham yang mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sekaligus memperlakukan orang lain secara sama secara proporsional.

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu fokus dari Pasal 4 Undang-undang N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab III yang membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan. Melalui pasal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural (budaya) dan kemajemukan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai dasar Negara, yakni Pancasila. Melalui dasar yuridis ini, maka pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia secara legal formal perlu memperhatikan aspek-aspek demokratis, keadilan, HAM, nilai-nilai atau norma (*values*) serta pengakuan terhadap aspek keragaman. Pengakuan terhadap segala bentuk keragaman tentu saja tidak cukup, karena itu diperlukan upaya untuk menyikap keragaman dengan perlakuan yang berlandaskan pada asas keadilan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II disebutkan bahwa “perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Berdasarkan pernyataan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut maka pengertian “ Persatuan Indonesia” dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia.

Selain itu landasan yang paling penting adalah sesuai dengan ideologi Negara yaitu pancasila serta konstitusi negara yaitu UUD 1945, untuk itu Ali maksum (2011:206) menjelaskan bahwa untuk mengembangkan pendidikan multikultural diperlukan tiga landasan yuridis yang menjadi pijakan, yaitu: pertama, pancasila sebagai landasan ideal bangsa, serta merupakan falsafah yang harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disamping merupakan landasan konstitusional, UUD 1945 juga mengandung nilai, norma, etika bermasyarakat maupun berbangsa. Ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan undang-undang ini mengandung implikasi perlunya membangun desain pendidikan yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat, norma masyarakat, dan kebutuhan masyarakat.

Bila dilihat dari aspek sosiologis, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Pendidikan multikultural sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kenyataan yang ada mendesak perlunya pendidikan multikultural. Berbagai pertikaian antar kelompok menunjukkan masih dangkalnya pengetahuan keragaman bangsa indonesia terhadap keragaman di indonesia. Untuk itu sudah saatnya dikembangkan sarana pendidikan multikultural untuk mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki kompetensi kultural

yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok dan sistem nilai. (moeis, 2014:101).

Didalam UUD 1945 di Indonesia memang dijamin untuk hidup dalam kenanekaragaman, karna dari dahulu bangsa indonesia sudah beraneka ragam dan memiliki ciri-ciri yang unik. Untuk itu dibutuhkan kompetensi untuk hidup secara harmonis. Tapi disisi lain juga rentan terjadi konflik, karna kuatnya interaksi inter kelompok. Maka dari itu pendidikan multikulturalberpaya melihat kembali bagaimana kehidupan sosial masyarakat indonesia saat ini apalagi dengan adanya globalsasi saat ini, menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi pendidikan multikultural untuk menyadarkan manusia untuk mengenal jati diri bangsanya sendiri agar tidak kehilangan arah dalam melangkah.

Jadi rasional pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilihat dari aspek filosofis yang mana ideologis suatu bangsa menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Sesuai dengan filsafat bangsa indonesia adalah Pancasila yang dijadikan dasar untuk melangkah. Yang tertuang dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa untuk mengembangkan pendidikan multikultural diperlukan tiga landasan yuridis yang menjadi pijakan, yaitu pancasila, UUD 1945 dan SISDIKNAS. Dari segi sosiologis pada dasarnya bangsa Indonesia merupakan plural yang mana memiliki tingkat kemultikulturalan yang tinggi itu dapat dilihat dari banyak suku, budaya, agama. Dengan adanya keragaman yang ada menjadikan bangsa indonesia merasa perlu pendidikan multikultural untuk mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki kompetensi kultural yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok dan sistem nilai. Yang mampu mengenal jati diri bangsa yaitu Pancasila. Sehingga konflik yang terjadi bisa diatasi dan masyarakat indonesia punya rasa toleransi, terhadap perbedaan yang ada.

D. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikultural

Secara umum tujuan pendidikan Multikultural adalah untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya berbagai konflik di masyarakat serta menumbuhkan sikap dan pemikiran siswa untuk lebih terbuka dalam memahami dan menghargai keberagaman dan perbedaan. Adapun secara khusus pendidikan multikultural menurut Ekstrand (1997:349) sempat menyatakan bahwa tujuan suatu pendidikan multikultural dapat diidentifikasi melalui tiga tujuan, yaitu :

1. Tujuan Attitudinal

Pada tingkat attitudinal, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan terhadap identitas kultural, pengembangan sikap budaya responsif, dan keahlian untuk melakukan penolakan dan resolusi konflik.

2. Tujuan Kognitif

Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan kemampuan untuk membangun kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri.

3. Tujuan Instruksional

Pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan untuk melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotype-stereotype, peniadaan-peniadaan, dan misinformasi tentang kelompok-kelompok etnik dan kultural yang dimuat di dalam berbagai buku dan media pembelajaran; menyediakan strategi-strategi untuk melakukan hidup di dalam pergaulan multikultural, mengembangkan keterampilan-keterampilan komunikasi inter-personal, menyediakan teknik-teknik untuk melakukan evaluasi, dan

membantu menyediakan klarifikasi dan penjelasan-penjelasan tentang dinamika-dinamika perkembangan kebudayaan.

E. Penanaman Nilai Multikultural

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman telah menjadi pemantik berbagai ketegangan dan konflik dalam masyarakat multikultur. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor ideologis, ekonomi dan bahkan politik. Meskipun persoalan multikultural di Indonesia dan Malaysia sudah berakar sejak masa penjajahan dan kini kuat dipengaruhi oleh faktor politis, penulis dalam hal ini meyakini bahwa penanaman nilai-nilai multikulturalisme dengan menempatkan semua suku bangsa, budaya, agama, ras, bahasa, hukum adat pada posisi yang sederajat dapat menjadi alternatif dalam menyiasati keberagaman itu. Salah satu cara menanamkan nilai tersebut adalah melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin cerdas serta berbudi pekerti luhur.

Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuannya, nilai dan sikapnya serta keterampilannya (Sadulloh, 2009:57). Lebih luas, pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri berkepribadian dan berakhlak mulia serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara (Amirin, 2012:2).

Penanaman nilai-nilai multikulturalisme bukanlah sistem pendidikan itu sendiri, namun proses yang penanaman atau transformasi nilai melalui proses pendidikan formal maupun non formal, karena pendidikan adalah penanaman pengetahuan, keterampilan dan sikap pada masing-masing generasi dengan menggunakan pranata-pranata seperti sekolah-sekolah yang disengaja diciptakan untuk tujuan tersebut (Manan, 1989:9). Hal ini mengacu pada pandangan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar "didik" yang

mempunyai arti memelihara dan memberi latihan. Kedua hal tersebut memerlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan tentang kecerdasan pikiran.

Dengan demikian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan melihat definisi tersebut, sebagian orang mengartikan bahwa pendidikan adalah pengajaran karena pendidikan pada umumnya membutuhkan pengajaran dan setiap orang berkewajiban mendidik dan melakukan penanam nilai kepada orang lain. Penanaman nilai bisa dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal agar manusia bisa saling menghargai sesama manusia (etnik) yang negara (bangsa) memiliki masyarakatnya yang plural.

Dalam hal ini penanaman nilai multikulturalisme melalui pendidikan diartikan sebagai kegiatan penanaman nilai untuk mengubah sikap dan perilaku manusia dari pola pikir, sikap dan perilaku yang menganggap sukunya yang paling benar (etnosentrisme) menjadi pola pikir, sikap dan perilaku yang menempatkan semua suku bangsa, agama, adat dan sebagainya pada posisi yang sederajat, tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Penanaman nilai multikulturalisme dapat dilakukan terhadap 3 ranah pendidikan, yaitu afektif, kognitif dan psikomotor. Sikap (afektive) adalah upaya untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan tentang kultural (budaya), toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya lain, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik.

Kognitif (*cognitive*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan psikomotorik (*psicomotoric*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran

dengan memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, dan menjelaskan dinamika kultural (Saha, 1997: 349).

Dalam proses penanaman nilai multikulturalisme, pendidikan formal mempunyai pengaruh yang sangat besar karena menurut Manan (1989:11) tugas utama pendidikan adalah untuk mengekalkan hasil prestasi kebudayaan, pendidikan pada dasarnya bersifat konservatif. Namun sejauh pendidikan mempersiapkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kejadian-kejadian yang dapat diantisipasi didalam dan diluar kebudayaan, pendidikan telah merintis untuk perubahan kebudayaan. Pendidikan formal juga diatur dalam sebuah kurikulum, dalam pengembangan kurikulum masyarakat juga sebagai salah satu indikator dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kenapa masyarakat menjadi sebuah indikator? Sebab yang menjalankan kurikulum dan melaksanakan pendidikan adalah masyarakat itu sendiri, pada bangsa yang masyarakatnya plural, penting sekali penanaman nilai multikulturalisme di dalam sistem pendidikan.

Dalam pendidikan formal penanaman nilai multikulturalisme bisa berupa dengan menunjukkan sikap dengan memperlakukan semua anak sama dalam kegaitan proses pembelajaran, baik diluar kelas maupun di dalam kelas, perlakukan yang sama dalam melibatkan anak dalam semua kesempatan dalam bentuk aktifitas pendidikan dan diluar pendidikan. Dengan demikian kepribadian yang menilai semua keberagaman adalah pada posisi yang setara akan terbentuk.

Melalui pendidikan formal, penanaman nilai multikulturalisme dapat dimasukkan ke dalam materi-materi pelajaran tentang multikulturalisme yang menguraikan berbagai hal yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral dan tingkat

serta mutu produktivitas dengan menggunakan pendekatan humanist. Pendekatan humanist dimaksudkan adalah proses memanusiakan manusia menurut konsep Paulo Freire (Ende 2011:3). Pendekatan yang dilakukan tidak dalam bentuk merubah sistem melainkan melalui pendekatan individual kepada individu seperti siswa, pemuda, orang tua dan sebagainya yang diharapkan menjadi jembatan untuk mengembangkannya pada orang lain.

Dalam pendekatan humanist, individu tersebut diharapkan bisa mengembangkan kreatifitas agar bisa tetap bisa bertahan dalam hidupnya. Oleh karena itu daya kritis dan partisipatif dalam harus muncul dalam jiwa individu. Pada pendidikan formal diharapkan siswa di sekolah/madrasah setelah mendapatkan materi pembelajaran bisa memiliki pengetahuan, sikap dan psikomotorik. Pelajar mengetahui dan mengenal bentuk-bentuk keberagaman, menyikapi keberagaman, dan memperlakukan kerberagaman seusi dengan nilai-nilai multikulturalisme. Selama proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal semua perangkat pembelajaran mengacu pada nilai-nilai multikulturalisme, seperti sikap saling menghargai dan menempatkan semua orang dengan latar belakang berbeda dalam kesetaraan.

Dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal setiap mata pelajaran juga menyisipkan nilai-nilai multikulturalisme baik didalam metode maupun strategi pembelajaran dengan pendekatan humanist. Guru dapat menggunakan strategi pembelajaran dengan metode yang beragam, seperti ceramah, simulasi, bermain peran, observasi, dan terjun kelapangan (Aly, 2003: 70). Contohnya pendidik menjelaskan dan mendiskusikan keanekaragaman budaya mulai suku lokal hingga suku yang lain yang hidup bersama didalam masyarakat multikultur. Selain itu, pendidik menginformasikan kepada individu bahwa semua orang dari etnis mana pun juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain, ini menggambarkan sikap toleran dan saling menghargai suku yang menghasilkan karya lokal dengan menggunakan media pembelajaran.

Sementara itu, melalui simulasi dan bermain peran, para siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki peran agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Guru meminta siswa membentuk kepanitiaan bersama dalam menjalankan proyek yang diberikan guru, yang di dalam kepanitiaan tersebut siswa terdiri dari berbagai agama, suku, ras dan budaya. Sedangkan observasi dan penanganan kasus, siswa diminta menganalisis nilai-nilai multikulturalisme yang ada dimasyarakat. Dan di dalam perangkat pembelajaran guru mempersiapkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai multikulturalisme didalam lingkungan keluarga dan tempat dimana mereka tinggal.

BAB 6

Pendidikan Multikultural di Sekolah

A. Sejarah Pendidikan Multikultural

Wacana tentang pendidikan multikultural semakin mengemuka seiring dengan terus bergulirnya arus demokratisasi dalam kehidupan bangsa, yang berimplikasi terhadap penguatan *civil society* dan penghormatan terhadap HAM. Demokrasi yang sudah menjadi pilihan bangsa sejak gerakan reformasi pada akhir abad ke-20 yang baru lalu, tidak sekedar tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, gagasan dan kritik sosial mereka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kebutuhan publik, tetapi benarbenar menjadi ruh kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara ini, membangun persatuan dan kesatuan, membangun kekuatan dalam kemajemukan, serta menghilangkan sekat-sekat kultur, ras, bahasa dan agama demi kepentingan bangsa ke depan, yang dituntut untuk semakin kompetitif dalam menghadapi persaingan global.

Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Canada, Australia adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikultural, karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya,

atau kultur nenek moyang tanah asalnya. Dalam sejarahnya, menurut Melani Budianta, multikulturalisme diawali dengan teori *melting pot* yang sering diwacanakan oleh J. Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.

Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Azyumardi Azra, telah menyadari tentang kemajemukan ragam etnik dan budaya masyarakatnya. Indonesia diproklamirkan sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Akan tetapi, gagasan besar tersebut kemudian tenggelam dalam sejarah dengan politik mono-kulturnya di zaman Soekarno dan Soeharto. Demokrasi terpimpin yang diusung Soekarno telah mematikan kreativitas-kreativitas lokal daerah yang berbasis etnik dan budaya tertentu.

Demikian pula dengan manajemen pemerintahan yang sentralistik zaman Soeharto, sehingga falsafat *Bhinneka Tunggal Ika*, kemudian hanya menjadi slogan tetapi tidak pernah mewujudkan dalam teori ketatanegaraan, hubungan sosial maupun pranata sosial lainnya. Ketika simpul-simpul yang mengikat demokratisasi itu dibuka dan dilepas zaman reformasi, maka gagasan multikulturalisme kini mengemuka, dan langsung memasuki wilayah pendidikan, yang seharusnya teori-teori multikulturalismenya itu dirumuskan terlebih dahulu oleh para ahli bidang ilmu-ilmu sosial politik. Dengan demikian, Indonesia tidak akan memiliki pretensi untuk kembali pada teori *melting pot* atau *salad bowl*. Indonesia, sebagaimana dikuatkan oleh para ahli yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan multietnik, justru menjadikan multikulturalisme sebagai *common platform* dalam mendesain pembelajaran yang berbasis *Bhinneka Tunggal Ika*, bahkan nilai-nilai

tersebut diupayakan melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan didukung pula oleh pendidikan agama.

Pendidikan multikultural masih diartikan sangat ragam, dan belum ada kesepakatan, apakah pendidikan multikultural tersebut berkonotasi pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan untuk membentuk sikap agar menghargai keragaman budaya. Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat.

Sementara itu, Calarry Sada dengan mengutip tulisan Sleeter dan Grant menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), yakni:

1. Pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural
2. Pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial
3. Pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat
4. Pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.

Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Tilaar adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Sementara Conny R. Semiawan memiliki perspektif tersendiri tentang pendidikan multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini.

Apapun definisi yang diberikan para pakar pendidikan adalah fakta bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak etnik, dengan keragaman budaya, agama, ras dan bahasa. Indonesia memiliki falsafah berbeda suku, etnik, bahasa, agama dan budaya, tapi memiliki satu tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki identitas yang kuat, dihargai oleh bangsa lain, sehingga tercapai cita-cita ideal dari pendiri bangsa sebagai bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, agama dan budaya, seluruhnya harus bersatu pada, membangun kekuatan di seluruh sektor, sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri bangsa yang tinggi dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, mereka harus saling menghargai satu sama lain, menghilangkan sekat-sekat agama dan budaya. Semua itu, bukan sesuatu yang taken for granted tetapi harus diupayakan melalui proses pendidikan yang multikulturalistik, yakni pendidikan untuk semua, dan pendidikan yang memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sikap toleran, respek terhadap perbedaan etnik, budaya, dan agama, dan memberikan hak-hak sipil termasuk pada kelompok minoritas.

Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Implementasi pendidikan multikultural di berbagai negara berbeda-beda.

Bila melihat salah satu contoh pendidikan multikultural di Amerika, sebagaimana dikutip oleh Tilaar dari hasil penelitian Banks, implementasi pendidikan multikultural di Amerika meliputi berbagai dimensi, yakni:

1. Dimensi kurikulum, yakni bahwa norma-norma kultur yang akan disampaikan pada siswa diintegrasikan dalam sebuah mata pelajaran, dengan rumusan kompetensi yang jelas.
2. Dimensi ilmu pengetahuan, yakni bahwa perumusan keilmuan dari norma dan aturan kultur yang akan disampaikan itu dirumuskan melalui proses penelitian historis dengan melihat pada pengalaman sejarah tokoh-tokoh yang sangat konsisten dalam memperjuangkan multikulturalisme.
3. Perlakuan pembelajaran yang adil, yakni bahwa perlakuan dalam pembelajaran harus disampaikan secara *fair* dan adil, tanpa membedakan perlakuan terhadap mereka yang berasal dari etnik tertentu, atau dari strata ekonomi tertentu.
4. Pemberdayaan budaya sekolah, yakni bahwa lingkungan sekolah sebagai *hidden curriculum*, harus memberi dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan multikulturalisme, baik dalam penyediaan fasilitas belajar, fasilitas ibadah, layanan administrasi maupun berbagai layanan lainnya.

Mengutip pengalaman Amerika, prosedur yang harus ditempuh dalam implementasi pendidikan multikultur di Indonesia adalah, penyiapan kurikulum, yakni menyisipkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki siswa tentang multikulturalisme pada mata pelajaran yang relevan, karena multikulturalisme baru sebuah gerakan dan belum menjadi sebuah ilmu yang komprehensif. Kemudian, diikuti dengan perumusan berbagai materi yang sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai, dan diikuti dengan rumusan proses pembelajaran yang lebih memberikan peluang bagi para siswa untuk pembinaan dan pengembangan sikap, di samping pengetahuan dan keterampilan sosial yang terkait dengan upaya pengembangan sikap multikulturalistik.

Indonesia sendiri belum memiliki pengalaman pendidikan multikultural yang terdesain secara terencana, karena belum ada pengalaman yang dikontrol dalam sebuah penelitian akademik. Akan

tetapi, jika mengutip Will Kymlicka, yang mencoba mendeskripsikan *Multikultural Citizenship*, pengalaman di Amerika Utara, maka materi-materi yang seharusnya dihantarkan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut.

1. Tentang hak-hak individual dan hak-hak kolektif dari setiap anggota masyarakat, yakni setiap individu dari suatu bangsa memiliki hak yang sama untuk terpenuhi seluruh hak-hak asasi kemanusiaannya, seperti hak untuk memeluk sebuah agama, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak atas kesempatan berusaha dan yang sebagainya. Demikian pula, secara kolektif, walaupun mereka berasal dari kelompok etnik minoritas dan tidak memiliki perwakilan dalam birokrasi dan lembaga legislatif, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas untuk menyampaikan aspirasi politiknya, mengembangkan budayanya, dan yang sebagainya.
2. Tentang Kebebasan individual dan budaya, yakni bahwa setiap individu termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan untuk mengembangkan dan memajukan budayanya. Kelompok etnik mayoritas harus menghargai hak-hak minoritas untuk mengembangkan kreativitas dan budayanya itu.
3. Tentang keadilan dan hak-hak minoritas, yakni seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dari negara, dan bahkan mereka juga memiliki hak untuk mengembangkan kultur etniknya, termasuk etnik minoritas yang harus mampu mengelola bahasa, dan berbagai institusi sosialnya, agar tidak hilang dalam budaya kelompok etnik minoritas.
4. Jaminan minoritas untuk bisa berbicara dan keterwakilan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif. Mereka memiliki hak untuk bisa terwakili, tetapi, karena sistem kepartaian, seringkali kemudian ada kelompok-kelompok etnik, budaya dan kepentingan yang tidak terwakili, seperti wanita pekerja yang

belum tentu terwakili di parlemen, etnik kecil yang belum tentu terwakili sehingga aspirasi dan suaranya tidak bisa tersampaikan pada proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pembangunan.

5. Toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan sebagai lembaga otoritatif untuk pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi, mereka yang berusaha memperhatikan hak-hak minoritas tersebut memiliki berbagai keterbatasan, karena harus memperhatikan etnik atau kelompok mayoritas yang justru mereka wakili. Oleh sebab itu, hak-hak minoritas itu tetap memperoleh perhatian, namun dalam keterbatasan.

Inilah berbagai materi yang senantiasa mereka perhatikan dalam pembinaan bangsanya agar tetap kuat dan terus berkembang, bahkan seluruh budaya termasuk dari etnik minoritas diberi kesempatan untuk membina dan mengembangkannya. Nilai dan norma di atas ditransformasikan dan dikembangkan pada siswa-siswa sekolah melalui pelajaran IPS, yang di dalamnya juga termasuk PPKN dan Sejarah.

B. Peranan Sekolah dalam Peranan Pendidikan Multikultural

Sekolah yang menerpakan pendidikan sekolah memiliki beberapa peran yang harus dijalankan agar tercipta suasana yang multikultural. Banks & Banks (2005: 23) menyatakan bahwa:

“To implement multikultural education in a school, we must reform power relationships, the verbal interaction between teachers and students, the culture of the school, the curriculum, extracurricular activities, attitudes toward minority languages (Beykont, 2000), the testing program, and

grouping practices. The institutional norms, sosial structures, cause-belief statements, values, and goals, of the school must be transformed and reconstructed."

Berdasarkan pendapat di atas untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah maka sekolah harus mengubah bentuk interaksi antara guru dan peserta didik, budaya sekolah, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sikap terhadap perbedaan bahasa, program-program, norma-norma kelembagaan, struktur sosial, nilai-nilai, dan tujuan sekolah. Perubahan-perubahan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai multikultural.

Kurikulum sekolah perlu dijadikan bahan pengembangan pendidikan multikultural. Choirul Mahfud (2009: 5) menjelaskan kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum yang mampu memberikan penyadaran toleransi, menghormati keragaman suku, agama, etnis, budaya. Gollnick & Chinn (2006: 377) menambahkan selain kurikulum formal, di sekolah juga terdapat kurikulum tersembunyi yang terdiri dari norma-norma tak tertulis, nilai-nilai, dan hubungan sosial sekolah dan suasana kelas yang ada pada kepada peserta didik. Kurikulum tersembunyi mencakup norma dan nilai yang mendukung kurikulum formal yang harus mencerminkan keragaman dan perbedaan. Kurikulum tersembunyi memiliki dampak yang besar pada peserta didik dan guru. Kurikulum tersembunyi seperti struktur organisasi kelas dan sekolah, serta interaksi peserta didik dan guru.

Banks & Banks (2005: 23-24) menguraikan kurikulum tersembunyi sekolah seperti nilai dan norma seharusnya diperhatikan. Aspek-aspek dari lingkungan sekolah harus diubah menjadi budaya sekolah yang dapat mengajarkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok budaya yang beragam dan membantu peserta didik dari kelompok-kelompok tersebut mencapai keberhasilan di bidang akademis. Zuly Qodir dalam Sari Jatmiko dan Ferry T. Indarto (2006: 60) menyatakan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keragaman agama, etnis, gender, dan suku yang akan memberikan manfaat kepada

perilaku sosial peserta didik dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Sehubungan dengan hal tersebut maka sekolah hendaknya dapat menanamkan pemahaman dan sikap toleransi, menghargai dan menghormati sehingga dapat hidup bersama dalam perbedaan dan keragaman.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, sekolah dapat menciptakan peraturan yang di dalamnya terdapat Undang-Undang dan sanksi yang mencerminkan multikultural sehingga dapat mengajarkan untuk bertoleransi, menghargai dan menghormati. Kedua, program dan kegiatan sekolah juga perlu diubah ke dalam nuansa multikultural yang adil, setara dan demokratis sehingga seluruh peserta didik dapat berpartisipasi dalam program dan pendidikan tersebut. Ketiga, pendidikan multikultural dapat dijadikan sebagai pengembangan kurikulum. Kurikulum tersebut mampu memberikan penyadaran toleransi, menghormati keragaman suku, agama, etnis, budaya, mengandung kesetaraan dan keadilan.

C. Pendidikan Multikultural Untuk Pendidikan Dasar

Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 6-12 tahun. Pendidikan di Sekolah Dasar bertujuan untuk member bekal kemampuan dasar kepada anak didik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan mempersiapkan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (Suharjo, 2006:1).

Sekolah Dasar dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal yang meletakkan dasar pendidikan kepada peserta didik untuk menempuh jenjang pendidikan di atasnya. Oleh karena itu di Sekolah Dasar peserta didik harus diberi wawasan pengetahuan yang jelas agar tidak mengaburkan pengetahuannya di jenjang pendidikan selanjutnya. Sekolah Dasar tidak hanya memiliki peran untuk membentuk peserta

didik menjadi generasi yang berkualitas dari sisi kognitif (pengetahuan), tetapi juga harus membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tuntutan yang berlaku. Apa jadinya jika di sekolah peserta didik hanya dikembangkan ranah kognitifnya? Tentunya akan banyak generasi penerus bangsa yang pandai secara akademik, tapi lemah pada tataran sikap dan perilaku. Hal demikian tidak boleh terjadi, karena akan membahayakan peran generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.

Pembelajaran multikultural di sekolah dasar dapat dilakukan salah satu caranya dengan memasukkan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh guru adalah mengenalkan peserta didik tentang pluralism budaya yang ada di luar dirinya. Setelah peserta didik mengenal budaya di luar dirinya, kemudian guru harus mendorong untuk mengembangkan sikap peserta didik agar mau dan mampu menghargai budaya yang ada di luar dirinya yang sudah barang tentu banyak terdapat perbedaan. Dalam prosesnya tentu guru harus menggunakan teknik yang tepat dan cocok untuk perkembangan anak usia sekolah dasar.

Menurut Sutarno (2008: 7-5) ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Memberi setiap siswa kesempatan untuk mencapai potensinya.
2. Mempelajari bagaimana belajar dan berpikir kritis.
3. Mendorong siswa untuk mengambil peranan aktif dalam pendidikannya sendiri dengan membawa kisah dan pengalamannya ke dalam lingkup belajarnya.
4. Menunjukkan pada gaya belajar yang bermacam-macam.
5. Menghargai kontribusi kelompok lain yang telah berkontribusi pada dasar pengetahuan kita.
6. Mengembangkan sikap positif tentang kelompok orang yang berbeda dari dirinya sendiri.

7. Menjadi warga sekolah, warga masyarakat, warga Negara dan masyarakat dunia yang baik.
8. Belajar bagaimana mengevaluasi pengetahuan dari perspektif yang berbeda.
9. Mengembangkan identitas etnis, nasional dan global.
10. Memberi keterampilan mengambil keputusan dan keterampilan analisis kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupannya sehari-hari.

Sementara itu menurut Gordon dan Robert, seperti dikutip Sutarno (2008: 7-5) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi materi pokok untuk pembelajaran multikultural sebagai berikut:

1. Seleksi materi pokok bahasan seharusnya mencantumkan hal-hal cultural, didasarkan pada keilmuan masa kini.
2. Materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya mempresentasikan keragaman dan kesatuan ndi dalam dan lintas kelompok.
3. Materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya berada dalam konteks waktu dan tempat.
4. Materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya memberikan prioritas untuk memperdalam di samping keleluasaan.
5. Perspektif multi budaya seharusnya dimasukkan di dalam keseluruhan kurikulum.
6. Materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya diberlakukan sebagai konstruk sosial dan oleh karena itu tentatif seperti halnya seluruh pengetahuan.
7. Pokok bahasan seharusnya menggambarkan dan tersusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dialami siswa untuk dibawa ke kelas.

8. Pedagogi seharusnya berkaitan dengan sejumlah cara belajar mengajar interaktif agar menambah pengertian, pengujian kontraversi, dan saling belajar.

Itulah beberapa hal yang penting dilakukan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. Dengan pengintegrasian nilai-nilai multikultural ke dalam proses pembelajaran ini diharapkan nantinya siswa yang dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa mampu menerima, menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang muncul di kalangan etnis yang berbeda. Siswa tidak lagi menjadikan perbedaan sebagai ajang pemecah persatuan bangsa, akan tetapi justru mampu mengambil makna dari perbedaan-perbedaan yang ada.

D. Pendidikan Multikultural Untuk Pendidikan Menengah

Pemahaman dan akselerasi pendidikan yang berbasis multikultural menjadi sangat penting untuk dihayati bagi generasi muda. Terutama untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dari awal mengenai multikultural setidaknya akan mempengaruhi perkembangan generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu proses pendidikan yang berbasis multikultural, tidak saja berlangsung di sekolah namun juga luar sekolah yakni di masyarakat dan keluarga. Dengan demikian diharapkan akan terjadi kerukunan antara suku/etnik yang berbeda-beda dan secara bersama-sama membangun bangsa dan negara yang tercinta Indonesia.

Pendidikan nilai-nilai di Sekolah Menengah harus memberikan akses dan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan menerapkan jenis pengetahuan, kompetensi, dan sikap dalam proses mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat yang kompleks saat ini. Generasi muda harus memiliki kepedulian dan mempromosikan nilai-nilai pendidikan, keunggulan dan standar yang tinggi sebagai aspirasi individu dan kelembagaan, berprestasi dan

melakukan dalam semua aspek kegiatannya. Sekolah Menengah harus humanis dan memberi kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mendapatkan nilai-nilai yang akan sangat penting dalam pengembangan pribadi dan sosial. Sekolah harus mengembangkan rasa kemerdekaan dan harga diri peserta didik sebagai manusia, memiliki kepercayaan diri untuk berkontribusi pada masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial politik yang berbudaya dan bermoral.

Sekolah menengah harus mempersiapkan masa depan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga negara untuk melakukan hubungan interpersonal satu sama lain, dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Selain itu, sekolah menengah harus menyiapkan peserta didik untuk memiliki kepedulian kepada pendidikan multikultural di samping pendidikan keterampilan. Sekolah menengah harus menggabungkan pendidikan untuk otonomi pribadi yang rasional, pengembangan pendidikan multikultural dan berkontribusi sosial untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian.

Dalam kerangka strategi pembelajaran berbasis multikultural diharapkan dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif dan sadar budaya. Namun pada prakteknya, penggunaan budaya lokal (etnis) dalam pembelajaran berbasis multikultural tidak terlepas dari berbagai problematik yang terdapat dalam setiap komponen pembelajaran, sejak persiapan awal dan implementasinya. Beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis multikultural pada tahap persiapan awal, antara lain: 1) guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik; 2) guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkannya; dan 3) rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-

masing dalam konteks budaya masing-masing dalam konteks pengalaman belajar yang diperoleh.

Pengaktualisasian pendidikan multikultural haruslah memperhatikan berbagai dimensi yang saling berelasi satu sama lain. Banks (2007:83-85) memberikan panduan dimana ada lima dimensi pendidikan multikultur yang seharusnya secara simultan dilakukan, yaitu: integrasi materi (*content integration*), proses pembentukan pengetahuan (*knowledge construction process*), reduksi prasangka (*prejudice reduction*), pendidikan/ perlakuan pedagogi tanpa pandang bulu (*equity pedagogy*), dan pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and sosial structure*). Integrasi konten adalah upaya guru memberikan atau menggunakan contoh dan materi dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengajarkan konsep kunci, prinsip, generalisasi, teori dan lain-lain ketika mengajar satu topik atau mata pelajaran tertentu. Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan “poin kunci” pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda.

Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa mengatasi problematik tersebut adalah guru berkewajiban meluruskan asumsi dan prejudice negatif seperti itu. Salah satu cara mengurangi prejudice ini adalah dengan melibatkan siswa melakukan aktifitas bersama dengan mereka yang terdiri dari berbagai status sosial, ras, gender dan lain-lain. Dalam dimensi ini guru dituntut untuk melakukan banyak usaha dalam membantu siswa mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok.

Perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu (*equity pedagogy*) adalah upaya guru memperlakukan secara sama tanpa pandang bulu dalam proses pembelajaran di kelas. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar di sekolah menengah diupayakan

memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Hal ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar. Hal ini akan terlihat dari metode yang digunakan, cara bertanya, penunjukkan siswa, pengelompokkan siswa, dan sebagainya.

Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial adalah proses merestrukturisasi dan reorganisasi sekolah sehingga siswa dari beragam ras, suku, kelas sosial akan mengalami dan merasakan pemberdayaan dan persamaan budaya. Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Banks (2002:30-32) mengemukakan empat pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum ataupun pembelajaran di sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di sekolah, yaitu: 1) pendekatan kontribusi (*the contributions approach*); 2) pendekatan Aditif (*Aditive Approach*); 3) pendekatan transformasi (*the transformation approach*); dan 4) pendekatan aksi sosial (*the sosial action approach*). Pendekatan kontribusi (*the contributions approach*) paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Substansi pendidikan multikultural pada tahap ini adalah menanamkan pada siswa bahwa manusia yang hidup di sekitarnya dan di tempat lain serta di dunia ini sangat beragam. Seperti berbagai jenis makanan, pakaian, dan lain-lain dari berbagai daerah. Dengan demikian siswa mengerti bahwa ada cara yang berbeda tetapi maksud dan nilainya sama. Sehingga mereka dapat belajar untuk menerima perbedaan dengan proses dan rasa yang menyenangkan. Akhirnya siswa merasa berbeda itu bukanlah masalah, tetapi anugerah.

Pada Pendekatan aditif (*aditive approach*) dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan buku (cerita rakyat dari berbagai daerah atau negara lain), media pembelajaran berbasis multikultural misalnya CD pembelajaran cerita berbagai daerah/negara, modul pendidikan multikultural, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansif. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pengetahuan yang luas bagi siswa. Rasa ketertarikan akan keragaman yang diperoleh di dalam kelas akan memotivasi siswa untuk tahu lebih banyak dengan membaca, melihat di internet, berkunjung, bertanya pada yang lebih tahu dan sebagainya. Dengan wawasan yang lebih luas tentang keragaman budaya, kehidupan, persahabatan, pengetahuan, siswa akan tumbuh menjadi orang yang inklusif, mudah menerima yang berbeda, toleran dan menghargai orang lain. Selain itu akan mudah berinteraksi dengan lingkungan yang baru ataupun yang kompleks.

Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pada pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Bank (1993) menyebut ini proses *multiple acculturation* sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Konsepsi akulturasi ganda dari masyarakat dan budaya negara mengarah pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, musik, seni dan pengetahuan lainnya sebagai bagian integral dari yang membentuk budaya secara umum. Budaya kelompok dominan hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan budaya yang lebih besar.

Pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu atau masalah

yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis, sekolah membantu mereka menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial sehingga kelompok - kelompok etnis, ras, dan golongan yang terabaikan dan menjadi korban dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Dalam mengimplementasikan pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural sebagaimana diuraikan di atas, banyak bergantung pada peran dan kemampuan guru dalam multikulturalisme. Karena itu peran guru di dalam pendidikan multikultural di sekolah sangatlah penting.

Adapun peran guru yang relevan diterapkan di sekolah menengah adalah sebagai berikut.

1. Membangun Paradigma Keberagaman Inklusif di Lingkungan Sekolah

Guru sebagai orang dewasa dan bijak harus menerima bahwa ada agama lain selain agama yang dianutnya. Ada pemeluk agama lain selain dirinya yang juga memeluk suatu agama. Dalam sekolah yang muridnya beragam agama, sekolah harus melayani kegiatan rohani semua siswanya secara baik. Hilangkan kesan mayoritas minoritas siswa menurut agamanya. Setiap kegiatan keagamaan atau kegiatan apapun di sekolah biasakan ada pembauran untuk bertoleransi dan membantu antar siswa yang beragama berbeda.

Guru dan kebijakan di sekolah tidak mengungkapkan secara eksplisit, radikal, dan provokatif dalam wujud apapun, karena di luar sekolah itu siswa akan bertemu, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain yang berbeda agama. Sebagai bahan renungan, seorang guru harus peka dan bijaksana menjelaskan sejarah Perang Salib, bom Bali, konflik antar pemeluk agama di Maluku, terorisme,

dan sebagainya. Jangan sampai ada ketersinggungan sekecil apapun karena kecerobohan ungkapan guru. Sekecil apapun singgungan tentang agama akan membekas dalam benak siswa yang akan dibawanya sampai dewasa.

2. Menghargai Keragaman Bahasa di Sekolah

Suatu sekolah bisa terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang berasal dari berbagai wilayah dengan keragaman bahasa, dialek, dan logat bicara. Meski ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal di sekolah, namun logat atau gaya bicara selalu saja muncul dalam setiap ungkapan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Sekolah perlu memiliki peraturan yang mengakomodasi penghargaan terhadap perbedaan bahasa.

Guru serta warga sekolah yang lain tidak boleh mengungkapkan rasa "geli" atau "aneh" ketika mendengarkan atau membaca ungkapan bahasa yang berbeda dari kebiasaannya. Semua warga sekolah bersikap apresiatif dan akomodatif terhadap perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan yang ada seharusnya menyadarkan kita bahwa kita sangat kaya budaya, mempunyai teman-teman yang unik dan menyenangkan, serta dapat bertukar pengetahuan berbahasa agar kita semakin kaya wawasan.

3. Membangun Sikap Sensitif Gender di Sekolah

Pembagian tugas, penyebutan contoh-contoh nama tokoh, dan sebagainya harus proporsional antara laki-laki dan perempuan. Tak ada yang lebih dominan atau sebaliknya minoritas antara gender laki-laki dan perempuan. Dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kodrati, penerapan gender dalam fungsi-fungsi pembelajaran di sekolah harus proporsional karena setiap siswa laki-laki dan perempuan memiliki potensi masing-masing. Perempuan jadi pemimpin, laki-laki mengurus konsumsi, atau yang lain saat ini bukan sesuatu yang tabu.

Siswa berhak mengembangkan potensinya dengan baik tanpa bayang-bayang persaingan gender. *Reward* dapat diberikan pada siapa pun dengan gender apapun yang mampu berprestasi, sebaliknya beri *punishment* yang tegas mendidik diberikan terhadap sikap, ucapan, dan perilaku yang menyinggung perbedaan gender.

4. Membangun Pemahaman Kritis dan Empati terhadap Ketidakadilan serta Perbedaan Sosial

Pelayanan pendidikan dan penegakan peraturan sekolah tidak boleh mempertimbangkan status sosial siswa. Siswa dibaurkan dari beragam status sosial dalam kelompok dan kelas untuk berinteraksi normal di sekolah. Meskipun begitu, guru dan siswa harus tetap memahami perbedaan sosial yang ada di antara teman-temannya. Pemahaman ini bukan untuk menciptakan perbedaan, sikap lebih tinggi dari yang lain, atau sikap rendah diri bagi yang kurang, namun untuk menanamkan sikap syukur atas apapun yang dimiliki.

Selanjutnya dikembangkan kepedulian untuk tidak saling merendahkan namun saling mendukung menurut kemampuan masing-masing. Sebaiknya sikap empati dan saling membantu tidak hanya ditanamkan di lingkungan sekolah saja. Suatu waktu siswa bisa diajak berkegiatan sosial di luar sekolah seperti di panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya. Atau bila ada musibah di antara warga sekolah atau daerah lain siswa diajak berdoa dan memberikan sumbangan. Sekecil apapun doa, ucapan simpati, jabat tangan, pelukan, atau bantuan material akan sangat bermakna bagi pembentukan karakter siswa juga siapa pun yang menjadi obyek empati.

5. Membangun Sikap Anti Diskriminasi Etnis

Sekolah bisa jadi menjadi Indonesia mini atau dunia mini, dimana berbagai etnis menuntut ilmu bersama di sekolah. Di sekolah bisa jadi suatu etnis mayoritas terhadap etnis lainnya. Tapi perlu dipahami, di sekolah lain etnis yang semula mayoritas bisa jadi menjadi minoritas. Hindari sikap negatif terhadap etnis yang berbeda. Di sekolah perlu ditanamkan dan dibiasakan pergaulan yang positif, diberikan pemahaman bahwa inilah Indonesia yang hebat, warganya beraneka ragam suku atau etnis, bahasa, tradisi namun bisa bersatu karena sama-sama berbahasa Indonesia dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena itu perlu membangun kultur dan kehidupan di SMK yang Bhinneka Tunggal Ika dengan interaksi dan komunikasi yang positif.

6. Menghargai Perbedaan Kemampuan

Tidak semua siswa berkemampuan sama atau standar. Dalam psikologi sosial dikenal istilah *disability*, artinya terdapat sebuah kondisi fisik dan mental yang membuat seseorang kesulitan mengerjakan sesuatu yang orang kebanyakan dapat mengerjakannya dengan mudah. Dalam orientasi awal masuk dan pengamatan proses guru dan siswa dapat saling memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing. Karena siswa sudah menjadi bagian warga sekolah, jangan sampai sikap, ucapan, dan perilaku yang meremehkan atau menter-tawakan kelemahan yang sudah dipahami. Hal itu sangat berdampak negatif, baik bagi siswa yang unggul maupun siswa yang lemah. Yang unggul akan merasa jumawa dengan keunggulannya sehingga bisa membuatnya lalai dan tidak berprestasi optimal.

Bagi siswa yang lemah akan menjadi tidak termotivasi belajar dan merasa terkucilkan. Sebaiknya dibiasakan pembauran siswa unggul dan lemah dalam kelompok atau kelas agar terjadi pembimbingan sebaya, yang unggul semakin kuat pemahamannya

tentang suatu materi dan merasa bermanfaat dengan ilmunya, serta yang kurang memperoleh guru sebaya yang lebih komunikatif dan merasa diterima oleh teman-temannya. Menghargai Perbedaan Umur Setiap individu siswa mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan kejiwaannya sesuai pertambahan umurnya.

Guru harus memahami ini, terutama tentang karakteristik psikologis dan tingkat kemampuan sesuai umurnya. Selain itu jangan sampai ada deskriminasi, sikap, ucapan, dan perilaku negatif diantara warga sekolah dengan sebutan dominasi senior atas junior, pelecehan berdasar perbedaan ukuran fisik, kata sebutan atau panggilan yang tidak disukai (misal "si Unyil" untuk siswa bertubuh kecil, "bayi ajaib" untuk siswa berusia lebih muda tapi pintar, "tuyul" untuk adik kelas yang berkepala gundul, dan sebagainya). Seharusnya yang lebih tua memberi teladan, memberi motivasi, memberi kepercayaan, demokratis, membimbing, mengasuh, dan melindungi yang lebih muda. Yang muda menghormati, sopan santun, menauladani kebaikan, dan membantu yang lebih tua.

BAB 7

Pendidikan Multikultural untuk Membangun Jiwa Nasionalisme

A. Nilai Inti Pendidikan Multikultural Membangun Nasionalisme

Pendidikan multikultural sangat tepat untuk membangun nasionalisme keindonesiaan pada era global, karena pendidikan multikultural memiliki nilai inti (core value) dalam perspektif lokal maupun global, yakni: 1) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2) tanggung jawab terhadap negara kesatuan, 3) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya, 4) menjunjung tinggi supremasi hukum, dan 5) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal.

Pendidikan multikultural walaupun sangat tepat diterapkan di negara kita, namun menurut Sparringa terdapat banyak tantangan, yang meliputi: 1) bagaimanakah masalah kesadaran bersama itu dibangun dalam sebuah ruang yang, di samping memberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi yang serba ragam, juga mengundang elemen-elemen yang berbeda itu untuk menemukan kebutuhan bersama bagi sebuah integrasi di tingkat yang lebih tinggi, 2) proses ini tidak terjadi pada ruang yang terisolasi dari persoalan-persoalan ketidakmerataan, bahkan ketidakadilan, tentang bagaimana sumber-sumber politik dan ekonomi itu dialokasikan dan distribusikan dalam masyarakat nasional dan internasional, 3) perubahan yang berlangsung di tataran global mendiktekan agenda-agenda politik dan ekonomi baru yang mempersempit kesempatan kita untuk mendefinisikan kembali gagasan-gagasan dasar tentang negara bangsa tanpa

mengindahkan gagasan-gagasan dan praktikpraktik materialisme-rasional yang dibawa serta oleh ekonomi pasar global.

B. Strategi Membangun Nasionalisme melalui Pendidikan Multikultural

Indonesia termasuk negara atau bangsa yang sangat multikultural. Indonesia dikaruniai sebagai sebuah bangsa yang mempunyai ratusan suku bangsa, sub-etnik, bahasa, tradisi, dan budaya. Keragaman bukanlah tragedi, tetapi sebuah potensi yang dapat dijadikan instrumen untuk menciptakan kehidupan yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Bangsa Indonesia harusnya semakin cerdas dalam membaca berbagai aspek kehidupan yang selalu mengalir mulai dari ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan tanpa harus menanggalkan nilai-nilai adiluhung yang diwariskan pendahulu.

Ada beberapa standar minimal yang berupa langkah positif yang hendaknya senantiasa dipegang oleh setiap individu Indonesia dalam menghadapi perubahan jaman yang semakin mengglobal. Agar tidak kehilangan jati diri dan karakter sebagai bangsa Indonesia di satu sisi dan agar mampu bersaing dalam kompetisi global di sisi lain. Langkah-langkah ini membangun diri individu warga bangsa agar memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dan mampu berperilaku yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, antara lain dengan:

1. Melatih Anak Sejak Dini Memahami Orang Lain di Sekitar

Manusia dengan berbagai ragam karakteristik dan pola pikirnya, bukanlah sebuah petaka, melainkan merupakan potensi. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu kesadaran rakyat negeri ini untuk saling mengenal dan memahami orang di sekitarnya. Kepedulian sosial perlu ditingkatkan dengan even-even kebersamaan untuk melatih empati, kepekaan sosial, solidaritas dan kebersamaan. Komunikasi antarwarga perlu terus dibangun di berbagai kesempatan dan tempat. Melalui komunikasi ini banyak

hal yang tersampaikan sehingga para warga dapat saling memahami. Perbedaan-perbedaan yang ada justru bisa menjadi topik menarik dalam temu warga dan dapat mengakrabkan mereka. "Sesungguhnya Allah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal" (Q.S. Al Hujurt: 13, dikutip dari Sail Agil Siraj, 2007), sehingga kesadaran sesama warga, sesama manusia terinternalisasi.

2. Membudayakan Komitmen Berbangsa dan Bernegara

Melalui berbagai suasana dan cara ditanamkan komitmen menjaga esensi kemanusiaan dalam berbangsa dan negara di tengah realitas sebagai masyarakat yang multikultural dan beragam kepentingan. Maka warga masyarakat perlu disadarkan bahwa seseorang tidak mungkin dapat melangkah sendirian tanpa orang lain. Semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Komitmen berbangsa dan bernegara berarti komitmen untuk tidak melakukan penindasan, diskriminasi, serta aksi kekejaman, kejahatan, penganiayaan terhadap kelompok anak bangsa sendiri maupun bangsa lain. Menegakkan supremasi hukum dan mempercayakan penyelesaian permasalahan pada aparat penegak hukum merupakan komitmen bernegara dan berbangsa. Karena dengan begitu menghormati perangkat-perangkat negara yang diciptakan untuk keteraturan bernegara. Komitmen ini harus ditanamkan seawal mungkin, baik melalui lembaga keluarga, persekolahan maupun lembaga masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Program-programnya perlu perencanaan yang berkelanjutan, sebab ini berkaitan dengan nation building.

3. Melatih Warga Bangsa Mampu hidup dalam keberagaman

Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan mulai dari keluarga, dalam kehidupan warga sekitar, di sekolah sampai dalam komunitas yang lebih luas. Para pendidik dapat menanamkan dan

melatihkan pada siswa untuk mampu melakukan soft skill yang berkaitan dengan substansi nilai-nilai multikultural, seperti mampu menerima perbedaan, toleransi, menghormati pendapat orang lain, bekerja sama, mampu menganalisis persamaan dan perbedaan yang ada pada orang lain, mampu berlaku adil, mampu melihat ketimpangan sosial, dan mencari solusinya (problem solving). Selain itu membiasakan warga untuk saling membantu tanpa memandang perbedaan agama, status sosial, gender, umur, wilayah tempat tinggal (desa/kota). Dengan demikian sejak awal anggota masyarakat dilatih untuk mampu menyesuaikan diri dan hidup dalam keragaman serta mampu berperilaku sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang multikultural. Untuk dapat melaksanakannya diperlukan kebijakan dari penyelenggaran negara, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, partai dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Kebijakan itu kemudian diwujudkan ke dalam program praktik terencana dan disesuaikan dengan kondisi maupun potensi masyarakatnya.

4. Melatihkan Kemampuan untuk Memahami Ideologi (Agama) Lain

Warga bangsa Indonesia merupakan masyarakat religius yang berlandaskan pada ajaran agama yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) dan aliran kepercayaan. Ini perwujudan dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pada setiap warga negara perlu ditanamkan kesadaran bahwa di Indonesia terdapat bermacam-macam ideologi dan agama. Setiap manusia mempunyai agama ataupun ideologi yang tidak harus sama dengan ideologi kita. Oleh sebab itu yang paling baik adalah memahami substansi ideologi dan agama tersebut sebagai sebuah ajaran yang mencita-citakan kedamaian dan kebaikan. Bila hal ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka konflik antaragama tidak akan terjadi.

5. Mengembangkan dan Melestarikan tradisi

Pengakuan terhadap bangsa Indonesia yang terdiri dari beratus suku bangsa, berarti mengakui keragaman budaya dan tradisi yang hidup serta berkembang di Indonesia. Setiap warga bangsa harus mengetahui dan memahami negara Indonesia kaya akan tradisi bangsa. Menghormati budaya sendiri dan melestarikannya merupakan upaya menanamkan sikap kebangsaan yang kuat pada diri sendiri. Sehingga tercipta suatu identitas/komunitas yang dapat melahirkan karakter sebuah bangsa. Pemahaman keberagaman yang multikultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Keragaman budaya dan tradisi yang ada dari sub nasional atau etnis, merupakan kekayaan bangsa dan negara.

Negara harus menjamin kebebasan pengembangan dan pelestarian tradisi dan budaya daerah (lokal) atau etnis. Pengembangan dan pelestarian tradisi dan budaya daerah (etnis) ini, bukan untuk menguatkan primordialisme kesukuan, tetapi untuk menguatkan kekayaan khasanah budaya nasional yang pada dasarnya berasal dari budaya sub-nasional. Sebagai warga negara dan bagian dari wilayah Indonesia, dimanapun berada setiap warga negara haruslah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, memiliki rasa kesatuan dan persatuan bangsa, menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa serta mematuhi semua aturan-aturan negara demi kelanjutan dan keteraturan hidup berbangsa bernegara. Makna yang terkandung pada Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, harus diinternalisasikan kepada setiap warga negara Indonesia untuk menjadi janji luhur yang tetap dipegang sampai akhir hayat. Mengembangkan dan melestarikan tradisi bukan berarti melunturkan rasa nasionalisme.

6. Mewajibkan Media Massa Mengambil Peran dalam Membangun Karakter Bangsa

Media massa, khususnya mempengaruhi pembentukan watak dan akhlak bangsa, diharapkan dapat mengambil peran sosio-kultural, sosial-ekonomi, sosial-politik untuk tugas nation and character building (membangun karakter bangsa), dan pengukuran kebhinneka-tunggalikaan. Dengan adanya dialog, persuasif, dan menyamakan pandangan untuk kepentingan bangsa dan negara, antara para pemimpin media massa dengan pemimpin-pemimpin negara dan masyarakat diperoleh kesepakatan, kebersamaan kewajiban dan kepedulian untuk bersama-sama membangun karakter bangsa di bidangnya masing-masing. Melalui media massa dapat dikembangkan tentang pentingnya bangsa memiliki karakter, serta dapat disosialisasikan strategi untuk membangunnya.

Selain langkah-langkah di atas masih banyak lagi cara yang dapat dilakukan untuk membangun karakter bangsa. Walau cara, teknik, sarana berbeda-beda tetapi tujuan dan komitmen tetap sama yaitu membangun karakter bangsa yang baik. Bangsa yang memiliki karakter yang baik adalah bangsa yang terhormat dan dapat menjadi teladan bangsa-bangsa lain di dunia. Semoga Indonesia suatu saat menjadi teladan bangsa lain, khususnya dalam hal karakter bangsa.

C. Menumbuhkan kembali Nasionalisme melalui

Nilai-Nilai Budaya

Secara etimologis, kebudayaan dapat diartikan sebagai cara, kebiasaan, atau segala hasil daya upaya manusia mengolah akal budinya. Upaya itu dilakukan tidak secara individual, melainkan dalam sebuah rangka komunitas besar, sebab tanpa komunitas, kebudayaan, tidak bisa dipelajari dan dimunculkan kehadirannya. Dengan cara apa pun kebudayaan itu didefinisikan pasti dapat dikaitkan dengan kegiatan dalam suatu komunitas, yang disebut etnik, kaum ataupun

bangsa. Juga dengan cara apa pun diberi batasan pasti ia dikaitkan dengan upaya masyarakat atau individu untuk mengembangkan diri dan kepribadiannya. Kebudayaan sebagai lambang nilai-nilai budaya lokal bisa menjadi sebuah pedoman dalam upaya rnerangkai berbagai kepentingan yang ada secara harmonis, tanpa ada pihak yang dikorbankan.

Nasionalisme masa kini bukan lagi berkaitan dengan penjajah, atau terutama terhadap perilaku ekspansif atau agresor-negara tetangga, melainkan harus dikaitkan dengan keinginan untuk memerangi semua bentuk penyelewengan, ketidakadilan, perlakuan yang melanggar HAM. Artinya, nasionalisme saat ini adalah usaha untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Perilaku korupsi, menggelapkan uang negara, memanfaatkan segala fasilitas dalam lingkup kekuasaannya demi memperkaya diri, berperilaku sewenang-wenang dalam menjalankan roda kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain contohnya gemar menerima sogokan, uang pelicin.hal tersebut adalah perilaku antinasionalisme yang harus diberantas.

Untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme di tengah arus globalisasi diperlukan sebuah upaya baru untuk membangun bangsa melalui cara-cara dalam berkomunikasi, urbanisasi, pendidikan massal, dan partisipasi politik. Kemudian diperlukan proses pelembagaan yang harus dikembangkan agar proses pembangunan nasional dapat melahirkan keseimbangan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, memberi keleluasaan terhadap partisipasi masyarakat, mendukung proses komunikasi dan membuka ruang publik, mendorong munculnya pernerintah yang terorganisasi dengan baik dan sangat responsif, serta mempercepat lahirnya elit yang matang dan fleksibel dalam berpolitik.

Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati dirinya melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna

substantif nilai-nilai kearifan lokal. Keterbukaan dikembangkan menjadi kejujuran dalam setiap aktualisasi pergaulan, pekerjaan dan pembangunan, beserta nilai-nilai budaya lain yang menyertainya. Budi pekerti dan norma kesopanan diformulasi sebagai keramahtamahan yang tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, bukan untuk membangun kesombongan. Ketulusan, memang perlu dijadikan modal dasar bagi segenap unsur bangsa. Ketulusan untuk mengakui kelemahan diri masing-masing, dan ketulusan untuk membuang egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain sebagai entitas dari bangsa yang sama. Dari ketulusan, seluruh elemen bangsa yang majernuk masing-masing merajut kebhinnekaan, kemudian menjadikannya sebagai semangat nasionalisme yang kokoh. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekadar menjadi identitas suku atau masyarakat tertentu.

Banyaknya budaya bangsa yang di klaim oleh negara tetangga berdampak baik dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya kebudayaan sehingga muncul rasa bangga dan ingin melindungi serta melestarikan beragam kebudayaan yang ada.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme melalui kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Tanamkan rasa bangga terhadap keunikan bangsa kita dari segi budaya, yang menjadi ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain. Selain itu jangan ragu untuk mempelajari keberagaman budaya yang kita miliki yang bahkan orang asing yang ingin mempelajarinya.
2. Kenalkan budaya bangsa kepada generasi penerus sejak mereka masih kanak-kanak. Misalnya dengan mengenalkan permainan tradisional seperti congklak, gobak sodor, Egrang dan sebagainya.

Hal ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan juga melestarikan budaya bangsa.

3. Pertahankan sikap ramah tamah dan gotong royong yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
4. Penggunaan batik di sekolah. Penetapan batik sebagai budaya bangsa oleh Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 juga ditetapkan sebagai hari batik nasional. Namun alangkah lebih baik jika setiap sekolah di Indonesia menggunakan batik untuk seragam identitasnya. Hal ini dapat akan lebih efektif dalam melestarikan budaya dan juga menumbuhkan jiwa nasionalisme. Selain itu kreasi pakaian yang mengikuti mode namun menggunakan motif batik juga dapat menjumbuhkan rasa bangga terhadap batik itu sendiri.
5. Jangan jenuh untuk menonton kesenian daerah. Misalnya wayang, wayang merupakan salah satu kesenian Indonesia yang sarat akan pesan moral. Apalagi jika bercerita tentang perjuangan, hal ini tentu saja dapat meningkatkan jiwa nasionalisme.
6. Menyaring budaya asing yang masuk. Kita harus selektif dengan budaya asing yang masuk, ambil yang mempunyai segi positifnya. Misalnya musik dari Barat yang bisa dikolaborasi dengan gending, sehingga menjadi musik pengiring tari kreasi baru yang tidak membosankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika, dalam Tsaqafah*, Vol. I, No. 2, 2003.
- Banks, James A, *Educating Citizens in a Multikultural Society*, Teacher College Press, Columbia University, New York, 1997.
- Banks, James A. (ed.). 1989. *Multikultural Education: Issues and Perspectives*. Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- Banks, James A. 1993. *Teaching strategies for ethnic studies*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Banks, James A. 2002. *An introduction to Multikultural Education*, Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- Dede, Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014
- Djohar. 2003. *Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta : LESFI.
- Hernandez, Hilda. 1989. *Multikultural Education: A teacher Guide to linking Context, Process, and Content*. New Jersey & Ohio : Prentice Hall.
- Kymlicka, Will, *Multikultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, New York, 2000.
- M. Ainul Yaqin. 2005. *Pendidikan multikultural: cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Maslikhah. 2007. *Pendidikan Mulikultural*. Jawa Tengah: PT. Temprina Media Grafika.
- Sada, Clarry, *Multikultural Education in Kalimantan Barat; an Overview, dalam Jurnal Multikultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004.

- Shihab, Alwi. 1998. *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama Cet. IV*. Bandung : Mizan.
- Suharjo. 2006. *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Ketenagaan.
- Suseno, Franz Magnis. 1995. *Pluralisme Keberagamaan Sebuah Tanggung Jawab Bersama Cet. I*. Jakarta: Paramadina.
- Sutanto, Astrid S. – Sunaryo. 1995. *Globalisasi dan Komunikasi*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutarno. 2007. *Pendidikan Multikultural*. Kalimantan Selatan: Dinas Pendidikan dan FKIP Unlam.
- Sutarno. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Syahrin, Harahap. 1991. *Islam; Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Cet. I. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan, kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme, Tantangan Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Tim Penulis Paramadina, Figh Lintas Agama. 2004. *Membangun Masyarakat Inklusi Pluralis*. Jakarta : Paramadina.
- Tobroni dan Syamsul Arifin. 1994. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik : Refleksi Teologis Untuk Aksi Keberagamaan dan Pendidikan*. Yogyakarta : Sypress.
- Wuryandari, Wuri. *Pembelajaran Berbasis Multikultural Di Sekolah Dasar Untuk Mengembangkan Karakter Bangsa*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zamroni, 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Zamroni. 2010. *A conception frame-work of multikultural teachers education. A reader*. Yogyakarta: Graduate Program The State University of Yogyakarta.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Untuk Membangun Jiwa Nasionalisme Generasi Muda

Pendidikan multikultural tepat untuk membangun nasionalisme Ke-Indonesia-an dalam menghadapi tantangan global, karena memiliki nilai inti (core value) dalam perspektif lokal maupun global yakni: 1) ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa; 2) tanggung jawab terhadap negara kesatuan; 3) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya; 4) menjunjung tinggi supremasi hukum; dan 5) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal.

Generasi muda merupakan sebuah istilah yang mengungkapkan harapan, semangat, dan mimpi. Generasi muda adalah penerus bangsa, yakni mereka lah orang-orang yang akan menjadi penentu cita-cita dan nasib bangsa. Generasi ini merupakan generasi yang disiapkan untuk mencapai visi dan misi bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, generasi muda harus memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena sebagai wujud pengabdian dan kecintaan terhadap bangsa itu sendiri. Dengan demikian, generasi muda dapat menjaga keutuhan bangsa, persatuan bangsa, dan dapat meningkatkan martabat serta citra positif bangsa dihadapan negara-negara di dunia.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
• kmediacorp
• kmedia.cv@gmail.com
• www.kmedia.co.id

